

LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI ACEH
MEI 2023

VISI

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas BI dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

MISI

Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

FUNGSI

1. Fungsi *Advisory* Kebijakan
2. Fungsi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
3. Fungsi Sistem Pembayaran
4. Fungsi Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
5. Fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS)
6. Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
7. Fungsi Pengawasan SP dan PUR
8. Fungsi Komunikasi Kebijakan

TUGAS POKOK

1. Memberikan masukan kepada Dewan Gubernur kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
2. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset serta memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM
3. Melaksanakan kegiatan perizinan dan pengawasan serta operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan kebijakan stabilitas keuangan, program perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung fungsi-fungsi utama.

Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116
Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2023" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan I 2023 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,60% (yoy). Pada sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor Luar Negeri. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Lapangan Usaha Konstruksi.
2. Laju inflasi Aceh pada triwulan I 2023 tercatat terkendali didorong oleh terkendalinya inflasi kelompok makanan. Pada periode laporan, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 5,46% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,89% (yoy).
3. Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibanding tahun 2022. Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh normalisasi ekspor luar negeri yang sudah tumbuh tinggi pada periode-periode sebelumnya. Lebih lanjut, program vaksinasi massal dan vaksin *booster* tahap ketiga juga mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat yang akan memperbaiki konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, optimalisasi realisasi belanja pemerintah daerah perlu terus didorong.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah tercipta dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Mei 2023
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Rony Widijarto P.
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	1
1.1. GAMBARAN UMUM	2
1.2. SISI PERMINTAAN	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	8
BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	14
2.1. GAMBARAN UMUM	15
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	15
2.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	17
BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	19
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	20
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	20
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN II 2022	26
3.4. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	27
BAB 4. STABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN UMKM	33
4.1. KINERJA PERBANKAN	34
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	35
4.3. KINERJA KORPORASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN	41
4.4. KINERJA PEMBIAYAAN/PEMBIAYAAN RUMAH TANGGA	42
4.5. LANGKAH PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM	43
BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	47
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	48
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI	50
5.3. KEGIATAN KUPVA BB.....	53
5.4. INKLUSI KEUANGAN	54
BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....	58
6.1. KETENAGAKERJAAN	59
6.2. KEMISKINAN	61
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	64
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI	65
7.2. PROSPEK INFLASI	67
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw I 2023	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi	2
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan dari Sisi Permintaan	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	3
Grafik 1.5 Perkembangan Pembiayaan Konsumsi	4
Grafik 1.6 Perkembangan Hasil Survei Konsumen	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	5
Grafik 1.8 Pertumbuhan Investasi	5
Grafik 1.9 Realisasi Investasi	6
Grafik 1.10 SKDU Investasi	6
Grafik 1.11 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri	6
Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Batubara	7
Grafik 1.13 Pertumbuhan Impor Luar Negeri Aceh	7
Grafik 1.14 Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah	8
Grafik 1.15 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Aceh dari Sisi LU Utama	8
Grafik 1.16 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara dan Laut	9
Grafik 1.17 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	9
Grafik 1.18 Nilai Tukar Petani	9
Grafik 1.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	10
Grafik 1.20 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan	10
Grafik 1.21 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	11
Grafik 1.22 Pertumbuhan Pengadaan Semen	11
Grafik 1.23 Pertumbuhan LU Pertambangan	12
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh	18
Grafik 3.1 Perbandingan Inflasi Sumatera Tw I 2023	20
Grafik 3.2 Perkembangan Harga Uang Basah	21
Grafik 3.3 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit	21
Grafik 3.4 Produksi Cabai Merah	21
Grafik 3.5 Perkembangan Harga Bawang Merah	22
Grafik 3.6 Perkembangan Harga Emas Dunia	26
Grafik 3.7 Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh	27
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh	32
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) (% , yoy)	33
Grafik 4.3 Realisasi Belanja APBD dan Perkembangan Giro	33
Grafik 4.4 Perkembangan Nilai Tabungan	33
Grafik 4.5 Jumlah Rekening per Saldo	34
Grafik 4.6 Proporsi DPK per Jenis	34
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Kepemilikan	35

Grafik 4.8 DPK Spasial	35
Grafik 4.9 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Proyek dan Jenis Penggunaan	35
Grafik 4.10 Penyaluran Pembiayaan Spasial.....	37
Grafik 4.11 Perkembangan NPL/NPF.....	37
Grafik 4.12 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMKM.....	38
Grafik 4.13 Penyaluran Pembiayaan UMKM Spasial	38
Grafik 4.14 Penyaluran Pembiayaan Korporasi.....	39
Grafik 4.15 Tenaga Kerja Berdasarkan LU.....	40
Grafik 4.16 Proporsi Pembiayaan RT	41
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas	46
Grafik 5.2 Pertumbuhan Inflow dan Outflow	46
Grafik 5.3 Transaksi Kas Titipan Triwulanan.....	47
Grafik 5.4 Transaksi Kas Titipan	47
Grafik 5.5 Nominal SKNBI	48
Grafik 5.6 Volume SKNBI.....	48
Grafik 5.7 Nominal BI RTGS	48
Grafik 5.8 Volume BI RTGS.....	49
Grafik 5.9 Transaksi ATM Debit	49
Grafik 5.10 Transaksi Kartu Kredit.....	50
Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	50
Grafik 5.12 Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS	50
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB	51
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA.....	52
Grafik 5.15 Penyaluran PKH (KPM).....	53
Grafik 5.16 Penyaluran PKH (Nominal).....	53
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal).....	53
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM).....	54
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera	58
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	60
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Sumatera	61
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2023	15
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Transfer dan Dana Desa Triwulan I 2023.....	16
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan I 2023.....	16
Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN di Aceh Triwulan I 2023	17
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APB di Provinsi Aceh Triwulan I 2023.....	17
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD se-Provinsi Aceh	18
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh	18
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang	20
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	20
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	22
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	22
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga	23
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	23
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	24
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	24
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	25
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan	25
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	25
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	25
Tabel 5.1 Rasio Ketersediaan Layanan Lembaga Keuangan Formal	52
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	58
Tabel 6.2 Perkembangan TPT	58
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	59
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan	59
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	59
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani	60
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	61
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan	61

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral)

Sektoral (Rp Triliun)	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,64	9,23	9,78	9,25	9,17	9,47	9,46	9,61	9,35	9,65	9,31	10,71	9,66
Pertambangan dan Penggalian	2,33	2,98	2,73	2,45	2,49	2,15	2,98	2,76	2,63	2,70	2,77	2,74	2,46
Industri Pengolahan	1,39	1,61	1,62	1,44	1,53	1,62	1,65	1,42	1,43	1,68	1,66	1,70	1,49
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Konstruksi	3,35	3,3	3,64	3,61	3,32	3,21	3,53	3,77	3,04	2,96	3,51	3,99	3,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,74	4,78	4,69	5,03	4,48	5,18	4,96	5,41	5,18	5,27	5,19	5,69	5,74
Transportasi dan Pergudangan	2,32	1,18	1,76	1,8	2,12	1,93	2,06	2,31	2,25	2,25	2,25	2,28	2,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,39	0,4	0,44	0,36	0,34	0,35	0,50	0,47	0,51	0,53	0,54	0,53
Informasi dan Komunikasi	1,28	1,35	1,29	1,26	1,34	1,33	1,45	1,46	1,47	1,51	1,61	1,61	1,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	0,6	0,58	0,57	0,57	0,55	0,58	0,53	0,60	0,45	0,51	0,54	0,56
Real Estate	1,41	1,35	1,35	1,34	1,37	1,37	1,53	1,40	1,42	1,43	1,59	1,45	1,48
Jasa Perusahaan	0,21	0,2	0,21	0,22	0,20	0,19	0,23	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,67	2,94	2,81	3,05	2,62	3,30	2,98	3,29	2,56	3,04	3,32	3,26	2,78
Jasa Pendidikan	0,84	0,91	0,92	0,99	0,88	0,84	0,88	1,10	0,95	0,95	0,91	1,02	0,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,95	1,06	1,18	1,07	1,09	1,16	1,25	1,26	1,29	1,22	1,26	1,20
Jasa lainnya	0,48	0,45	0,48	0,51	0,48	0,44	0,47	0,56	0,54	0,56	0,57	0,56	0,57
PDRB	32,71	32,27	33,4	33,2	32,07	33,10	33,34	35,66	33,45	34,57	35,27	37,66	35,00
PDRB Non Migas	30,38	29,3	30,67	30,75	29,58	30,95	31,36	32,90	30,82	31,87	32,50	34,92	32,54

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran

Komponen (Rp Triliun)	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
- Konsumsi Rumah Tangga	18,67	18,5	18,28	17,82	17,72	18,55	18,83	19,04	18,84	19,34	19,21	18,93	19,43
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,65	0,65	0,66	0,61	0,60	0,58	0,63	0,64	0,64	0,64	0,67	0,68	0,67
- Konsumsi Pemerintah	3,24	5,95	5,85	6,44	5,24	6,54	5,87	7,29	3,32	5,36	5,66	7,61	3,40
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10,92	10,78	11,53	11,92	10,32	10,97	11,36	11,97	10,96	10,94	11,37	11,86	11,46
- Perubahan Inventori	-0,11	-0,29	0,05	0,28	0,18	-0,05	0,01	-0,03	0,06	0,03	-0,02	0,09	0,34
- Ekspor Luar Negeri	1,33	0,76	0,74	0,78	1,27	0,94	1,00	1,85	1,69	1,66	1,71	2,12	2,04
- Impor Luar Negeri	0,27	0,07	0,06	0,2	0,08	0,19	0,12	0,64	0,18	0,36	0,19	0,36	0,32
- Net Ekspor Antarprovinsi	-1,72	-4	-3,64	-4,45	-3,17	-4,24	-3,26	-4,45	-1,87	-3,04	-3,14	-3,27	-2,02
PDRB	32,71	32,27	33,4	33,2	32,07	33,10	33,34	35,66	33,45	34,57	35,27	37,66	35,00
PDRB Non Migas	30,38	29,3	30,67	30,75	1,4665	30,95	31,36	32,898	30,82	31,87	32,50	34,92	32,54

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi (%, yoy)	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Banda Aceh	3,72	1,31	1,90	3,46	1,25	1,87	2,07	2,41	3,95	6,31	7,85	6,00	5,32
Lhokseumawe	3,36	1,08	1,67	3,55	2,31	3,18	2,52	1,97	2,97	5,23	6,10	5,37	5,35
Meulaboh	5,49	2,13	2,30	4,23	1,62	2,86	1,48	2,08	3,56	6,22	8,02	6,56	6,27
Aceh	3,84	1,36	1,89	3,59	1,61	2,37	2,12	2,24	3,62	5,99	7,38	5,89	5,46

Kota	Kelompok (%, yoy)											
	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar RT	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Trans.	Infokom, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pend.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Total
Banda Aceh	7,27	1,26	2,26	3,25	7,34	11,74	-0,24	0,30	0,22	6,67	3,76	5,32
Lhokseumawe	5,43	5,79	2,51	4,05	0,29	19,24	-0,41	10,44	0,00	5,08	1,38	5,35
Meulaboh	6,56	1,83	3,17	4,38	9,42	17,56	-0,17	4,51	0,73	3,81	5,74	6,27
Aceh	6,56	2,84	2,43	3,66	4,81	13,98	-0,28	4,00	0,45	5,89	3,45	5,46

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Aset (Rp Triliun)	55,23	56,85	59,96	58,14	55,08	52,85	50,47	52,25	49,86	52,90	52,58	53,22	51,04
Pertumbuhan (yoy)%	4,74	-1,61	9,73	0,22	-0,27	-7,04	-15,83	-10,13	-9,48	0,09	4,19	1,85	2,35
Pertumbuhan (mtm)%	3,74	8,93	-0,46	1,57	-0,74	-5,47	0,61	3,52	-0,89	0,63	1,18	0,49	2,51
DPK (Rp Triliun)	39,02	40,23	43,39	41,72	38,46	38,96	39,90	39,50	38,47	41,11	40,14	40,09	38,98
Pertumbuhan (yoy)%	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,47	0,03	5,52	-0,50	0,33	1,34
Pertumbuhan (mtm)%	1,90	7,95	-0,60	-0,41	-1,61	-0,55	6,38	6,21	0,75	1,40	-0,12	-4,69	4,24
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,02	31,92	32,79	33,45	49,29	35,42
Pertumbuhan (yoy)%	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-10,12	-11,15	-15,30	-9,13	-3,03	0,87	9,71	10,99
Pertumbuhan (mtm)%	2,56	7,65	-1,30	1,95	-1,04	-3,30	0,71	-6,45	2,30	1,48	1,35	0,71	2,00
LDR %	96,42	93,61	86,00	88,30	91,33	86,81	83,09	78,99	82,97	79,42	83,33	122,95	90,87
NPL-gross %	1,44	1,87	2,50	2,26	1,84	2,25	2,86	1,94	2,02	1,92	1,78	3,40	1,82
NPL-Nominal (Rp Triliun)	0,54	0,70	0,93	0,83	0,65	0,76	0,95	0,60	0,64	0,63	0,60	1,67	0,64

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total (Rp Triliun)	39,02	40,23	43,39	41,72	38,46	38,96	39,90	39,50	38,46	41,10	40,13	40,09	38,98
Pertumbuhan (yoy)%	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,32	0,03	5,52	0,58	1,48	1,34
Giro (Rp Triliun)	7,80	8,25	11,20	9,23	7,30	7,97	7,99	9,05	10,61	9,25	7,28	6,316	6,90
Pertumbuhan (yoy)%	-10,32	-31,21	22,39	6,97	-6,33	-3,54	-28,71	-1,95	45,23	16,16	-8,71	-30,2	-34,94
Tabungan (Rp Triliun)	20,54	21,19	21,81	23,33	19,4	19,33	21,04	22,09	20,27	21,45	21,49	24,07	21,545
Pertumbuhan (yoy)%	8,20	6,38	7,92	-4,41	-5,54	-8,77	-3,51	-5,31	4,50	10,95	2,13	7,93	6,27
Deposito (Rp Triliun)	10,67	10,77	10,38	9,16	11,75	11,66	10,88	8,15	7,58	10,40	11,35	9,709	10,533
Pertumbuhan (yoy)%	-0,95	2,42	0,66	-0,57	10,03	8,14	4,74	11,02	-35,47	-10,76	4,40	19,04	38,94

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Kredit (Rp Triliun)	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,20	31,91	32,46	33,45	34,23	35,42
Pertumbuhan (yoy) %	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-10,21	-11,15	-15,30	-9,13	-3,46	0,87	9,71	10,99
Modal Kerja (Rp Triliun)	9,87	11,17	10,74	10,32	9,63	8,47	8,26	7,36	7,33	7,54	7,26	6,8	6,51
Pertumbuhan (yoy)%	-9,82	1,95	-8,69	-7,41	-2,48	-24,21	-23,06	-28,68	-23,78	-10,87	-12,08	-7,63	-11,27
Investasi (Rp Triliun)	4,17	3,81	3,67	3,52	2,63	2,61	2,50	2,59	2,74	2,94	3,29	3,62	4,18
Pertumbuhan (yoy)%	-6,66	-15,77	-20,28	-21,92	-36,90	-31,58	-31,77	-26,42	4,30	12,56	31,82	39,86	52,56
Konsumsi (Rp Triliun)	23,57	22,66	22,91	23,00	22,86	22,73	22,39	21,24	21,83	22,15	22,88	23,79	14,72
Pertumbuhan (yoy)%	12,50	7,27	6,31	1,70	-3,01	0,29	-2,26	-7,65	-4,51	-2,54	2,19	12,04	13,25

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Kredit (Rp Triliun)	43,88	43,00	43,54	41,64	40,62	42,37	44,86	46,46	47,21	47,57	47,09	49,29	48,38
Pertumbuhan (yoy) %	3,07	0,52	0,07	(5,32)	(7,43)	(1,48)	3,03	11,58	16,22	12,28	5,00	6,09	2,49
Modal Kerja (Rp Triliun)	12,16	13,20	13,73	12,13	11,77	11,49	14,38	13,70	14,03	13,63	12,24	12,89	12,07
Pertumbuhan (yoy)%	(2,05)	4,82	1,86	(3,30)	(3,24)	(12,98)	4,73	12,94	19,23	18,67	-14,48	-5,92	-13,98
Investasi (Rp Triliun)	7,07	6,40	6,27	5,86	5,17	6,86	5,93	8,89	8,96	9,38	9,59	10,24	9,75
Pertumbuhan (yoy)%	(9,00)	(16,36)	(13,10)	(19,87)	(26,89)	7,08	(5,46)	51,64	73,56	36,89	61,89	15,22	8,8
Konsumsi (Rp Triliun)	24,65	23,40	23,54	23,64	23,68	24,02	24,55	23,86	12,20	24,55	25,25	26,15	26,55
Pertumbuhan (yoy)%	10,10	3,85	3,19	(1,95)	(3,92)	2,67	4,29	0,95	2,22	2,20	2,88	9,64	9,69

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian	3,29	3,6	3,47	2,63	1,78	1,99	1,81	1,29	1,27	1,23	1,39	1,57	1,74
Pertambangan	0,04	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,41	0,04	0,04
Industri Pengolahan	1,68	1,77	1,45	2,29	1,94	1,02	0,69	0,81	0,86	0,89	0,05	1,00	1,06
Listrik Gas dan Air	0,11	0,1	0,1	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07	0,89	0,06	0,06
Konstruksi	0,88	0,94	0,98	0,98	0,82	0,68	0,72	0,56	0,47	0,57	0,06	0,63	0,51
Perdagangan	5,78	5,83	5,64	5,19	4,97	4,9	5,04	4,39	4,43	5,02	0,65	5,06	5,26
Pengangkutan	0,22	0,33	0,21	0,2	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	5,19	0,17	0,21
Jasa Dunia Usaha	0,36	0,37	0,3	0,33	0,32	0,15	0,14	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,20
Jasa Kemasyarakatan	0,6	0,63	0,63	0,58	0,56	0,56	0,4	0,77	0,74	0,68	0,54	0,52	0,54
Lainnya	24,66	24,04	24,47	24,49	24,41	24,21	24,06	21,24	21,83	22,16	22,88	23,80	24,72
Total	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,2	31,92	32,65	33,45	34,23	35,42

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2020				2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian	3,74	3,83	3,82	3,66	2,89	2,55	3,53	2,47	2,41	2,41	2,59	2,88	2,97
Perikanan	0,19	0,33	0,36	0,34	0,40	0,40	0,39	0,76	0,69	0,42	0,42	0,31	0,30
Pertambangan	1,35	1,16	1,24	0,98	1,08	1,06	0,87	3,91	4,78	4,94	4,72	5,52	3,59
Ind. Pengolahan	3,27	3,28	3,76	2,87	2,62	2,55	2,34	1,47	1,58	2,44	1,73	2,65	3,43
Listrik, Gas & Air	0,52	0,62	0,63	0,60	0,60	2,63	0,78	0,49	0,37	0,36	0,35	0,35	0,33
Konstruksi	1,51	1,53	1,60	1,55	1,38	1,38	1,43	1,02	0,86	0,88	0,93	0,89	0,78
Perdagangan	6,34	6,30	6,02	5,54	5,53	5,45	6,70	6,31	6,18	6,70	6,83	6,64	6,67
Hotel & Restoran	0,39	0,47	0,48	0,45	0,48	0,46	0,72	0,65	0,63	0,63	0,63	0,43	0,46
Transportasi, Gudang & Kom.	0,49	0,45	0,44	0,40	0,38	0,33	0,98	0,92	1,00	0,41	0,40	0,34	0,30
Perantara Keuangan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,01	0,17	0,01	0,01	0,01
Perumahan, usaha sewa & Js. Perusahaan	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,34	1,22	3,31	3,35	2,39	2,33	2,22	2,10
Adm Pemerintahan,	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Pendidikan	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0,19	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,21	0,22	0,22	0,24	0,25
Jasa Kemasyarakatan	0,65	0,66	0,66	0,60	0,59	0,59	0,47	0,81	0,79	0,72	0,57	0,55	0,56
Jasa Perseorangan	0,07	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,22	0,15	0,12	0,09	0,08	0,06	0,06
Badan Internasional	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya	0,03	0,20	0,26	0,27	0,28	0,27	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha	24,65	23,40	23,54	23,64	23,68	24,02	24,55	23,86	24,21	24,70	25,25	26,15	26,55
Total	43,88	43,00	43,54	41,64	40,62	42,37	44,86	46,46	47,21	47,51	47,10	49,29	48,38

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah

Pada triwulan I 2023 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,60% (yoy).

Pada triwulan I 2023 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,60% (yoy). Pada sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor Luar Negeri. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Perkembangan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pada triwulan I 2023 secara umum masih mengalami peningkatan, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBN.

Kinerja keuangan daerah pada triwulan I 2023 secara umum mengalami peningkatan, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBN. Namun demikian, realisasi anggaran APBD mengalami penurunan pada pendapatan dan belanja baik secara nominal maupun persentase. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga triwulan I 2023 mencapai 17,30% dari total pagu belanja (Rp47,13 triliun) atau sebesar Rp8,15 triliun.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,46% (yoy)

Pada triwulan I 2023, laju Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya,

atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,89% (yoy).

seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan di Provinsi Aceh. Kendati demikian, terdapat potensi kenaikan biaya yang dapat mendorong kenaikan harga, salah satunya bersumber dari peningkatan ekspektasi pedagang seiring potensi naiknya harga beli di tengah peningkatan UMP Aceh pada awal tahun 2023.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tetap terjaga, yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang diikuti dengan peningkatan *Financing to Deposit* (FDR) *Ratio* menjadi 89,90% di periode laporan. Pembiayaan UMKM juga meningkat, namun perlu diwaspadai peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) meskipun masih dalam batas aman.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan I 2023, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh.

Selama triwulan I 2023, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana terdapat penurunan *outflow* dan peningkatan *inflow* pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistem pembayaran nontunai baik nilai besar maupun ritel juga mengalami penurunan begitu juga dengan penggunaan kartu ATM/debit. Di sisi lain, penggunaan kartu kredit tumbuh positif pada triwulan laporan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, meskipun kemiskinan menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun berbanding terbalik pada aspek kemiskinan yang menunjukkan peningkatan persentase. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada pada urutan keempat, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya, meskipun dengan kecenderungan lebih rendah dibanding tahun 2022.

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 3,75%-4,25%(yoy) atau berpotensi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (4,21%, yoy). Kondisi tersebut diperkirakan oleh normalisasi ekspor luar negeri yang sudah tumbuh tinggi pada periode-periode sebelumnya. Laju inflasi tahun 2023 diperkirakan berada di dalam sasaran inflasi nasional sebesar $3\% \pm 1\%$, dengan perkiraan perlambatan inflasi pada bahan-bahan makanan.



BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Pada triwulan I 2023 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,60% (yoy). Pada sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor Luar Negeri. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

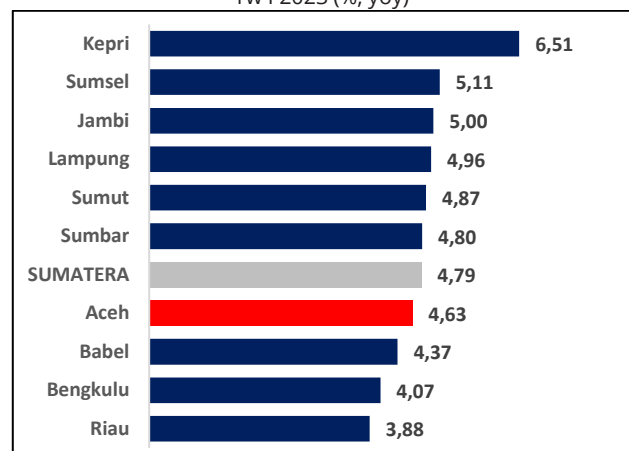
1.1. Gambaran umum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2023 melanjutkan kinerja yang positif dari triwulan sebelumnya.

Perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,03% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy).

Perekonomian Sumatera pada triwulan I 2023 juga tumbuh positif sebesar 4,79% (yoy). Namun berbeda dengan nasional, realisasi tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 4,98% (yoy). Berdasarkan wilayah regional Sumatera (Grafik 1.1), semua wilayah mengalami pertumbuhan yang positif diatas 4,00% (yoy) kecuali Provinsi Riau. Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,51%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,11% dan Provinsi Jambi sebesar 5,00%.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera
Tw I 2023 (% , yoy)



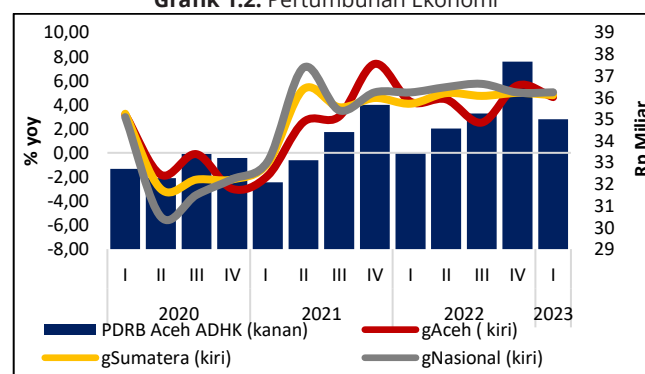
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Jika dilihat secara spasial, Aceh tercatat memiliki pangsa sebesar 5,57% terhadap perekonomian Sumatera. Sumbangan tersebut relatif tidak mengalami perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (1,98%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,28%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,20%), Riau (21,38%), dan Sumatera Selatan (13,79%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari

ketiga provinsi tersebut mencapai lebih dari 50% dari total ekonomi Sumatera.

Ekonomi Aceh triwulan I 2023 tercatat tumbuh sebesar 4,63% (yoy) (Grafik 1.2), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,60% (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian Aceh pada triwulan laporan utamanya didorong oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor Luar Negeri. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi

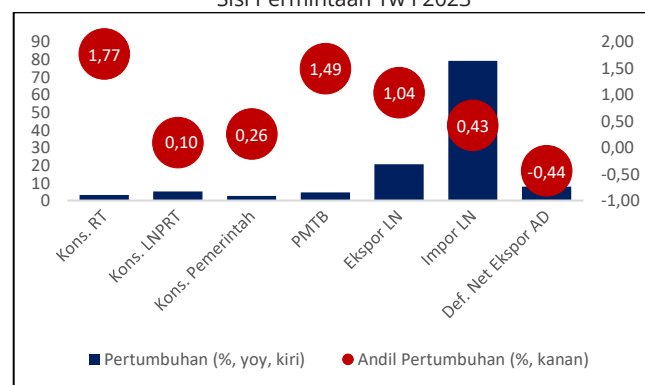


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2023 utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor luar negeri. Konsumsi rumah tangga menjadi komponen yang memberikan andil akselerasi tertinggi sebesar (1,77%) pada triwulan laporan yang diikuti oleh PMTB (1,49%) dan ekspor luar negeri (1,04%) (Grafik 1.3).

Grafik 1.3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Tw I 2023



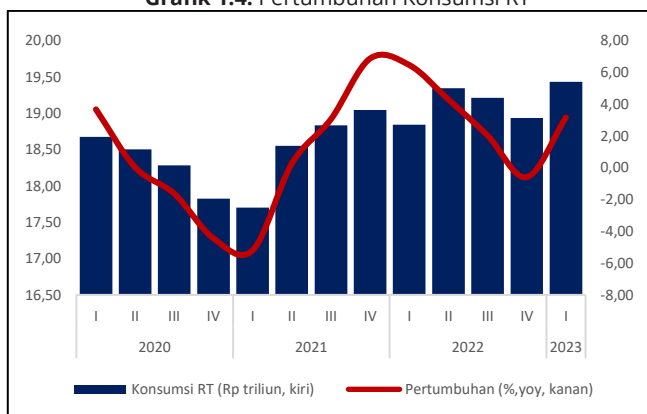
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan I 2023, konsumsi rumah tangga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,14% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang terdeselerasi sebesar 0,60% (yoy) (Grafik 1.4). Pertumbuhan tersebut memberikan andil sebesar 1,77% untuk konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan didorong oleh kebijakan pembatasan sosial (PPKM) yang telah dicabut pada awal tahun 2023, serta pandemi COVID-19 yang mulai terkendali.

Sejalan dengan konsumsi RT, penyaluran pembiayaan konsumsi juga mengalami peningkatan pada periode laporan. Secara nominal, pembiayaan kepada rumah tangga tercatat sebesar Rp26,3 triliun, atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu (Grafik 1.5). Peningkatan kinerja pembiayaan rumah tangga terjadi pada seluruh jenis pembiayaan, terutama pembiayaan dengan penggunaan yang bersifat multiguna. Namun demikian, pertumbuhan pembiayaan konsumsi tercatat mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 9,58% (yoy) menjadi sebesar 8,79% (yoy) pada triwulan laporan.

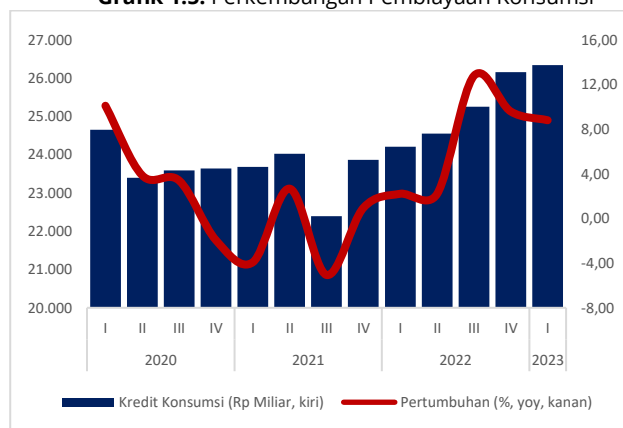
Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

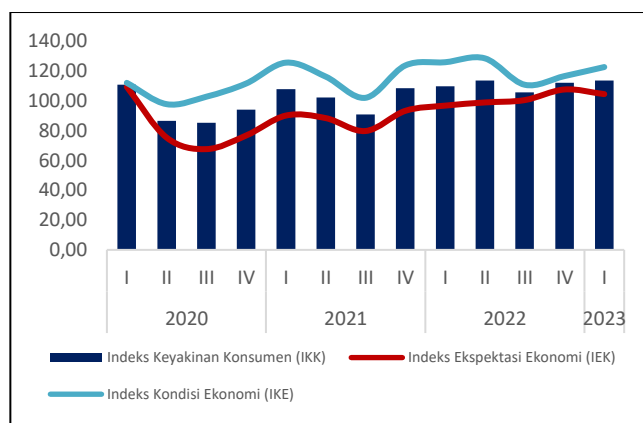
Konsumsi rumah tangga terindikasi masih kuat, sejalan dengan optimisme masyarakat pada triwulan I 2023 yang masih terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 113,67, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 112,20 (Grafik 1.6).

Grafik 1.5. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi



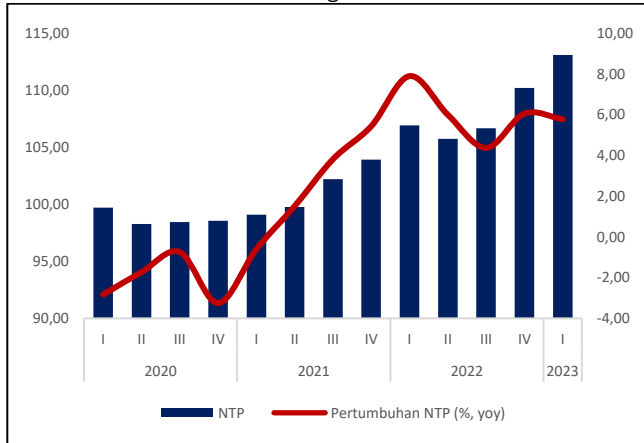
Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Grafik 1.6. Perkembangan Hasil Survei Konsumen



Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2023 juga masih terjaga. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 110,18, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 103,90 (Grafik 1.7). NTP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi barang dan jasa yang dikonsumsi. Artinya pada triwulan laporan, daya tukar petani masih cukup baik, di mana indeks yang diterima lebih besar daripada indeks yang dibayarkan.

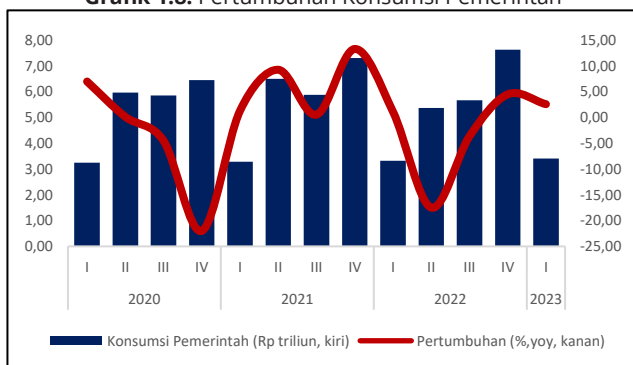
Grafik 1.7. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

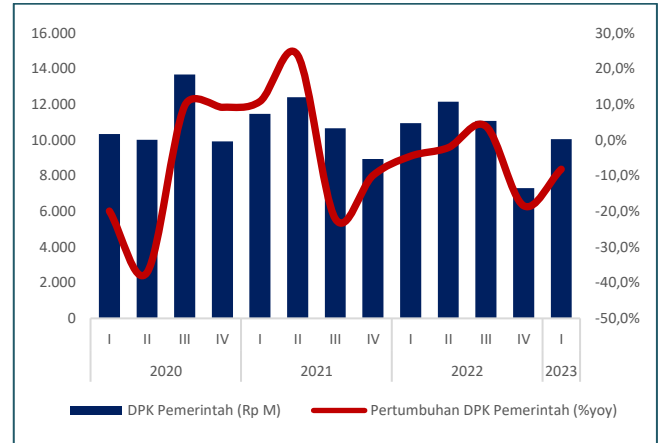
Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh sebesar 2,51% (yoy), mengalami deselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,42% (yoy) (Grafik 1.8). Perlambatan konsumsi pemerintah pada Triwulan I 2023 dibanding triwulan sebelumnya disebabkan oleh tertahannya belanja pemerintah di awal tahun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan I 2023 sebesar Rp3,56 triliun (9,16% dari total pagu), mengalami penurunan sebesar 39,93% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang turun sebesar 79,79% (yoy) dan realisasi belanja transfer yang turun sebesar 52,95% (yoy). Realisasi belanja anggaran konsolidasi sampai dengan triwulan I 2023 sebesar Rp6,38 triliun, atau tumbuh sebesar 6,19% (yoy) dibanding triwulan I 2022.

Grafik 1.8. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.9. Pertumbuhan DPK Pemerintah

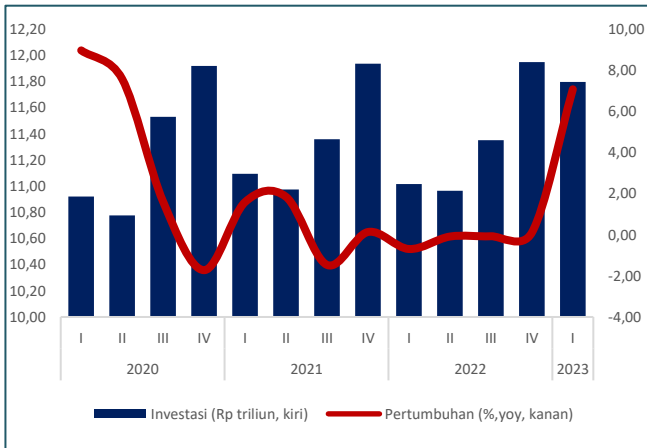
Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Realisasi belanja pemerintah secara nominal lebih rendah pada triwulan laporan sejalan dengan dana simpanan pemerintah daerah di perbankan yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2023, Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah tercatat sebesar Rp10,05 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp7,29 triliun (Grafik 1.9).

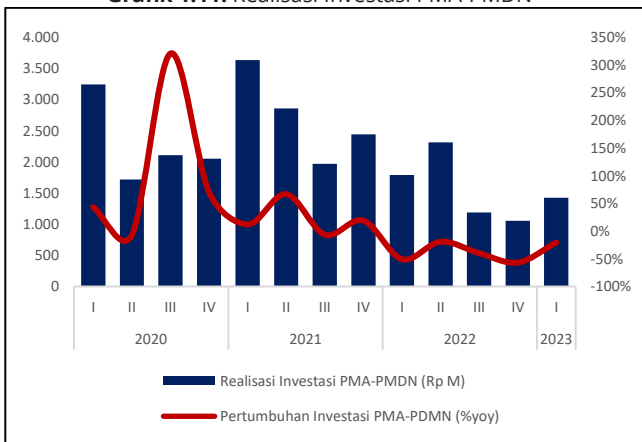
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi

Pada triwulan I 2023, PMTB/investasi di wilayah Aceh meningkat sebesar 7,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 0,93% (%yoy) (Grafik 1.10).

Ekspansi tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Aceh, investasi pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp1.421,50 Miliar, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1.055,22 Miliar. Kendati demikian, secara tahunan, investasi tercatat mengalami perlambatan sebesar -20,46% (yoy), meskipun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 56,76% (yoy). (Grafik 1.11).

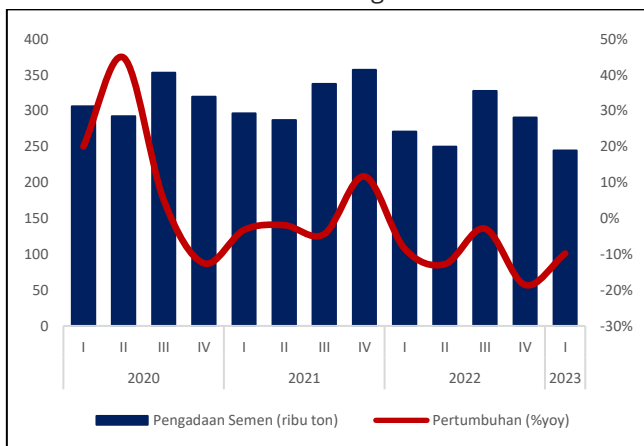
Grafik 1.10. Pertumbuhan PMTB/Investasi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.11. Realisasi Investasi PMA-PMDN

Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), diolah

Sementara itu, investasi bangunan yang diindikasikan dari pengadaan semen masih mengalami kontraksi pada triwulan I 2023. Pengadaan semen pada triwulan I 2023 terkontraksi sebesar 9,83% (yoy), atau mengalami perbaikan dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 18,56% (yoy) (Grafik 1.12).

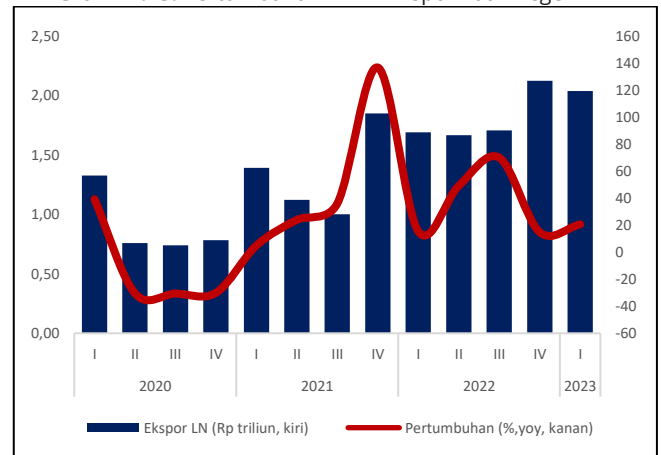
Grafik 1.12. Realisasi Pengadaan Semen

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

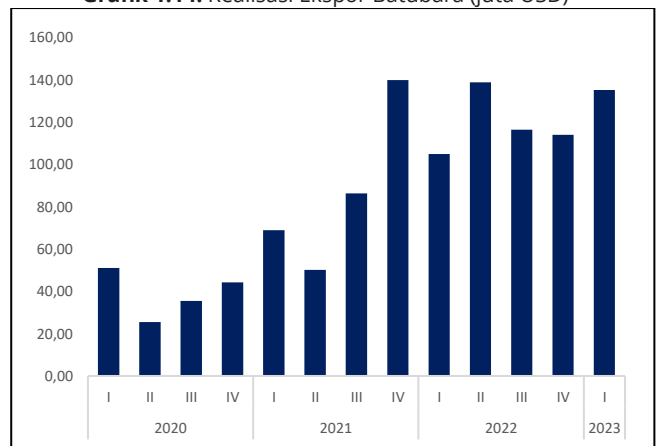
Ekspor Luar Negeri

Ekspor luar negeri Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh sebesar 20,55% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,79% (yoy) (Grafik 1.13). Dengan laju tersebut, ekspor luar negeri Aceh memberikan andil positif sebesar 1,04% terhadap kinerja ekonomi Aceh secara keseluruhan pada triwulan I 2023.

Kinerja komponen ekspor luar negeri yang tetap kuat tersebut didukung oleh realisasi ekspor barang asal Provinsi Aceh yang meningkat pada awal tahun 2023. Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 secara nominal tercatat sebesar 198,84 juta USD. Keseluruhan ekspor pada triwulan laporan semuanya berupa komoditas nonmigas terutama dari kelompok bahan bakar mineral; kopi, teh, rempah-rempah; dan buah-buahan.

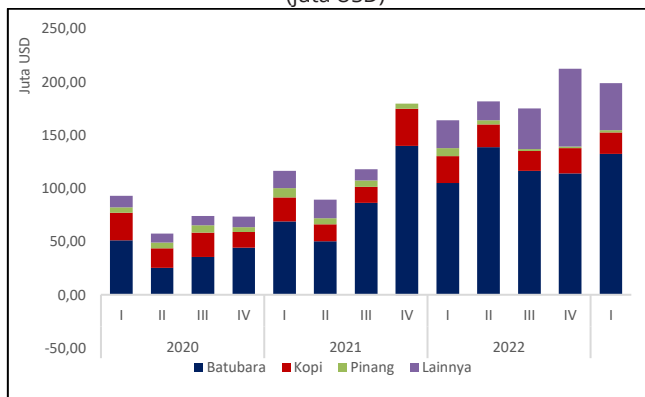
Grafik 1.13. Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.14. Realisasi Ekspor Batubara (juta USD)

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.15. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh (juta USD)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Secara umum, kinerja ekspor masih ditopang oleh komoditas batubara dan kopi, yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Aceh. Kedua komoditas tersebut memiliki pangsa sebesar 66,61% dan 10,06% dari total ekspor Provinsi Aceh. Ekspor komoditas batubara pada triwulan I 2023 mencapai 132,45 juta USD, tercatat tumbuh sebesar 26,27% (yoy) (Grafik 1.14). Realisasi ekspor batubara tersebut masih berada di posisi yang tinggi, yang disebabkan oleh peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor akan kebutuhan energi. Komoditas ekspor kedua terbesar adalah kopi, di mana pada triwulan laporan ekspor komoditas tersebut mencapai 23,65 juta USD meskipun secara tahunan terkontraksi 21,54% (yoy).

Kelompok ekspor nonmigas dengan pangsa terbesar adalah bahan bakar mineral terutama batubara sebesar 63,49%, kelompok kopi sebesar 9,59%, dan kelompok buah-buahan (pinang) sebesar 1,08%.

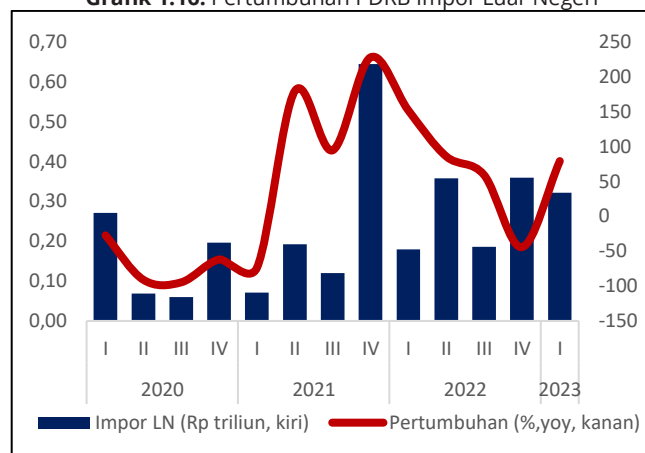
Impor Luar Negeri

Komponen impor luar negeri pada triwulan I 2023 tercatat mengalami ekspansi cukup tinggi sebesar 79,18% (yoy), berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 44,24% (yoy) (Grafik 1.16).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, nilai impor barang ke Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 sebesar 17,56 juta USD, tumbuh apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang

sebesar 14,90 juta USD (Grafik 1.17). Nilai impor barang mengalami pertumbuhan sebesar 17,56% pada triwulan I. Secara umum, kinerja impor luar negeri masih didominasi oleh kelompok peralatan mesin dan bahan kimia. Secara lebih spesifik, barang impor utamanya merupakan peralatan mesin khusus *civil engineering and contractor plant and equipment and parts*.

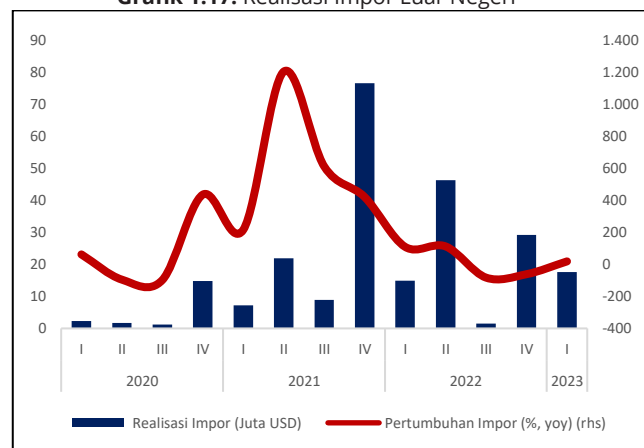
Grafik 1.16. Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan I 2023, impor luar negeri tumbuh sebesar 17,88% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh lebih tinggi sebesar 108,50% (yoy). Secara umum, pertumbuhan impor didorong oleh peningkatan konsumsi swasta yang meningkat pada tahun 2023. Negara asal impor pada triwulan I 2023 didominasi oleh Rusia sebesar 59,18%, diikuti oleh Thailand dan Vietnam dengan pangsa masing-masing sebesar 37,46% dan 16,46%. Lebih lanjut, barang-barang yang diimpor utamanya berupa pupuk dan beras.

Grafik 1.17. Realisasi Impor Luar Negeri



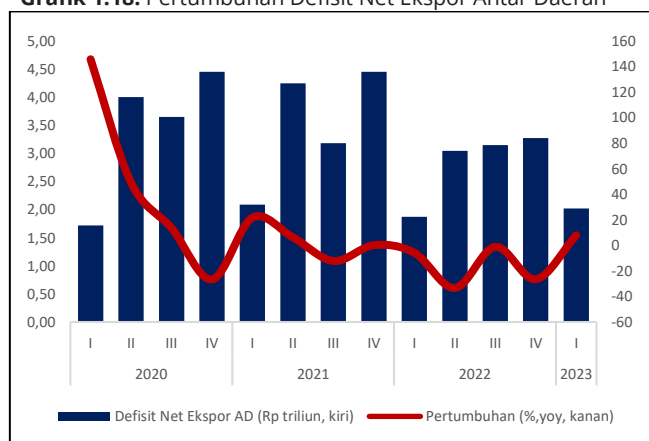
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Net Ekspor Antar Daerah

Defisit neraca ekspor antar daerah Provinsi Aceh terekspansi pada Triwulan I 2023 sebesar 7,82% (yoy), berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 26,54% (yoy). Pada triwulan I 2023, defisit neraca ekspor antar daerah tercatat Rp2,02 triliun (ADHK), berkurang dibandingkan triwulan IV 2022 yang sebesar Rp3,26 triliun (ADHK), namun meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,87 triliun (Grafik 1.18).

Defisit antar daerah mengindikasikan arus barang masuk lebih besar daripada barang yang keluar. Berdasarkan data perdagangan antar wilayah dari Badan Pusat Statistik, penjualan antar wilayah paling besar di Provinsi Aceh dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang minyak mentah kelapa sawit dengan nilai penjualan sebesar Rp764 miliar. Di sisi lain, komoditas pembelian dari daerah lain didominasi oleh mobil, sepeda motor, minyak bahan bakar, kendaraan bermotor dengan tujuan khusus, dan alat transportasi umum alat transportasi umum jenis kendaraan bermotor untuk penumpang. Lima kelompok komoditas ini mencakup 41,93% dari total pembelian antar wilayah di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh melakukan pembelian terbesar dari Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

Grafik 1.18. Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah

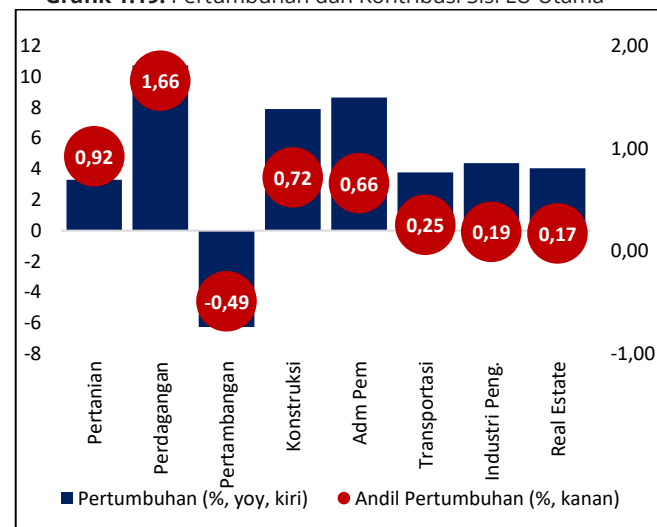


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Perekonomian Aceh bersumber dari tiga lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (pangsa 27,60%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 16,39%), serta LU Konstruksi (pangsa 9,38%). Kinerja ketiga LU utama Aceh menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Secara kumulatif, ketiga Lapangan Usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 53,37% terhadap struktur PDRB Provinsi Aceh. Di sisi lain, perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh ke level yang lebih tinggi. Adapun pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran (andil 1,66%, yoy), LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (andil 0,92%, yoy), dan LU Konstruksi (andil 0,72%, yoy), dan (Grafik 1.19).

Grafik 1.19. Pertumbuhan dan Kontribusi Sisi LU Utama



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

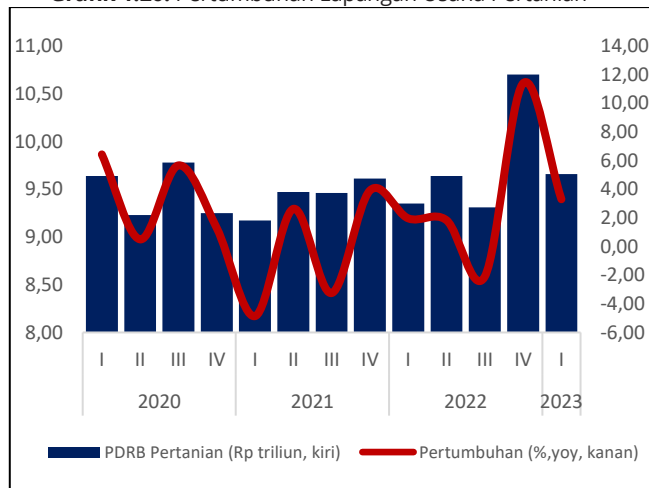
Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan I 2023 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,30% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% (yoy) (Grafik 1.20).

Kinerja yang melambat tersebut juga sejalan

dengan produksi padi pada hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS yang menyatakan terjadi penurunan produksi padi pada triwulan I 2023 akibat pergeseran puncak panen. Pada triwulan I, produksi padi tercatat sebesar 311,49 ribu GKG/ton, lebih rendah dibandingkan triwulan IV yang sebesar 479,70 ribu GKG/ton (Grafik 1.21).

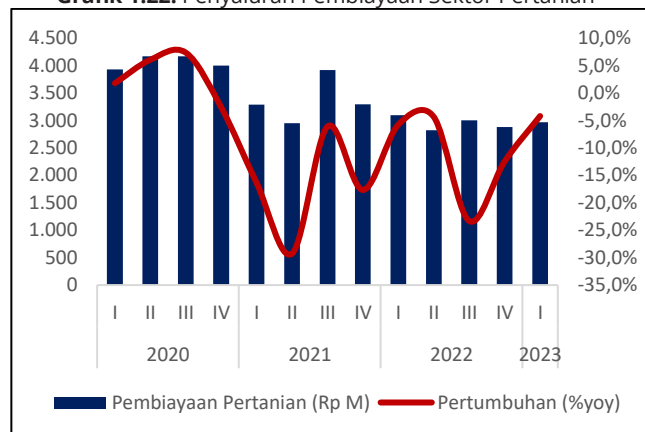
Grafik 1.20. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

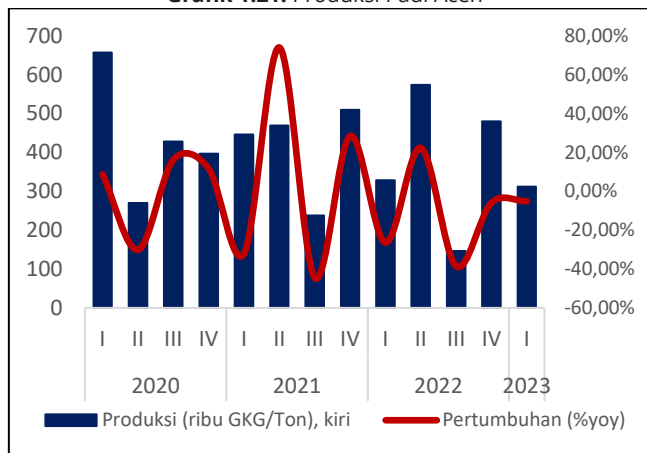
Hal ini juga didukung oleh harga minyak kelapa sawit yang cenderung sama di dua periode tersebut. Pasokan yang dimiliki pelaku usaha relatif sama, seiring dengan belum adanya penambahan luasan lahan dari total HGU yang dimiliki. Meskipun demikian, pelaksanaan program *replanting* yang telah berjalan sejak tahun 2017 diharapkan dapat meningkat pada periode yang akan datang.

Grafik 1.22. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertanian



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.21. Produksi Padi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

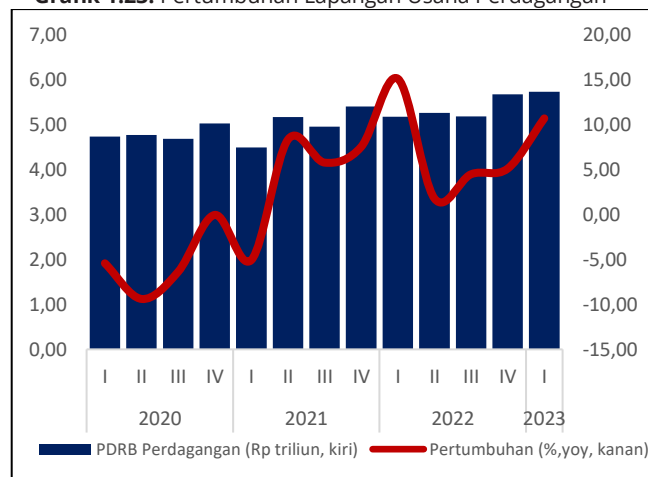
Selanjutnya, dari sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Pertanian mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp2,96 triliun atau terkontraksi sebesar -4,19% (yoy) (Grafik 1.22).

Selanjutnya pada sektor perkebunan, hasil liaison kepada pelaku usaha yang bergerak pada sektor tersebut menyatakan mengalami kinerja yang sama dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 10,72% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,13% (yoy) (Grafik 1.23).

Grafik 1.23. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pertumbuhan LU perdagangan masih ditopang oleh lancarnya mobilitas masyarakat terutama di sektor ritel dan pusat perbelanjaan. Naiknya

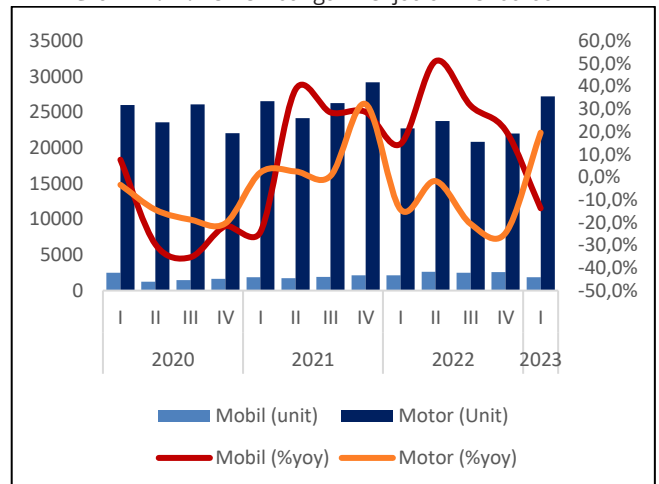
mobilitas masyarakat sejalan dengan tren penurunan COVID-19 di Aceh dan telah dicabutnya peraturan PPKM oleh pemerintah yang mendorong pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, pada triwulan I 2023 terdapat momentum HBKN Isra Mi'raj serta di akhir triwulan memasuki bulan Ramadhan. Pada HBKN dan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, telah menjadi budaya di Provinsi Aceh untuk melakukan Kenduri. Umumnya, Kenduri berlangsung dengan waktu cukup lama sehingga meningkatkan permintaan akan barang dan jasa.

Lebih lanjut, LU Perdagangan dari sektor penjualan kendaraan roda 4 mengalami perlambatan pada periode laporan. Total penjualan kendaraan mobil di Provinsi Aceh selama triwulan I 2023 sebanyak 1.868 unit kendaraan atau terkontraksi sebesar 13,72% (yoy), sedangkan penjualan motor sebanyak 27.231 unit kendaraan atau tumbuh sebesar 19,62% (yoy). (Grafik 1.24).

Selanjutnya dari sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Perdagangan kembali mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp6,67 triliun atau tumbuh sebesar 7,99% (yoy) (Grafik 1.25).

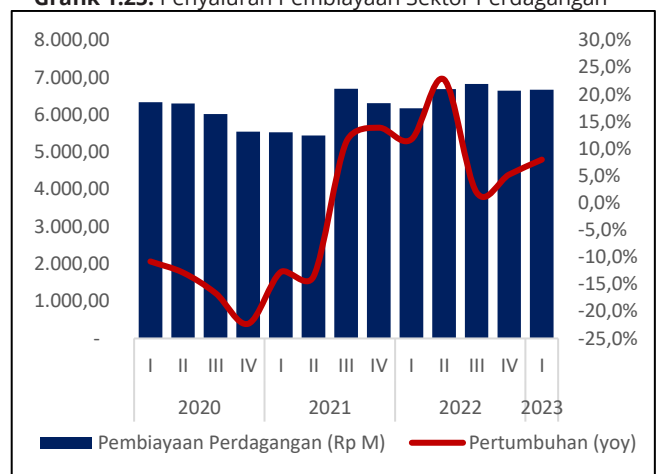
Selanjutnya dari sisi pelaku usaha yang bergerak di sektor perdagangan besar *fashion*, peningkatan kinerja usaha terkonfirmasi melalui hasil liaison. Kontak menyatakan penjualan pada triwulan I 2023 secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 18% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh mulai pulihnya perekonomian secara global pasca pandemi Covid-19.

Grafik 1.24. Perkembangan Penjualan Kendaraan



Sumber: BPKA, diolah

Grafik 1.25. Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan

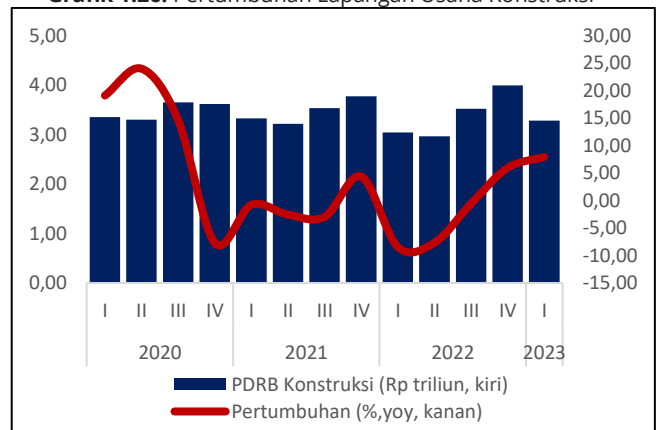


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Konstruksi

Secara umum pada triwulan I 2023, kinerja lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 7,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,91% (yoy) (Grafik 1.26).

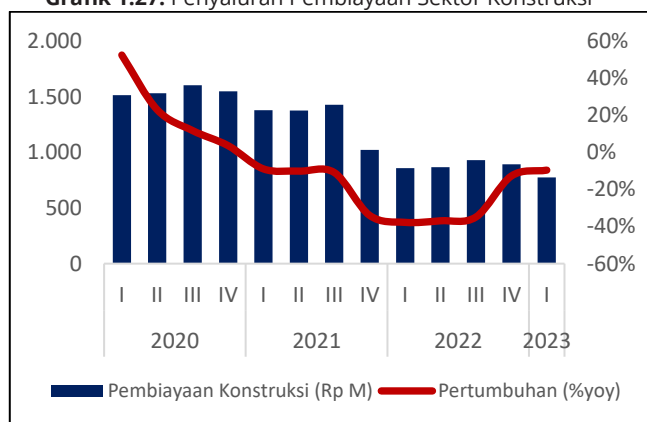
Grafik 1.26. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kinerja yang membaik tersebut sejalan dengan penyaluran pembiayaan sektoral yang terus menunjukkan tren perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp775,84 miliar serta penurunan kontraksi menjadi sebesar 9,58% (yoy) (Grafik 1.27). Lebih lanjut, kinerja yang lebih baik juga didukung oleh realisasi proyek pemerintah. Sampai dengan triwulan I 2023, belanja modal APBN tumbuh sebesar 102,73% secara tahunan, dengan realisasi mencapai 10,61% dari Pagu Anggaran.

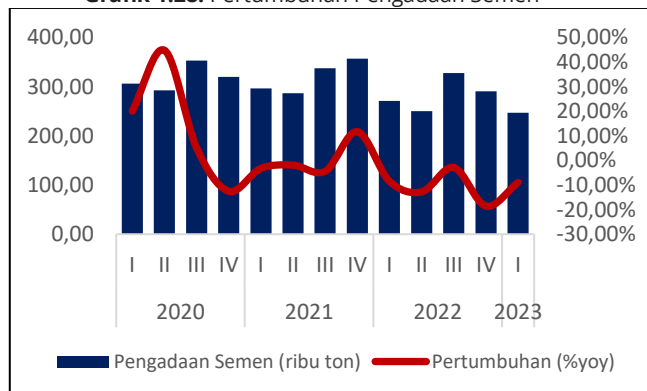
Grafik 1.27. Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan LU Konstruksi juga didukung oleh data realisasi pengadaan semen di Aceh. Pengadaan semen pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar 8,98% (yoy), atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 18,58% (yoy). Meskipun demikian, nominal pengadaan semen hanya mencapai 246,65 ribu ton, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.28).

Grafik 1.28. Pertumbuhan Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

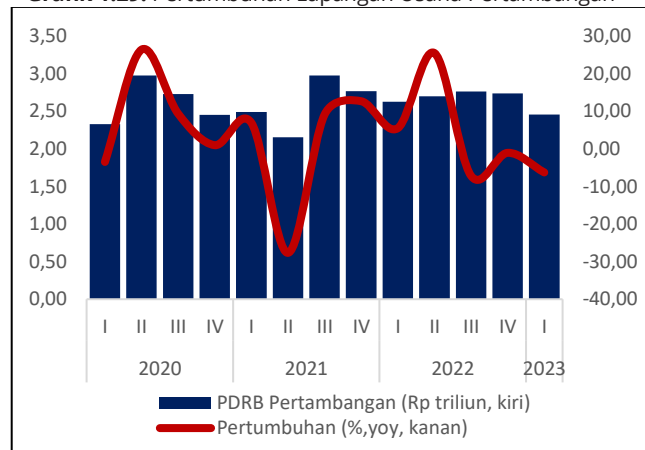
Meskipun demikian, beberapa proses konstruksi telah menggunakan teknologi lebih baru dengan optimalisasi struktur besi, sehingga penggunaan semen lebih minim.

Lapangan Usaha Pertambangan

Pada triwulan laporan, kinerja lapangan usaha pertambangan tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,26% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya mengalami kontraksi sebesar 1,03% (yoy) (Grafik 1.29).

Meskipun demikian, pertumbuhan nilai ekspor batubara pada triwulan laporan tercatat sebesar 26,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -18,46% (yoy). Produksi batu bara secara tidak langsung tercermin dari nilai ekspor ke luar negeri. (Grafik 1.30)

Grafik 1.29. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

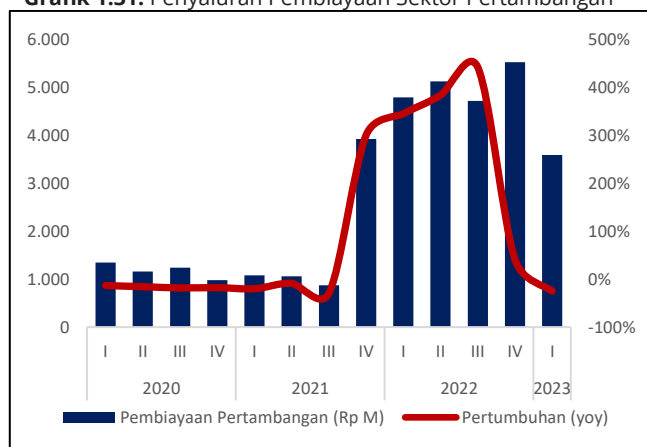
Penurunan kinerja di Pertambangan secara umum sejalan dengan realisasi penyaluran pembiayaan LU Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, pembiayaan hanya mencapai Rp3,58 triliun atau tumbuh negatif sebesar 24,99% (yoy) (Grafik 1.31).

Grafik 1.30. Perkembangan Ekspor Batu Bara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.31. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Optimalisasi Potensi Pariwisata Aceh untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang menjadikannya sebagai tujuan wisata yang potensial. Misalnya, pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser yang menakjubkan dan kekayaan bawah laut Pulau Weh Sabang yang menawan telah menarik pengunjung lokal dan mancanegara.

Tidak hanya wisata alam, Aceh juga kaya akan budaya dan sejarah yang unik dan beragam. Kota Banda Aceh, ibu kota provinsi ini, adalah tempat berdirinya Masjid Raya Baiturrahman yang megah, yang menjadi salah satu simbol keagungan Islam di Aceh. Selain itu, pemukiman tradisional di Kampung Aceh juga memberikan pengalaman yang berharga bagi wisatawan yang ingin melihat kehidupan masyarakat lokal yang kaya akan nilai-nilai adat dan tradisi. Peninggalan sejarah masa lalu seperti Makam Sultan Iskandar Muda dan Museum Tsunami juga menjadi daya tarik tersendiri. Melalui pemanfaatan potensi budaya dan sejarah ini, pariwisata Aceh dapat menjadi sarana untuk mempromosikan identitas dan kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh provinsi ini.

Untuk mewujudkan potensi pariwisata Aceh, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan pariwisata, memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, dan mempromosikan Aceh sebagai tujuan wisata yang aman dan menarik. Selain itu, pelaku usaha lokal perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi peningkatan jumlah wisatawan dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Pendidikan dan pelatihan juga penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menyambut wisatawan dengan ramah dan profesional.

Sabang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di Provinsi Aceh. Dalam upaya meningkatkan kualitas wisata di Sabang, perlu untuk menganalisa dengan menggunakan 3A2P. Pengembangan ke depan perlu untuk memperhatikan aspek-aspek 3A2P agar dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia.

- **Akses**

Sabang memiliki akses yang mudah dijangkau melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Setelah tiba di Banda Aceh, wisatawan dapat menggunakan kapal *ferry* RORO dan kapal cepat yang tersedia untuk menyeberang ke Pulau Weh, tujuan utama pariwisata di Sabang. Transportasi darat juga tersedia untuk menghubungkan wisatawan dari bandara ke pelabuhan *ferry*.

- **Atraksi**

Sabang menawarkan atraksi alam yang menakjubkan, terutama di bawah permukaan laut. Pulau Weh memiliki kekayaan bawah laut yang luar biasa, dengan terumbu karang yang indah, ikan-ikan berwarna-warni, dan beragam spesies laut lainnya. Aktivitas seperti menyelam, *snorkeling*, dan berenang dengan lumba-lumba menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Selain itu, Sabang juga memiliki pantai-pantai yang indah, seperti Pantai Sumur Tiga dan Pantai Gapang.

- **Amenitas**

Untuk mendukung pariwisata di Sabang, berbagai fasilitas telah disediakan. Terdapat beragam penginapan mulai dari hotel, penginapan pantai, hingga penginapan sederhana termasuk *homestay*. Restoran dan warung makan di sekitar Pulau Weh menawarkan hidangan lokal, makanan laut segar, dan masakan internasional. Selain itu, terdapat juga pusat penyewaan alat selam dan *snorkeling* serta toko-toko yang menjual perlengkapan dan oleh-oleh.

- **Promosi**

Untuk meningkatkan kesadaran dan popularitas pariwisata di Sabang, upaya promosi yang intens telah dilakukan. Pemerintah Aceh dan pihak swasta bekerja sama untuk memasarkan Sabang melalui kampanye promosi di berbagai media, seperti brosur, video promosi, situs web, dan media sosial. Selain itu, partisipasi dalam pameran pariwisata dan kerjasama dengan agen perjalanan juga dilakukan untuk menarik minat wisatawan.

- **Pelaku Pariwisata**

Pelaku pariwisata di Sabang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta. Pemerintah setempat berperan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, pengawasan keberlanjutan lingkungan, dan regulasi yang mendukung pertumbuhan pariwisata. Komunitas lokal terlibat dalam memberikan pengalaman dan layanan kepada wisatawan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pada hakikatnya, pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam mengangkat perekonomian Aceh. Potensi alam, budaya, dan sejarah yang dimiliki oleh Aceh menawarkan peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dengan pengelolaan yang baik, promosi yang efektif, dan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, pariwisata Aceh dapat menjadi sumber daya utama dalam mencapai perekonomian yang kuat dan berkelanjutan.

--000--



BAB II

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja keuangan daerah pada triwulan I 2023 secara umum mengalami peningkatan, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBN. Namun demikian, realisasi pendapatan dan belanja APBD mengalami penurunan baik secara nominal maupun persentase.

2.1. Gambaran umum

Realisasi Belanja dan Pendapatan Pemerintah di wilayah Provinsi Aceh sampai dengan triwulan I 2023 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi agregat Belanja Pemerintah di Provinsi Aceh mengalami penurunan pada triwulan I 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, total belanja mencapai Rp6,38 triliun atau setara dengan 11,34% dari pagu agregat belanja tahun 2023. Penurunan utamanya disebabkan oleh realisasi APBA dengan nilai Rp3,56 triliun atau sebesar 9,16% (lebih kecil dibanding triwulan I 2022 dengan selisih sebesar Rp2,36 triliun).

Di sisi lain, realisasi agregat Pendapatan Pemerintah (APBN + APBD) mengalami penurunan, baik secara persentase maupun nominal realisasi. Secara persentase, realisasi pendapatan pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 14,01% dari pagu agregat pendapatan 2023, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 16,71% dari pagu pendapatan 2022. Secara nominal realisasi pendapatan, terdapat penurunan hingga Rp3,02 triliun pada periode laporan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat merupakan jenis pendapatan dengan *share* terbesar dari total realisasi pendapatan APBD di lingkup Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 83,52 persen. Persentase penyaluran Pendapatan Transfer sampai dengan triwulan I 2023 tercatat sebesar 13% dari pagu tahun 2023.

2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

Nilai pagu Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh pada tahun 2023 berada pada nilai Rp38,91 triliun, terkontraksi sebesar 39,93% (yoy).

Secara umum, pagu APBD baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada pagu belanja mengalami penurunan pada tahun ini. Namun, terjadi peningkatan pagu pada Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD (APBA+APBK) Triwulan I 2023

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TW-I 2023	
	
Belanja Barang & Jasa	7,41%
Belanja Modal	2,24%
Belanja Tidak terduga	8,06%
Belanja Pegawai	15,26%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah melalui alokasi APBA dan APBK hingga triwulan I 2023 mencapai 9,99% dari total pagu belanja (Rp30,87 triliun) atau sebesar Rp3,08 triliun, realisasi terkontraksi 37,21% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian Belanja Pemerintah Daerah ini lebih rendah dibandingkan realisasi belanja di triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 13,88% dari pagu belanja 2022 dengan nominal realisasi belanja sebesar Rp 4,91 triliun. Hampir seluruh komponen Belanja Pemerintah pada triwulan I 2023 mengalami penurunan realisasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah pada periode laporan umumnya didukung oleh Belanja Operasi, dengan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai sebesar Rp2,10 triliun atau sebesar 15,26% terhadap pagu, sementara realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp751 miliar atau sebesar 7,41% terhadap pagu. Secara tahunan, Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar 30,40% (yoy), Belanja Barang dan Jasa juga mengalami penurunan sebesar 41,68% (yoy). Realisasi Belanja Modal tercatat sebesar 2,24%, atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 79,79% (yoy). Belanja Modal merupakan jenis belanja yang memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian. Sehingga, pertumbuhan yang negatif berpotensi dapat menahan perekonomian Aceh.

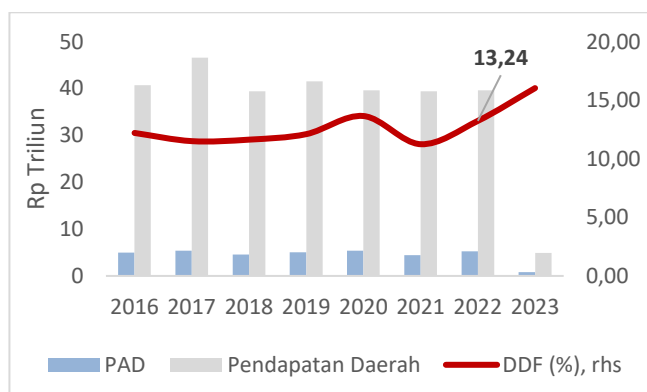
Tabel 2. 2. Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan I 2023.

REALISASI BELANJA TRANSFER TW-I 2023	
	
Belanja Bantuan Keuangan	5,95%
Belanja Bagi Hasil	6,26%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Penurunan juga terjadi pada Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa. Komponen Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil. Pada triwulan laporan, realisasi Belanja Bantuan Keuangan tercatat sebesar Rp423 miliar atau sebesar 5,95% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2023, menurun dibandingkan triwulan I 2022 yang terealisasi sebesar 7,16% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2022. Belanja Bagi Hasil juga mengalami penurunan pada triwulan I 2023 yang terealisasi sebesar 6,26% dari pagu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dengan realisasi sebesar 16,53%.

Grafik 2. 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Pendapatan Daerah terhadap target pendapatan terdeselerasi secara persentase maupun nominal pada triwulan I 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan I 2023 sebesar 13,10% dari pagu Pendapatan Daerah 2023, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2022 yang terealisasi sebesar 20,24% dari pagu pendapatan 2022. Secara nominal, realisasi mencapai Rp4,90 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp3,43 triliun (secara *year-on-year* turun 41,21%). Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 83,52% dari total realisasi pendapatan pada periode laporan atau sebesar Rp4,09 triliun. Sementara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp784,8 miliar pada triwulan I 2023 hanya menyumbang 14,32% dari total realisasi pendapatan. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Perkembangan Derajat

Desentralisasi Fiskal (DDF) pada Grafik 2.1. menunjukkan perbaikan pada kurun waktu 2016-2023 dengan semakin meningkatnya DDF, meski pada 2021 terdapat penurunan. Hasil sementara pada triwulan I 2023 kembali menunjukkan kenaikan DDF meskipun terjadi kenaikan realisasi pajak daerah. Kenaikan DDF disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pendapatan transfer yang mengindikasikan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah Aceh terhadap Pemerintah Pusat.

Tabel 2. 3. Realisasi Pendapatan APBD (APBA + APBK) se-Provinsi Aceh Triwulan I 2023

REALISASI PENDAPATAN APBD TW-I 2023	
 Pendapatan Asli Daerah	14.32%
Pendapatan Transfer	13%
Lain-Lain	5,01%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pada triwulan I 2023, peningkatan realisasi pendapatan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain mengalami penurunan. Realisasi Pendapatan Daerah meningkat dari sebelumnya sebesar 13,39% dari pagu Pendapatan pada triwulan I 2022 menjadi sebesar 14,32% dari pagu Pendapatan pada triwulan I 2023.

Secara nominal, terdapat penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp3,43 triliun pada periode laporan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi terjadi diakibatkan oleh penurunan Pendapatan Transfer. Pada triwulan laporan, pemerintah provinsi membukukan 4,1 triliun atau menurun 45,76% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,54 triliun. Selaras dengan Pendapatan Transfer, Realisasi Pendapatan lain-lain juga mengalami penurunan sebesar 24,47% dibanding periode sebelumnya di tahun 2022 dengan realisasi nominal sebesar Rp22,62 miliar pada triwulan I 2023. Sementara nominal realisasi PAD mengalami peningkatan realisasi menjadi 14,32% dari pagu PAD 2023 dari sebelumnya sebesar 13,39% dari pagu PAD 2022. .

Penurunan pagu pendapatan maupun belanja utamanya disebabkan oleh Dana Otonomi Khusus yang mengalami penurunan menjadi 1% di tahun 2023. Pada tahun 2022, Aceh menerima Rp7,56 Triliun Dana Otonomi Khusus, namun di tahun ini hanya Rp3,96 Triliun. Dana

Otonomi Khusus diberikan kepada Pemerintah Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dana Otonomi Khusus berlaku selama 20 tahun, dimulai sejak tahun 2008. Rincian pembagian dana tersebut adalah 2% untuk lima belas tahun pertama, dan 1% untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun ke-dua puluh.

2.3. Belanja Pemerintah Pusat

Pada triwulan I 2023, realisasi belanja APBN secara persentase mengalami peningkatan meskipun secara nominal lebih rendah. Sedangkan sisi pendapatan APBN meningkat secara persentase dan nominal pada triwulan laporan. Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar 17,30% dari pagu Belanja Negara 2023 (secara nominal total pagu Rp47,13 triliun), meningkat dibanding triwulan I 2022 yang terealisasi sebesar 13,5% dari pagu belanjanya (Rp60,93 triliun secara nominal). Sementara realisasi pendapatan APBN hingga periode laporan tercatat secara persentase sebesar 19,06% dari pagu pendapatan APBN (secara nominal Rp6,78 triliun) atau lebih tinggi dari persentase realisasi pada triwulan I 2022 sebesar 15,25% dari pagu pendapatan APBN 2022 (secara nominal Rp5,78 triliun).

Tabel 2. 4. Realisasi Belanja APBN di Aceh Pada Triwulan I 2023

REALISASI BELANJA APBN TW-I 2023		
	Belanja Pusat	16,20%
	Transfer	17,95%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (65,46% dari total Belanja APBN di Provinsi Aceh) mengalami kenaikan secara persentase namun menurun secara nominal. Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 17,95% dari pagu Transfer ke Daerah 2023 (secara nominal Rp29,74 triliun) atau tumbuh negatif sebesar 11,39% (yoy) dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 13,16% dari pagu Transfer ke Daerah 2022 (secara nominal Rp45,77 triliun). Peningkatan realisasi tertinggi terjadi pada Dana Bagi Hasil sebesar 211,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Tabel 2. 5. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan I 2023

REALISASI PENDAPATAN APBN TW-I 2023		
	Pajak	16,16%
	PNBP	42,52%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Penerimaan Pajak (75,42% dari total Pendapatan Negara di Provinsi Aceh) mengalami peningkatan pada persentase dan nominal realisasi. Secara persentase, Penerimaan Pajak pada triwulan I 2023 berada pada 16,16% dari pagu Penerimaan Pajak 2023 (secara nominal Rp6,03 triliun), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat realisasi sebesar 13,53% dari pagu Penerimaan Pajak 2022 (secara nominal Rp4,86 triliun).

Peningkatan Penerimaan Pajak secara nominal disumbang baik oleh Pajak Dalam Negeri maupun Pajak Perdagangan Internasional. Pada komponen Pajak Dalam Negeri, PPh Non Migas menjadi kontributor terbesar (61,10%) dengan total realisasi Rp2,2 triliun. Diikuti PPN yang memiliki kontribusi sebesar 39,74% dengan total realisasi Rp2,16 triliun. Pada komponen Pajak Perdagangan Internasional, total pendapatan Pajak Perdagangan Internasional pada tahun 2023 sebesar Rp36,34 miliar yang terdiri dari pendapatan Bea Keluar dan pendapatan Bea Masuk. Bea Keluar merupakan kontributor terbesar yang menyumbang 67,69%, sementara Bea Masuk menyumbang sebesar 32,31% dari total pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBA & APBK Provinsi Aceh Triwulan I 2023

APBA & APBK PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan I (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan I (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PENDAPATAN	41.167,25	37.393,70	8.332,21	4.898,88	20,24%	13,10%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.558,25	5.481,66	744,47	784,80	13,39%	14,32%
Transfer Pemerintah Pusat	35.431,29	31.461,03	7.557,80	4.091,46	21,33%	13,00%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	177,7	451,01	29,94	22,62	16,85%	5,02%
BELANJA	44.763,63	38.909,31	5.935,42	3.565,63	13,26%	9,16%
Belanja Daerah	35.386,62	30.873,92	4.912,75	3.084,49	13,88%	9,99%
Transfer	9.377,01	8.035,39	1.022,67	481,14	10,91%	5,99%
SURPLUS/DEFISIT	-3.596,38	-1.515,61	2.396,79	1.333,25	-66,64%	-87,97%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh

Tabel 2. 7. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan I 2023

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan I (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan I (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PENDAPATAN	5.784,24	6.780,25	881,87	1.292,01	15,25%	19,06%
Pajak	4.863,02	6.031,53	657,94	974,51	13,53%	16,16%
PNBP	921,22	748,72	223,93	318,34	24,31%	42,52%
BELANJA	60.931,33	47.131,98	8.225,39	8.155,14	13,50%	17,30%
Belanja Pusat	15.156,77	17.386,42	2.200,55	2.816,74	14,52%	16,20%
Transfer ke Daerah	45.774,56	29.745,56	6.024,84	5.338,40	13,16%	17,95%
SURPLUS/DEFISIT APBN	42.553,85	40.351,73	7.343,52	6.863,13	17,26%	17,01%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh



BAB III

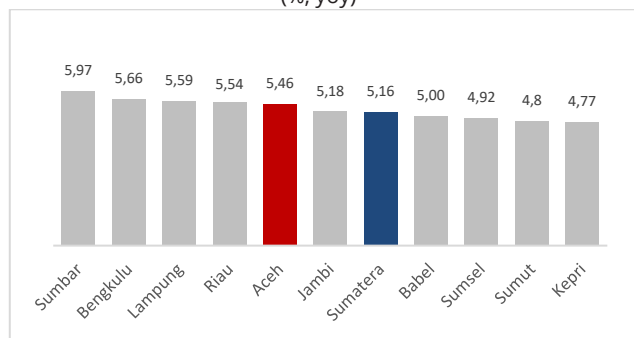
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan I 2023, laju Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan di Provinsi Aceh. Kendati demikian, perlu diwaspadai potensi kenaikan harga komoditas pangan sebagai dampak El Nino yang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah di Provinsi Aceh yang diperkirakan akan dimulai pada Juni 2023 dan mencapai puncak di Juli 2023.

3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,46% (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,89% (yoy). Angka inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dari inflasi Gabungan 24 Kota IHK di Sumatera (5,16%, yoy) dan Nasional (4,97%, yoy). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, realisasi inflasi tersebut menempatkan Provinsi Aceh sebagai daerah inflasi tertinggi kelima di Sumatera. Sumatera Barat merupakan provinsi dengan inflasi tertinggi di Sumatera pada triwulan I 2023.

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan I 2023 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang

Kelompok Barang dan Jasa	Tw IV 2022		Tw I 2023	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	4,59	1,45	6,56	2,04
Pakaian dan Alas Kaki	2,72	0,20	2,84	0,21
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	5,45	1,00	2,43	0,45
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	4,26	0,19	3,66	0,16
Kesehatan	3,20	0,07	4,81	0,10
Transportasi	16,89	2,03	13,98	1,68
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,44	-0,02	-0,28	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	2,22	0,03	4,00	0,05
Pendidikan	0,42	0,01	0,45	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	6,50	0,56	5,89	0,51
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,56	0,38	3,45	0,24
Inflasi Umum	5,89		5,46	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan I 2023, laju inflasi Aceh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi pada triwulan I 2023 utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,04% dan tekanan inflasi 6,56% (yoy). Selanjutnya, diikuti oleh kelompok transportasi dengan andil 1,68% dan tingkat inflasi 13,98% (yoy).

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

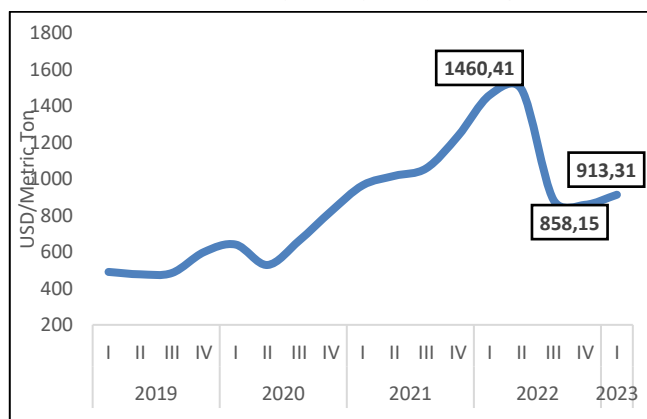
INFLASI 6,56% (yoy)		ANDIL 2,04%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Beras	0,38	Cabai Merah	-0,26
Ikan Tongkol	0,29	Minyak Goreng	-0,02
Rokok Kretek Filter	0,29	Cabai Hijau	-0,02
Telur Ayam Ras	0,14	Cumi-Cumi	-0,02
Ikan Kembung	0,12	Cabai Rawit	-0,02
-	-	Semangka	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode laporan tercatat mengalami inflasi 6,56% (yoy) dengan andil sebesar 2,04%. Inflasi yang terjadi didorong oleh subkelompok rokok dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 8,34% (yoy). Komoditas utama yang menyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain beras, ikan tongkol, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan ikan kembung. Harga beras yang masih cukup tinggi pada triwulan I 2023 menjadi penyumbang inflasi terbesar dari kelompok ini. Hal ini disinyalir akibat semakin menipisnya stok gabah di tingkat penggilingan dan baru masuknya masa panen padi di wilayah Aceh pada bulan Maret dan April. Selain itu, komoditas yang memiliki andil inflasi yang tinggi adalah ikan tongkol yang disebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, komoditas rokok kretek filter juga masih memiliki andil yoy yang tinggi sebagai dampak dari kenaikan cukai rokok sebesar 10% di awal tahun 2023.

Di sisi lain, komoditas deflasi disumbang oleh cabai merah, minyak goreng, cabai hijau, cumi-cumi, cabai rawit, dan semangka. Komoditas cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit mengalami penurunan harga dikarenakan stabilnya permintaan dan terjaganya pasokan komoditas tersebut dari luar Aceh seperti Pulau Jawa dan Sumatera Utara. Selain itu, upaya Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Aceh dengan melakukan kerjasama perdagangan bahan pokok antar daerah juga berkontribusi dalam laju inflasi pada komoditas tersebut. Sementara itu, harga minyak goreng relatif stabil dengan kecenderungan sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia atau minyak kelapa sawit yang juga menunjukkan peningkatan. Pada Grafik 3.2 ditampilkan rata-rata harga minyak kelapa sawit secara triwulanan. Pada triwulan I 2023, harga minyak kelapa sawit berada pada level USD 918,37/*metric ton*. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang ada pada level USD 858,15/*metric ton*, namun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berada pada level USD 1.460,41/*metric ton*. Harga minyak goreng dalam negeri berusaha ditekan oleh Pemerintah dengan diberlakukannya *Domestic Price Obligation* (DPO), penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), larangan mekanisme *bundling* dengan produk lainnya, serta memastikan pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) pada Februari 2023.

Grafik 3.2. Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit



Sumber: Bloomberg, diolah

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Tabel 3.3. Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 2,84% (yoy)		ANDIL 0,21%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Celana Panjang Jeans Pria	0,03	-	-
Baju Muslim Anak	0,02	-	-
Sepatu Anak	0,02	-	-
Ongkos Binatu/Laundry	0,01	-	-
Baju Kaos Berkerah Pria	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan I 2023, inflasi kelompok pakaian dan alas kaki di Aceh tercatat sebesar 2,84% (yoy) dengan andil 0,21%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,20%). Tekanan inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh sub kelompok pakaian yang mengalami inflasi sebesar 2,26% (yoy) dan subkelompok alas kaki yang mengalami inflasi sebesar 5,89% (yoy).

Barang-barang penyumbang inflasi pada sub kelompok ini antara lain celana panjang jeans pria, baju muslim anak, sepatu anak, ongkos binatu/laundry, dan baju kaos berkerah pria. Peningkatan harga produk pakaian tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan pakaian menjelang datangnya bulan Ramadhan.

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI 2,43% (yoy)		ANDIL 0,45%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,20	-	-
Sewa Rumah	0,14	-	-
Kontrak Rumah	0,02	-	-
Cat Tembok	0,02	-	-
Semen	0,02	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 2,43% (yoy) dengan andil sebesar 0,45%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (1,00%). Inflasi pada

kelompok ini secara tahunan terutama didorong oleh subkelompok listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 4,41% (yoy). Secara lebih detail, barang/jasa pemberi andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, kontrak rumah, cat tembok, dan semen.

Bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang andil tertinggi dikarenakan terbatasnya kuota LPG yang ada di pangkalan. Selain itu, inflasi di komoditas ini juga didukung oleh keberadaan kios-kios yang menjual LPG di atas HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya penyumbang inflasi kedua terbesar adalah sewa rumah. Tarif sewa rumah mengalami peningkatan dikarenakan sudah terkendalanya masa pandemi Covid-19 sehingga anjuran kuliah dan kerja secara digital mulai tergantikan dengan pertemuan fisik.

Peningkatan harga barang konstruksi seperti cat tembok dan semen terjadi seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Aceh.

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 3,66% (yoy)		ANDIL 0,16%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Lemari Pakaian	0,02	-	-
Kulkas/Lemari Es	0,02	-	-
Lemari Hias/Bupet	0,01	-	-
Meja Kursi Makan	0,01	-	-
Kain Gorden	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan I 2023, inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga di Aceh tercatat sebesar 3,66% (yoy) dengan andil terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,16%, lebih rendah dari periode sebelumnya (0,19%). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan

kebun dengan inflasi sebesar 5,56% (yoy). Secara lebih detail, barang atau komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah lemari pakaian dan kulkas/lemari es dengan andil masing-masing 0,02% (yoy), kemudian diikuti dengan lemari hias/bupet, meja kursi makan, kain gorden, kipas angin, bola lampu, pembasmi nyamuk spray, pembersih lantai, pengharum cucian/pelembut, serta upah pembantu rumah tangga dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Kel. Kesehatan

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 4,81% (yoy)		ANDIL 0,10%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Obat Dengan Resep	0,08	-	-
Obat Gosok	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan I 2023, inflasi kelompok kesehatan tercatat sebesar 4,81% (yoy) dengan andil terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,10%, meningkat dibanding periode sebelumnya (0,07%). Tekanan inflasi pada triwulan laporan disebabkan oleh subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 9,46% (yoy). Secara lebih detail, komoditas penyumbang inflasi terbesar kelompok ini adalah obat dengan resep dengan andil 0,08% dan obat gosok dengan andil 0,01%. Harga obat-obatan tertentu mengalami kenaikan diduga karena biaya *sales and marketing expense* yang mahal.

Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 13,98% (yoy)		ANDIL 1,68%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bensin	1,04	-	-
Angkutan Udara	0,24	-	-
Angkutan Antar Kota	0,09	-	-
Pemeliharaan/Service	0,08	-	-
Sepeda Motor	0,05	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok transportasi pada triwulan I 2023 mengalami inflasi sebesar 13,98% (yoy) dengan andil 1,68% terhadap inflasi secara keseluruhan, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (2,03%). Inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi yang mengalami inflasi sebesar 20,61% (yoy). Pada periode ini, komoditas bensin menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 1,04% (yoy). Peningkatan harga bensin ini disebabkan oleh penyesuaian harga beberapa BBM non subsidi seperti Pertamina dan Pertamina Turbo yang ditetapkan oleh Pertamina pada Maret 2023.

Komoditas selanjutnya yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi di kelompok transportasi adalah angkutan udara dengan andil 0,24% (yoy). Pada triwulan I 2023, jumlah penumpang angkutan udara di Aceh mencapai 172.967 atau meningkat sebesar 81,34% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 95.383 orang. Kenaikan tersebut turut mempengaruhi kenaikan harga tiket pesawat udara pada periode tersebut. Selanjutnya, angkutan antar kota juga menjadi penyumbang inflasi dalam kelompok ini dengan andil 0,09% (yoy).

Sementara itu, komoditas pemeliharaan/service juga menyumbang inflasi pada kelompok transportasi dengan andil 0,08% (yoy). Kenaikan biaya pemeliharaan disebabkan oleh peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% dan juga kenaikan suku bunga sepanjang tahun 2022 yang menyebabkan harga *spare part* kendaraan naik.

Lebih lanjut, alat transportasi pribadi juga mengalami inflasi terutama sepeda motor dan mobil dengan andil masing-masing sebesar 0,05% (yoy) dan 0,03% (yoy). Harga kendaraan bermotor dapat dikatakan mengalami kenaikan secara rutin tiap tahunnya. Kenaikan dapat disebabkan penambahan spesifikasi dan fitur, kenaikan biaya produksi, dan penyesuaian kurs. Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA),

penjualan kendaraan baru seperti sepeda motor dan mobil di Aceh masih tinggi. Pada Triwulan I 2023, total penjualan kendaraan bermotor mencapai 29.792 unit.

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI -0,28% (yoy)		ANDIL -0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
-	-	Laptop/Notebook	-0,01
-	-	Televisi Berwarna	-0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada triwulan I 2023 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,28% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan adalah sebesar -0,01%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (-0,02%).

Tekanan deflasi yang terjadi tersebut disebabkan oleh komoditas peralatan informasi dan komunikasi dengan deflasi sebesar 1,20% (yoy). Tidak terdapat komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini.

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 4,00% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Buku Tulis Bergaris	0,02	-	-
Pulpen/Bolpoint	0,01	-	-
Tas	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan I 2023, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat sebesar 4,00% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan sebesar 0,05%, lebih tinggi dibanding dengan periode sebelumnya (0,03%). Inflasi yang terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memiliki andil inflasi yang relatif kecil. Barang yang

mengalami kenaikan harga yaitu buku tulis bergaris dengan andil inflasi 0,02% (yoy) serta pulpen dan tas dengan andil inflasi masing-masing 0,01% (yoy).

Kel. Pendidikan

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 0,45% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bimbingan Belajar	0.01	-	-
Kursus Bahasa Asing	0.01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Inflasi kelompok pendidikan pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 0,45% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan adalah sebesar 0,01%, sama dengan triwulan sebelumnya (0,01%). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok pendidikan lainnya yang mengalami inflasi sebesar 2,86% (yoy). Kenaikan biaya terjadi pada bimbingan belajar dan kursus bahasa asing dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Secara umum, kenaikan biaya pendidikan terjadi setiap tahunnya. Kenaikan rata-rata biaya pendidikan di Indonesia sebesar 10%-15% per tahun untuk keperluan operasional, pengembangan, dan lain-lain.

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada periode laporan tercatat mengalami inflasi sebesar 5,89% (yoy) dengan andil sebesar 0,51% terhadap inflasi secara keseluruhan, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,56%). Inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 5,89% (yoy). Kenaikan terjadi pada komoditas nasi dengan lauk, ketupat/lontong sayur, mie, kopi siap saji, dan teh siap saji. Peningkatan harga pada produk makanan olahan tersebut sejalan dengan peningkatan inflasi kelompok bahan makanan yang salah satunya

diakibatkan oleh penyesuaian harga pasca kenaikan BBM.

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 5,89% (yoy)		ANDIL 0,51%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Nasi Dengan Lauk	0,09	-	-
Ketupat/Lontong Sayur	0,08	-	-
Mie	0,08	-	-
Kopi Siap Saji	0,06	-	-
Teh Siap Saji	0,04	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Pada triwulan I 2023, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 3,45% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan sebesar 0,24%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,38%). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok perlindungan sosial dengan inflasi sebesar 4,98% (yoy).

Komoditas yang menyebabkan inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil 0,08% (yoy), sabun mandi dan pasta gigi dengan andil masing-masing 0,03% (yoy), serta pembalut wanita dan popok bayi sekali pakai/diapers dengan andil masing-masing 0,02% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh nilai tukar Rupiah yang mengalami fluktuasi pada triwulan I 2023. Kenaikan harga ini didukung oleh krisis perbankan yang terjadi di Amerika Serikat.

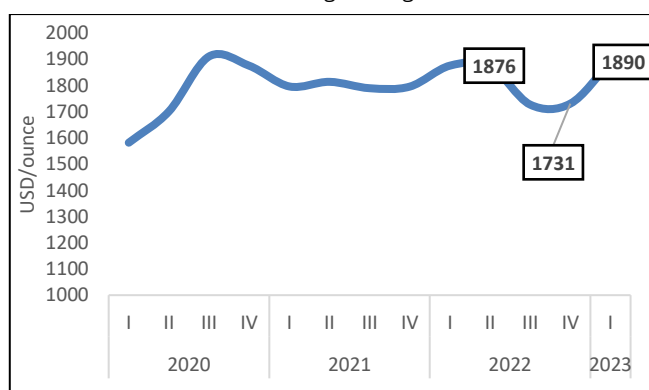
Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 3,45% (yoy)		ANDIL 0,24%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,08	-	-
Sabun Mandi	0,03	-	-
Pasta Gigi	0,03	-	-
Pembalut Wanita	0,02	-	-
Popok Bayi Sekali Pakai/Diapers	0,02	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Harga emas dunia menunjukkan peningkatan dibanding triwulan IV 2022, seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed pada awal tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, harga emas dunia saat ini cukup melambung tinggi. Data *Bloomberg* memperlihatkan rata-rata harga emas dunia (Grafik 3.6) pada triwulan I 2023 berada pada level USD1.890/ounce. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pada triwulan sebelumnya sebesar USD1.731/ounce dan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar USD1.876/ounce.

Grafik 3.6. Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: *Bloomberg*, diolah

3.3. Tracking Inflasi Triwulan II 2023

Pada bulan April 2023, Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm), sedangkan secara tahunan mengalami inflasi 4,05% (yoy). Angka deflasi Aceh pada bulan laporan (0,11%, mtm) tercatat mengalami akselerasi setelah pada bulan sebelumnya tercatat lebih rendah (0,51%, mtm). Secara tahunan, inflasi pada April 2023 tercatat sebesar 4,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan April 2022 yang berada pada angka 4,37% (yoy). Secara *year-to-date*, inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh pada April 2023 berada pada laju 0,58% (ytd). Secara bulanan, faktor pendorong utama deflasi di Aceh adalah cabai merah (0,18%), ikan tongkol/ikan ambu-ambu (0,17%), ikan dencis (0,07%), bawang merah (0,04%), cabai rawit (0,02%), kentang, ikan rambe, daging sapi, kemeja panjang anak, dan ikan bandeng/ikan bolu masing-masing sebesar 0,01%.

Pada bulan Mei 2023, secara bulanan kota gabungan IHK di Provinsi Aceh diperkirakan akan mengalami inflasi. Hal ini diindikasikan dari hasil pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang menunjukkan kenaikan harga untuk beberapa komoditas, seperti komoditas bawang merah dan bawang putih.

Pada triwulan II 2023, laju inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh diperkirakan akan melambat dibandingkan periode sebelumnya.

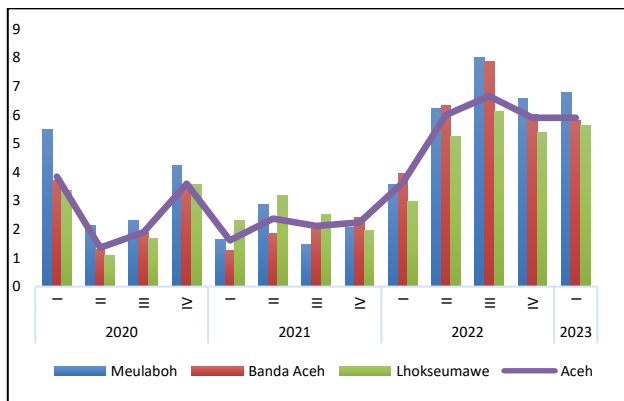
Hal ini sejalan dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan oleh TPID di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh. Kendati demikian, terdapat potensi kenaikan harga komoditas pangan yang didorong akibat fenomena *el nino* di beberapa wilayah di Provinsi Aceh yang diperkirakan akan dimulai pada Juni 2023 dan akan mencapai puncak di Juli 2023.

3.4. Inflasi Spasial

Apabila dilihat secara spasial, pada April 2023 inflasi terjadi di seluruh kota pantauan di Provinsi Aceh. Secara tahunan, Kota Meulaboh menjadi kota yang mengalami inflasi paling tinggi, yakni 4,26% (yoy), diikuti Kota Banda Aceh (4,23%, yoy) dan Kota Lhokseumawe (3,61%, yoy). Di sisi lain, secara bulanan terdapat satu kota yang mengalami inflasi sementara dua kota lainnya mengalami deflasi. Kota Banda Aceh mengalami inflasi dengan laju inflasi sebesar 0,18% (mtm). Sedangkan Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh mengalami deflasi dengan laju deflasi masing-masing 0,42% (mtm) dan 0,70% (mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan pada bulan April 2023 di Kota Meulaboh adalah ikan kembung (0,08%), ikan kakap merah (0,07%), emas perhiasan (0,06%), ikan tuna (0,06%), jeruk (0,04%), dan beras (0,03%). Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi adalah ikan tongkol (-0,43%), ikan dencis (-0,38%), cabai merah (-0,29%), bawang merah (-0,05%), dan cabai rawit (0,03%).

Grafik 3.7. Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh (% ,yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, penyumbang inflasi bulanan di Kota Banda Aceh adalah jeruk (0,07%), angkutan udara (0,05%), rokok kretek filter (0,04%), ikan tongkol (0,04%), emas perhiasan (0,04%), dan cumi-cumi (0,04%). Sementara komoditas penyumbang deflasi di Banda Aceh pada April 2023 adalah cabai merah (-0,18), bawang merah (-0,04%), ikan bandeng (-0,02%), ikan rambe (-0,02%), dan cabai rawit (-0,02%).

Selanjutnya, penyumbang inflasi bulanan di Kota Lhokseumawe adalah jeruk (0,06%), jeruk nipis (0,05%), udang basah (0,05%), emas perhiasan (0,04%), kemeja pendek katun pria (0,03%), dan daging ayam ras (0,03%). Sementara komoditas penyumbang deflasi di Lhokseumawe pada Januari 2023 adalah ikan tongkol (-0,49%), cabai merah (-0,13%), ikan dencis (-0,07%), bawang merah (-0,04%), serta cabai rawit, kentang, dan beras masing-masing 0,02%.

Inflasi Aceh pada triwulan II 2023 diperkirakan lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh gencarnya program GNPIP yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan koordinasi serta sinergi antar anggota TPID Provinsi Aceh yang intens dilakukan.

3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh akan terus berupaya melakukan pengendalian harga, melalui forum koordinasi

dan langkah tindak lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pada awal tahun 2023 telah dilakukan koordinasi pengendalian inflasi yang membahas program kerja serta anggaran TPID Provinsi Aceh sepanjang tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, telah disepakati beberapa program kerja yang akan menjadi fokus pengendalian inflasi sepanjang tahun 2023 untuk menjaga inflasi berada pada rentang target nasional $3 \pm 1\%$.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan I, meliputi:

1. Pemerintah Provinsi Aceh bersama Dinas terkait telah berdiskusi dalam menyusun dan mengalokasikan dana terkait pengendalian inflasi di Provinsi Aceh pada tanggal 13 Januari 2023.
2. Operasi pasar di 23 kabupaten/kota selama 20 hari pada 5 – 25 Januari 2023.
3. Gelar pangan murah di Kota Lhokseumawe pada 30 Januari 2023 untuk komoditas telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan beras oleh Dinas Pangan.
4. Rapat koordinasi pusat dan daerah (Rakorpusda) pengendalian inflasi pada 30 Januari 2023.
5. Sidak pasar yang dilakukan oleh Pj Bupati Aceh Tenggara di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan pada 1 Februari 2023.
6. Pasar murah di 5 lokasi di Kota Banda Aceh yang dilaksanakan pada 6 – 10 Februari 2023 yang menyediakan beras, minyak goreng, dan telur.
7. Pelaksanaan pasar murah oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bekerjasama dengan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan (DKPP) di Kabupaten Nagan Raya pada 2 Februari 2023 yang menjual komoditi pangan pokok strategis seperti beras premium, telur, minyak goreng, dan gula pasir.
8. Operasi pasar tanggap inflasi Aceh yang dilakukan di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh

dengan komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam pada tanggal 6 – 9 Februari 2023.

9. Rapat koordinasi nasional TPID dengan Mendagri pada tanggal 7 Februari 2023.
10. Pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 – 10 Februari 2023.
11. Inspeksi pasar mendadak yang dilakukan oleh Pj Bupati Bener Meriah pada 10 Februari 2023.
12. Peresmian lumbung pangan di Kecamatan Lhoong pada 10 Februari 2023.
13. Radiogram inflasi bersama mendagri pada tanggal 13 Februari 2023.
14. Sidak pasar dan *monitoring* harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan di Aceh Singkil pada tanggal 15 Februari 2023.
15. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Aceh pada 16 Februari 2023.
16. Rapat koordinasi tindak lanjut MoU kerjasama pemerintah Kab. Aceh Singkil dan Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya tentang penyediaan dan distribusi beras pada tanggal 16 Februari 2023.
17. Rapat Koordinasi Pusat Daerah dengan Mendagri pada tanggal 20 Februari 2023.
18. Pelaksanaan penandatanganan KAD antara Aceh Tengah dan Banda Aceh pada 21 Februari 2023.
19. Kegiatan operasi pasar komoditi beras premium tanggal 22 Februari hingga 23 Maret 2023 di lima kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah.
20. *Capacity building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh pada tanggal 8 – 9 Maret 2023.
21. Pengumpulan laporan tahunan TPID seluruh kabupaten/kota se-Aceh pada tanggal 31 Maret 2023.

Lebih lanjut, untuk menekan laju inflasi dalam jangka menengah, maka telah disusun *Roadmap* (peta jalan) Pengendalian Inflasi Daerah Aceh tahun 2022-2024 dengan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dengan rincian program sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- Pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan).
- Optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas Beras.
- Pelaksanaan pasar murah (Menjelang HBKN).
- Pelaksanaan Sidak Pasar.
- Menetapkan harga eceran tertinggi pada komoditas bahan pangan melalui penyusunan Qanun (Perda).

2. Ketersediaan Pasokan

- Peningkatan produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit).
- Peningkatan produksi peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam).
- Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi.
- Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian seperti pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir (Aceh Tamiang).
- *Learning Center* untuk peningkatan produksi komoditas hortikultura, peternakan, dan perikanan (UPTD).
- Korporatisasi klaster komoditas pangan.
- Pengaturan jadwal tanam komoditas pangan.
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk kuota impor komoditas bawang putih dan gula.

3. Kelancaran Distribusi

- Inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi.
- Peningkatan transaksi KAD.
- Fasilitas Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI).
- Simulasi pengendalian inflasi di daerah.
- Pelaksanaan pasar lelang (komoditas lokal

dan ekspor).

- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, antara lain: pemanfaatan tol laut.
- Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: fasilitasi kerja sama UMKM pangan binaan dengan *e-commerce*
- Optimalisasi pemanfaatan *Cold Storage* untuk komoditas perikanan.

4. Komunikasi Efektif

- Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kab/kota
- Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota.
- Penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota.
- Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID.
- Pelaksanaan *Capacity Building* TPID.
- Rilis pers/media terkait perkembangan harga dan ketersediaan pasokan.



BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang diikuti dengan peningkatan *Financing to Deposit* (FDR) *Ratio* menjadi 89,80% di periode laporan. Pembiayaan UMKM juga meningkat, namun perlu diwaspadai peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) meskipun masih dalam batas aman.

4.1. Kinerja Perbankan

Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan kondisi yang terjaga. Aktivitas perbankan di Aceh pada triwulan I 2023 terpantau mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran pembiayaan yang meningkat sebesar 10,6% (yoy) dan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang juga mengalami peningkatan sebesar 2,55% (yoy).

Perbaikan kinerja sektor perbankan didorong oleh kembali normalnya aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19. Meskipun demikian, ketidakpastian global harus tetap diwaspadai. Kondisi geopolitik dunia yang masih belum stabil tentunya akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor keuangan.

Adapun kinerja sektor perbankan dapat tercermin dari beberapa indikator utama seperti penyaluran pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta rasio jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana yang dihimpun atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Grafik 4.1).

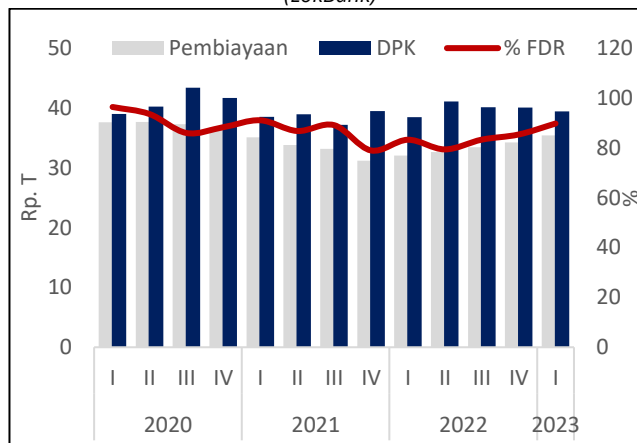
Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp35,42 Triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp32,04 Triliun. Hal ini mendorong peningkatan FDR di triwulan laporan menjadi sebesar 89,80%, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu sebesar 83,29%. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan kinerja penyaluran pembiayaan.

Pada triwulan I 2023, DPK di Aceh tercatat sebesar Rp39,45 Triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp40,09 Triliun. Namun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan DPK sebesar Rp0,98 Triliun atau meningkat sebesar 2,55% (yoy).

Pada triwulan laporan, *Non Performing Financing* (NPF) tercatat sebesar 1,83%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,53% (Grafik 4. 2.). Terjadi kenaikan jumlah kredit macet atau *default*

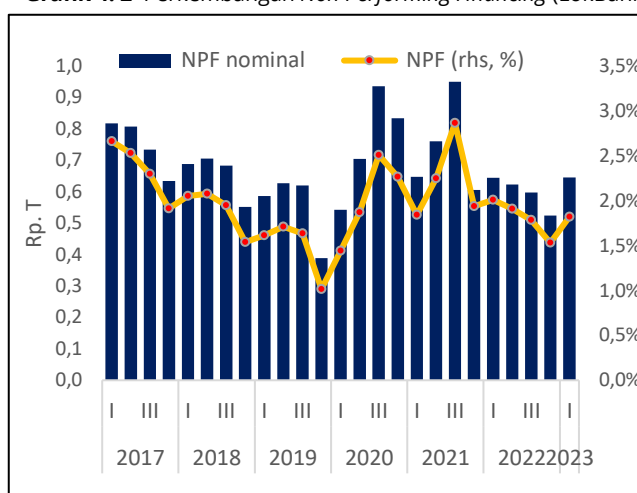
sebesar Rp0,12 Triliun. Meskipun terjadi kenaikan NPF, namun masih di bawah batas aman sehingga secara umum kualitas pembiayaan masih berada pada level yang terjaga.

Grafik 4. 1.Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank)



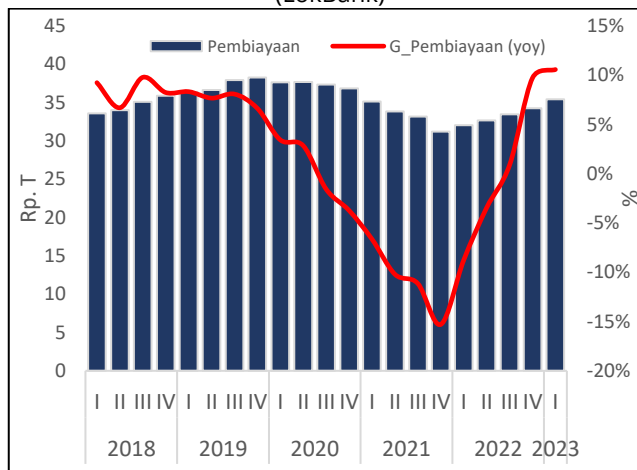
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 2 Perkembangan Non Performing Financing (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 3 Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

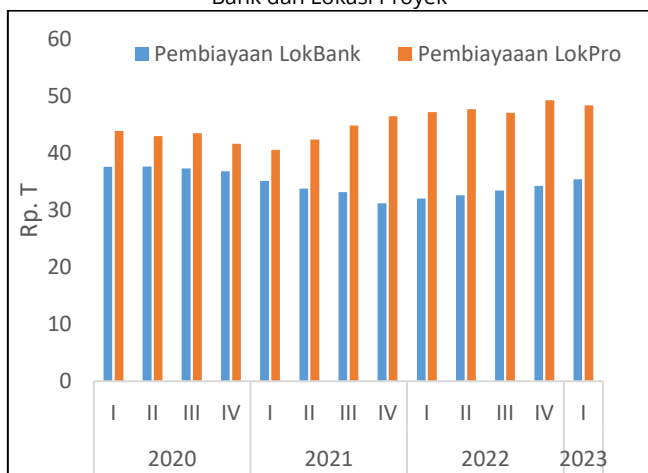
Pembiayaan berdasarkan lokasi bank pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp35,42 Triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan pada triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp34,23 Triliun. Dapat dilihat pada Grafik 4.3 dan Grafik 4.4 di bawah ini mengenai perkembangan pembiayaan di Aceh.

Pembiayaan yang disalurkan di Aceh tidak hanya dilakukan oleh perbankan yang berlokasi di Aceh. Dapat dilihat pada grafik 4.4 di bawah ini tentang perkembangan pembiayaan berdasarkan lokasi bank dan berdasarkan lokasi proyek. Nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek yang lebih besar dibanding nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp48,38 triliun dan penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi banknya tercatat sebesar Rp35,42 triliun.

Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan mencapai Rp48,38 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp47,21 triliun.

Selanjutnya perkembangan pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun lalu, pembiayaan berdasarkan lokasi bank mengalami kenaikan sebesar Rp3,38 Triliun atau tumbuh sebesar 10,56% (yoy). Sementara itu, pembiayaan berdasarkan lokasi proyek juga tumbuh sebesar Rp1,17 Triliun atau tumbuh sebesar 2,55% (yoy).

Grafik 4. 4 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek



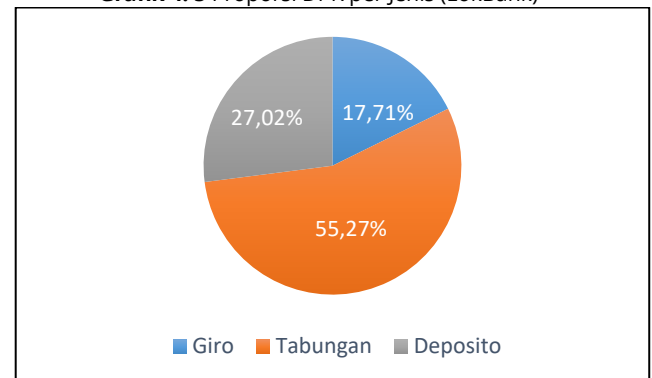
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1. Pertumbuhan DPK Ditopang oleh Jenis Deposito dan Tabungan

Berdasarkan jenisnya, DPK terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Adapun pada triwulan laporan, DPK didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 55,27%, diikuti deposito sebesar 27,02%, dan giro sebesar 17,71%.

Grafik 4. 5 Proporsi DPK per Jenis (LokBank)



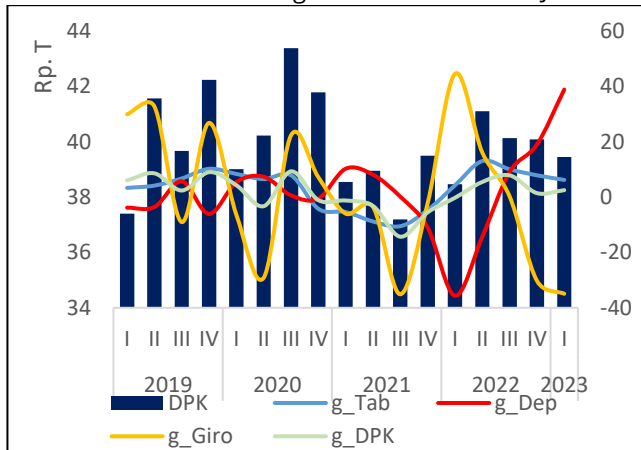
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penghimpunan DPK secara tahunan mengalami peningkatan dengan laju 2,55% (yoy).

Pertumbuhan DPK jenis deposito menjadi penyumbang terbesar terhadap kenaikan DPK secara keseluruhan. Pada triwulan laporan, DPK jenis deposito dan tabungan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 38,94% (yoy) dan 6,27% (yoy), sementara DPK jenis giro mengalami penurunan sebesar 34,94% (yoy).

Total DPK pada triwulan I 2023 adalah sebesar Rp39,45 Triliun dengan rincian sebagai berikut, nilai DPK jenis giro sebesar Rp6,9 Triliun, jenis tabungan sebesar Rp21,54 Triliun, dan jenis deposito sebesar Rp10,53 Triliun.

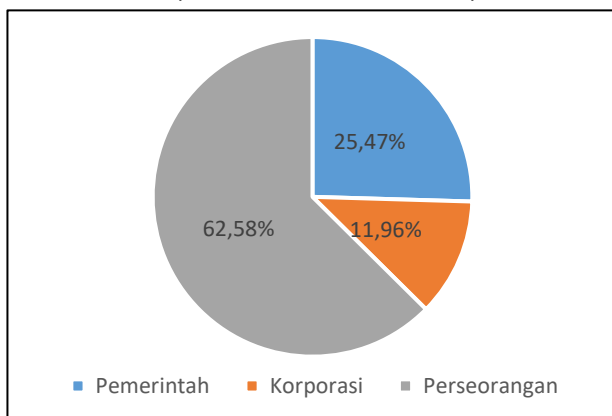
Semenjak tahun 2022, terjadi tren pertumbuhan yang signifikan dari jenis DPK deposito. Hal ini menjadi salah satu indikator kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di perbankan.

Grafik 4. 6 Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

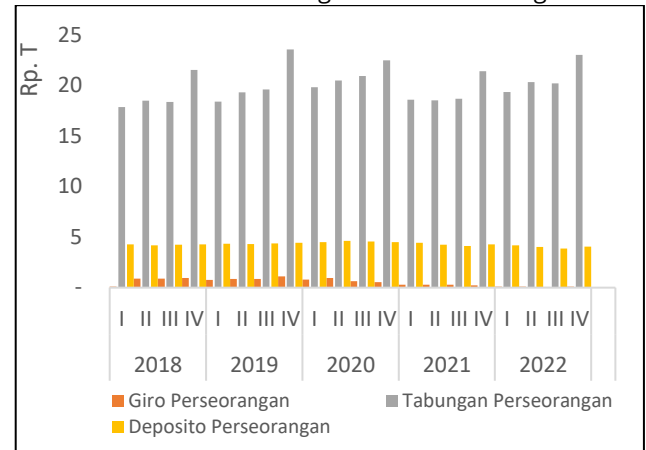
4.2.2. Perkembangan DPK berdasarkan Pemilik

Berdasarkan kepemilikannya, DPK yang dimiliki oleh perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 62,58%. DPK yang berasal dari pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki proporsi sebesar 25,47% dan 11,96%.

Grafik 4. 7 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

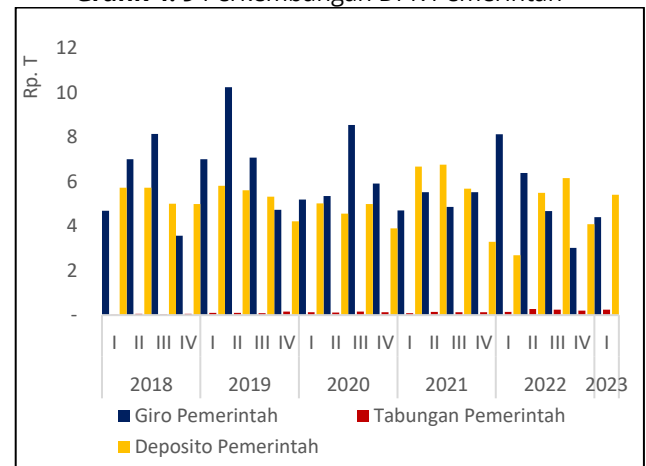
DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 0,12%, deposito sebesar 15,63%, dan tabungan sebesar 84,05%. Masyarakat umum kebanyakan menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya literasi keuangan dan faktor kemudahan membuka rekening tabungan.

Grafik 4. 8 Perkembangan DPK Perseorangan

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Sebagian besar DPK pemerintah adalah berjenis deposito dan giro. Perkembangan DPK pemerintah pada triwulan laporan masih terjaga meskipun mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu. Pada triwulan laporan, penurunan DPK pemerintah tercatat sebesar 8,18% (yoy). Penurunan DPK pemerintah disumbang paling besar oleh DPK jenis giro yang mengalami penurunan sebesar 45,75% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi realisasi belanja daerah yang tinggi.

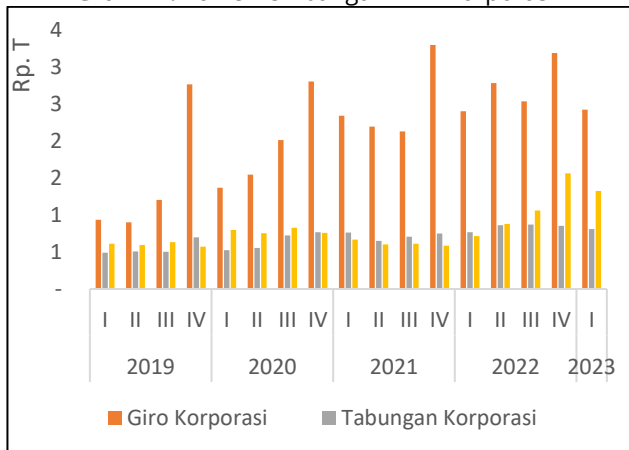
Sementara itu, DPK pemerintah jenis tabungan dan deposito mengalami peningkatan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Tabungan dan deposito pemerintah pada triwulan I 2023 memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung kenaikan DPK. Tabungan pemerintah meningkat sebesar 67,96% (yoy). Sementara itu, DPK pemerintah jenis deposito mengalami kenaikan sebesar 101,28% (yoy).

Grafik 4. 9 Perkembangan DPK Pemerintah

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 57%, deposito sebesar 28%, dan tabungan sebesar 15%. DPK korporasi jenis giro mengalami penurunan sebesar 3,27% (yoy). Sementara itu, deposito dan tabungan masing-masing meningkat sebesar 13,95% dan 167,98%.

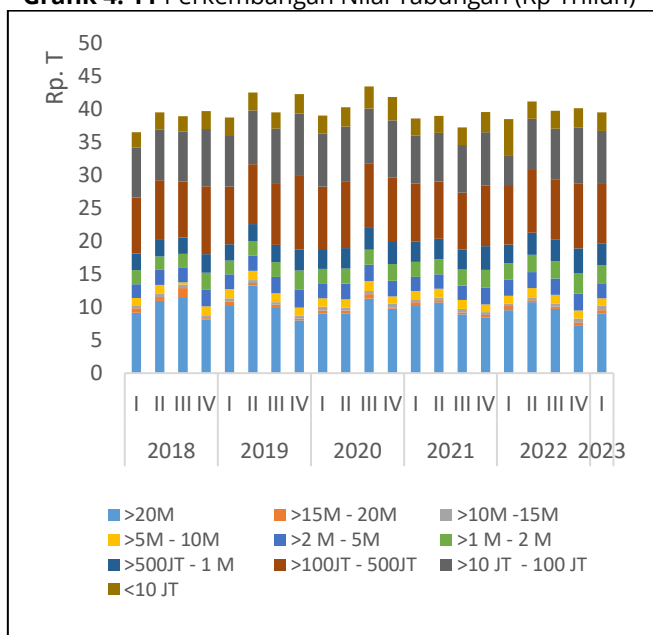
Grafik 4. 10 Perkembangan DPK Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan kelompok nilainya, DPK dengan nominal nilai rekening dengan kategori >100 Juta – 500 juta memiliki persentase sebesar 23,13% dari total DPK. Persentase ini menjadi yang terbesar dibandingkan dengan kelompok nilai lainnya. Selanjutnya, kelompok DPK >20 Miliar memiliki persentase sebesar 22,93% dari total DPK. Namun pemilik rekening dengan jumlah saldo tersebut hanya ada 89 rekening di Aceh.

Grafik 4. 11 Perkembangan Nilai Tabungan (Rp Triliun)

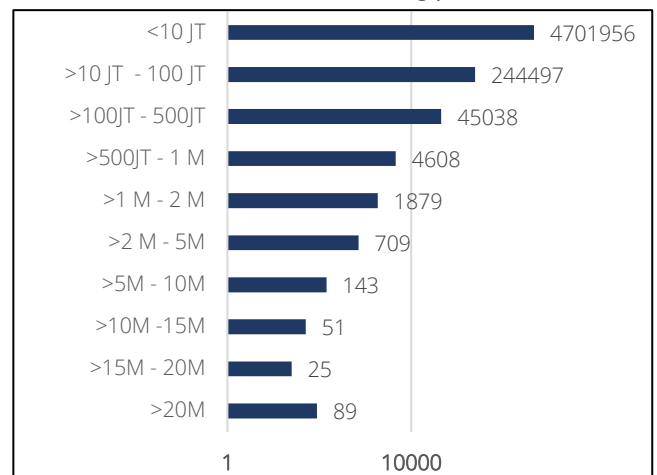


Sumber: Laporan Bank Umum diolah

Hingga triwulan I 2023, terdapat 4,9 juta pemegang rekening di Aceh. Tidak banyak perubahan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dari keseluruhan jumlah rekening, pemegang rekening dengan saldo di bawah Rp10 juta mendominasi dengan porsi 94,06% dari total nasabah. Jumlah pemegang rekening dengan nominal tabungan di bawah 10 juta adalah sebesar 4,7 juta orang pemegang rekening.

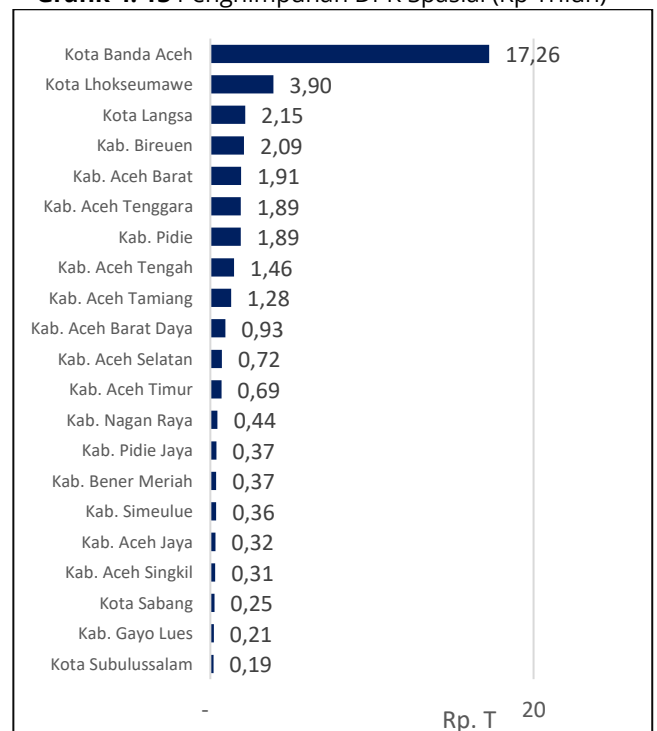
Grafik 4. 12 Jumlah Rekening per Saldo



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara spasial, penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Aceh belum tersebar secara merata dan masih terkonsentrasi di wilayah ibu kota provinsi.

Grafik 4. 13 Penghimpunan DPK Spasial (Rp Triliun)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

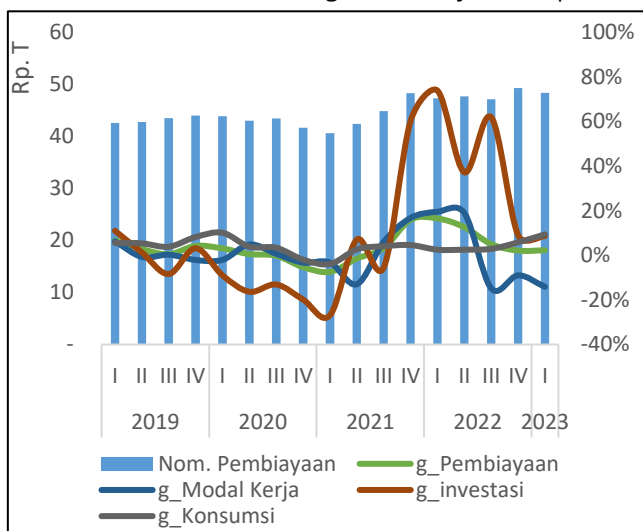
Kota Banda Aceh menyerap 45,44% dari total DPK di Aceh atau setara dengan Rp17,26 Triliun. Setelah ibu kota provinsi, wilayah Kabupaten/Kota yang mendominasi penghimpunan DPK diantaranya adalah Lhokseumawe (Rp3,90 Triliun), Langsa (Rp2,15 Triliun), Bireun (Rp2,09 Triliun) dan Aceh Barat (Rp1,91 Triliun).

4.2.2. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Didorong Konsumsi dan Investasi

Laju penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek mengalami pertumbuhan sebesar 2,25% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,09% (yoy).

Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh pertumbuhan pembiayaan konsumsi dan pembiayaan investasi masing-masing sebesar 9,39% (yoy) dan 8,63% (yoy). Sementara pembiayaan modal kerja mengalami penurunan sebesar 14,16% (yoy).

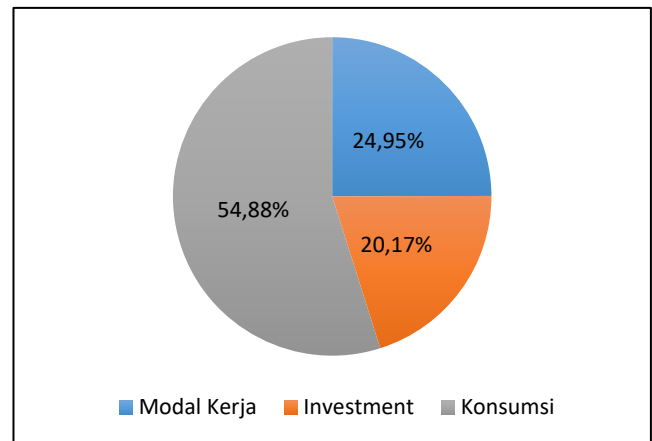
Grafik 4. 14 Perkembangan Pembiayaan (lokpro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 54,88%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 45,12%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja dimana masing-masing memiliki porsi sebesar 20,17% dan 24,95% dari total pembiayaan yang disalurkan pada triwulan laporan

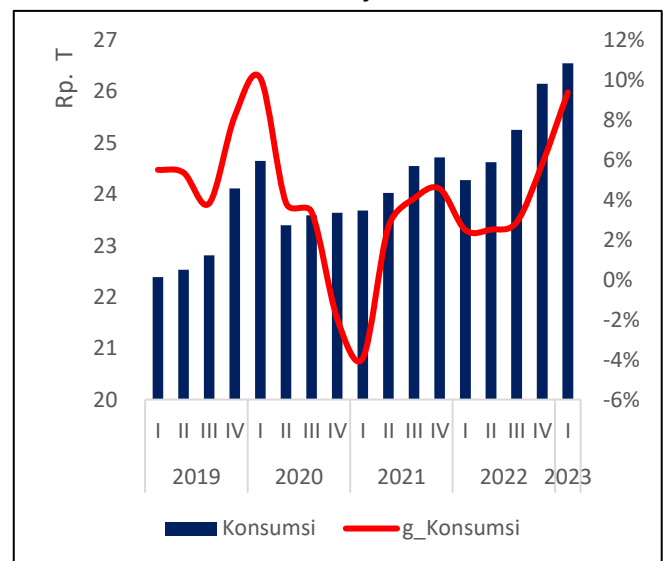
Grafik 4. 15 Proporsi pembiayaan berdasarkan penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh yang masih didominasi oleh pembiayaan sektor konsumsi menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor-sektor produktif belum tersalurkan secara optimal.

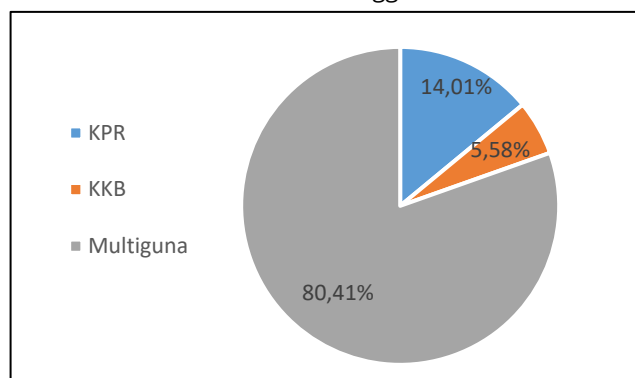
Grafik 4. 16 Pembiayaan Konsumsi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pembiayaan Konsumsi terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna. Pada triwulan laporan, pembiayaan konsumsi meningkat sebesar 9,39% (yoy). Tren perbaikan pembiayaan konsumsi pada triwulan berjalan terus berlanjut setelah mengalami penurunan yang drastis sejak tahu 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Pembiayaan konsumsi pada triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan yang turut didorong oleh perayaan HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.

Grafik 4. 17 Proporsi Pembiayaan Konsumsi Berdasarkan Penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

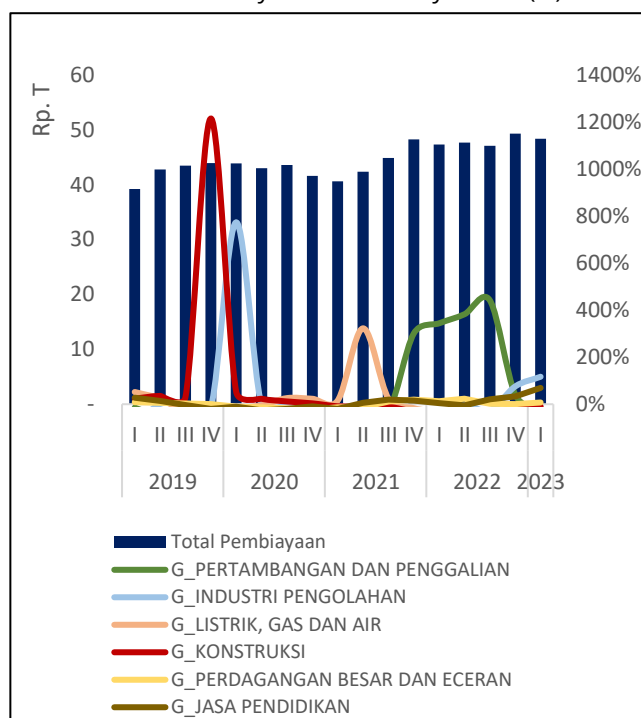
Proporsi KPR, KKB, dan Multiguna pada triwulan laporan secara berturut-turut sebesar 80,41%, 5,58%, dan 14,01%. Pada triwulan laporan, penyaluran KPR tercatat sebesar Rp3,7 Triliun, KKB sebesar Rp1,4 Triliun, dan multiguna sebesar Rp21,35 Triliun.

Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan dengan kembali normalnya konsumsi pasca pandemi dan dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen juga terjaga di zona optimis. Survei Konsumen yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis pada bulan Maret 2023. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 113,67.

4.2.3. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Didorong Oleh LU Industri Pengolahan.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan pembiayaan pada triwulan laporan didorong oleh tumbuhnya pembiayaan pada LU Industri pengolahan. Pada triwulan laporan, penyaluran pembiayaan LU Industri pengolahan tercatat sebesar Rp3,42 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 116,86% (yoy). Kenaikan penyaluran pembiayaan juga terjadi pada LU Jasa Pendidikan. Pada LU ini terjadi peningkatan sebesar sebesar 69,94% (yoy).

Grafik 4. 18 Penyaluran Pembiayaan LU (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara spasial, penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan di 5 Kota/kabupaten ini menjadi indikator bahwa penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh masih belum merata.

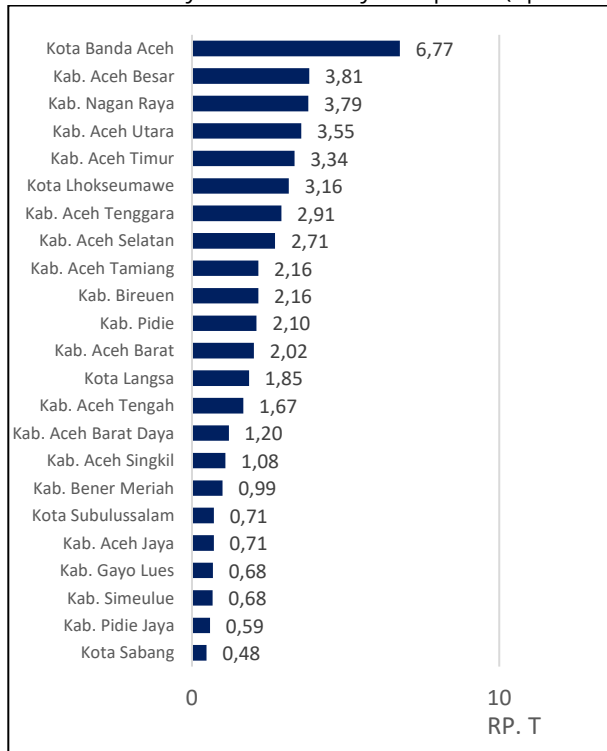
Pada triwulan I 2023, penyaluran pembiayaan paling banyak terdapat di Kota Banda Aceh sebesar Rp6,77 Triliun, Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp3,81 Triliun, Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp3,79 Triliun, Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp3,55 Triliun, dan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp3,34 Triliun. Total pembiayaan di 5 Kab/Kota tersebut mencapai Rp21,25 Triliun atau mencapai persentase 43,28% dari total pembiayaan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan penyaluran pembiayaan. Harapannya ke depan penyaluran pembiayaan di Aceh dapat merata dan mendorong sektor usaha produktif sehingga pada akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi Aceh.

Kualitas pembiayaan di Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 (berdasarkan lokasi proyek) masih terjaga meskipun terjadi peningkatan

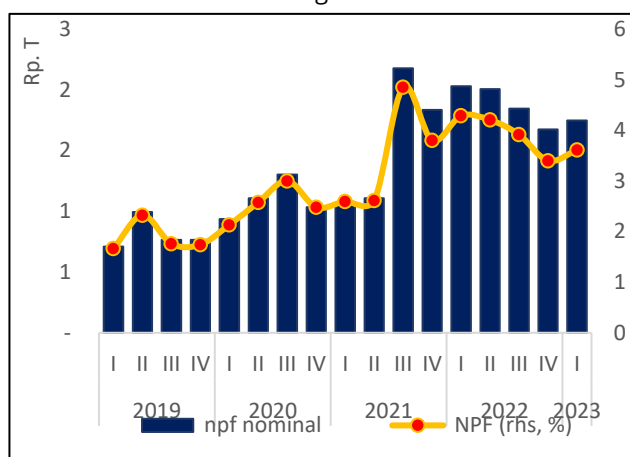
NPF. Rasio NPF pada triwulan laporan adalah sebesar 3,61%, atau masih dalam batas ambang aman.

Grafik 4. 19 Penyaluran Pembiayaan Spasial (Rp Triliun)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 20 Perkembangan NPF Perbankan Aceh

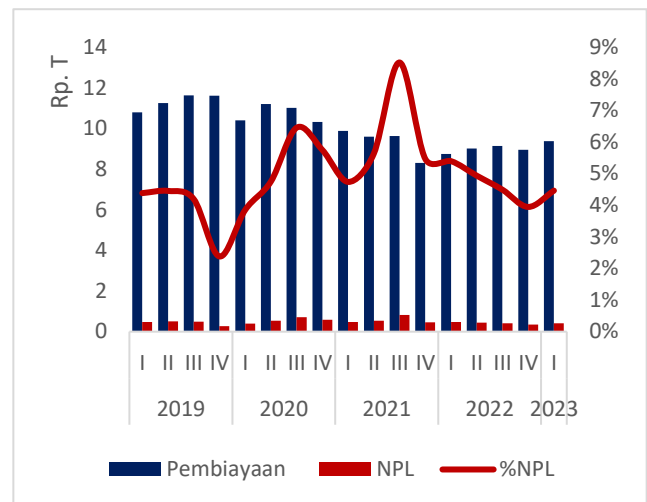


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.4. Penyaluran Pembiayaan Kepada UMKM Mulai Membaik

Penyaluran pembiayaan UMKM berdasarkan lokasi bank mengalami kenaikan sebesar 18,51%. Namun demikian jumlah kredit macet/*non-performing loan* meningkat dari sebesar 3,94% pada triwulan sebelumnya, menjadi 4,46% pada triwulan laporan.

Grafik 4. 21 Perkembangan Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

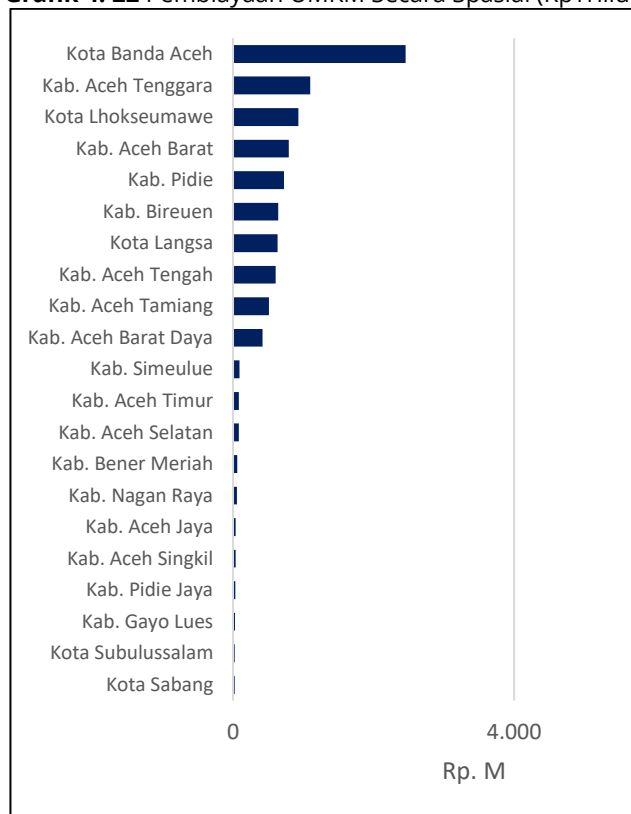
Penyaluran pembiayaan kepada UMKM di triwulan I 2023 mengalami peningkatan sebesar 18,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kenaikan di triwulan sebelumnya yang naik sebesar 7,81% (yoy). Nominal pembiayaan UMKM yang disalurkan pada triwulan I 2023 sebesar Rp938,09 Miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp894,99 Miliar. Secara umum penyaluran pembiayaan UMKM sudah mulai kembali membaik pasca pandemi Covid-19.

Secara spasial, penyaluran pembiayaan UMKM berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Hal tersebut terlihat dari terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mendominasi setengah dari total pembiayaan yang tersalurkan. Pada triwulan laporan ini 5 kab/kota dengan total pembiayaan UMKM terbesar antara lain kota Banda Aceh, Kab. Aceh Tenggara, Kota Lhokseumawe, Kab. Pidie, Kota Langsa, dan Kab. Aceh Tamiang.

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio*

sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional KPw Bank Indonesia juga turut mendorong UMKM dengan melaksanakan program pengembangan UMKM di masing-masing daerah baik melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, maupun klaster.

Grafik 4. 22 Pembiayaan UMKM Secara Spasial (RpTriliun)

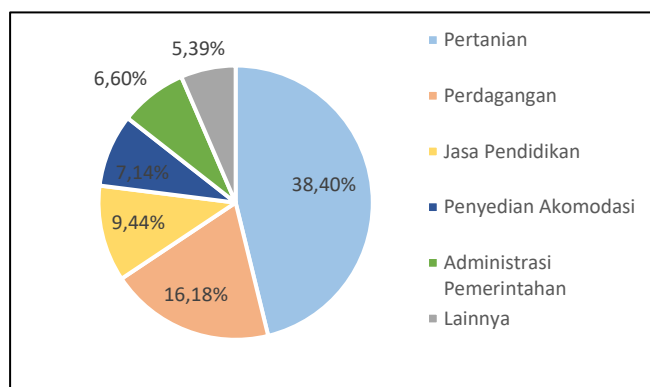


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.3. Kinerja Pembiayaan Rumah Tangga

4.3.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga

Grafik 4. 23 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (2022)



Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pada penyaluran pembiayaan kepada rumah tangga, sumber kerentanan terletak pada kinerja perekonomian, kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan. Penghasilan rumah tangga di Provinsi Aceh relatif belum terdiversifikasi. Hal tersebut tergambar dari jumlah tenaga kerja di Aceh yang mayoritas bekerja di lapangan usaha pertanian (38,40%). Sehingga, tekanan pada lapangan usaha tersebut mengakibatkan rumah tangga di Aceh terpapar risiko yang cukup tinggi di tahun 2023.

4.4. Langkah Peningkatan Akses Keuangan

4.4.1. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Sistem Keuangan di Aceh

Kerja sama antara Perbankan dengan penyedia jasa transaksi lintas negara melalui ATM seperti Visa/Mastercard baik sebagai issuer maupun acquirer perlu diakselerasi. Masih terbatasnya jaringan layanan Bank Syariah di Aceh yang terintegrasi dengan jaringan internasional menjadi isu tersendiri, terlebih lagi dengan mulai dibukanya pintu masuk wisatawan asing seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi. Solusi jangka pendek yaitu mendorong transaksi non tunai khususnya untuk wisatawan asing dengan memperbanyak EDC di *merchant* khususnya di kawasan wisata yang dapat melayani transaksi menggunakan kartu kredit/debit berlogo Visa/Mastercard.

4.4.2. Langkah KPw BI Provinsi Aceh dalam mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif guna meningkatkan roda perekonomian di Provinsi Aceh, Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Forum Percepatan Ekspor Produk UMKM Unggulan serta memfasilitasi kegiatan *business matching*.

Pada 18 Januari 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi

Percepatan Ekspor Aceh di Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan sosialisasi ini dikhususkan untuk menysasar pelaku UMKM, utamanya dari para petani dan eksportir kopi gayo. Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kebijakan dari Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, DJBC Kanwil Aceh, Stasiun Pertanian Kelas I Banda Aceh, dan Stasiun Karantina Ikan. Selain itu dari pihak BUMN yaitu PT Pos Indonesia (Persero) juga hadir sebagai perusahaan di sektor transportasi dan logistik. Harapan ke depan, peran PT Pos Indonesia (Persero) Aceh sebagai konsolidator ekspor dapat berjalan optimal. Selain itu, dengan dibukanya penerbangan di bandara Rembele di Kabupaten Rembele pada awal Januari 2023, diharapkan mampu mendorong kinerja ekspor Aceh khususnya yang berasal Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

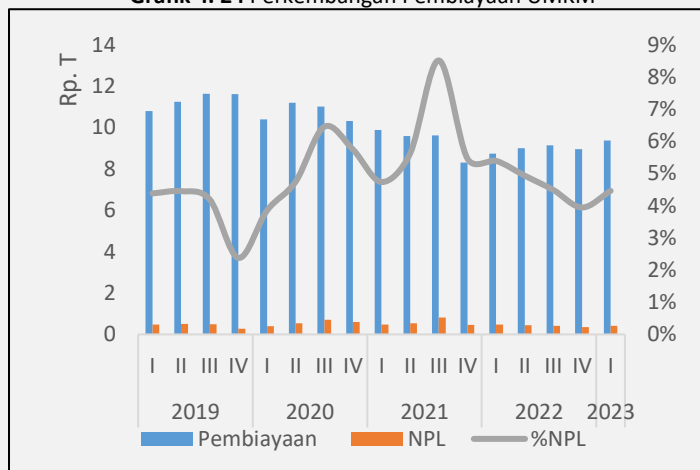
Kemudian, pada 20 Februari 2023 juga telah dilaksanakan kembali Forum Percepatan Ekspor Unggulan Aceh di Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan kurasi UMKM bersama dengan pemangku kebijakan yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bank Indonesia Provinsi Aceh, DJBC Kanwil Aceh dan dari sisi perbankan diwakili Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah. Pembiayaan terhadap UMKM potensial ekspor diharapkan dapat meningkatkan skala usaha dan mendorong perluasan akses pemasaran UMKM.

Bank Indonesia Terbitkan Kebijakan untuk Mendorong Pembiayaan pada Sektor Prioritas dan Inklusif

Bank Indonesia terbitkan peraturan mengenai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. Peraturan tersebut adalah PBI No.24/3/PBI/2022, yang menggantikan PBI No.23/13/PBI/2021. Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung upaya bersama pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perorangan berpenghasilan rendah (PBR). Dalam PBI No.24/3/PBI/2022 disebutkan bahwa RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya adalah sebesar 30%. Adapun jika rasio yang telah ditetapkan tidak tercapai maka perbankan wajib memenuhi Giro RPIM yang telah ditentukan dalam peraturan. Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2023 namun pemberlakuan sanksi baru akan dilakukan di tahun 2024.

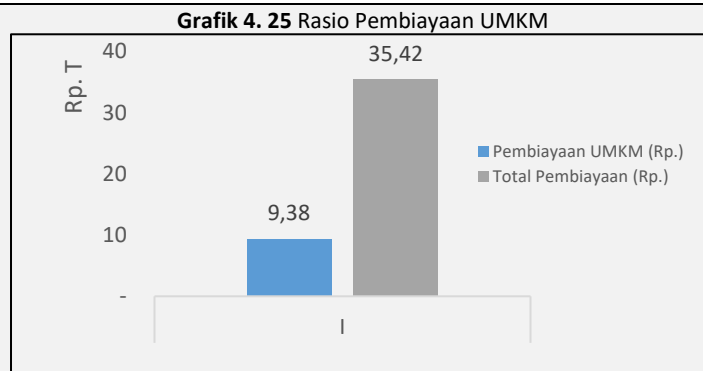
Dengan berlakunya sistem perbankan syariah berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, lembaga perbankan yang diperbolehkan di Aceh hanya perbankan syariah. Berikut di bawah ini adalah grafik perkembangan pembiayaan UMKM di Aceh dari tahun 2019 sampai dengan 2023 triwulan I. Pada triwulan I ini terjadi peningkatan pembiayaan UMKM sebesar 18,51% (yoy). Adapun rasio *non-performing loan* dengan jumlah pembiayaan UMKM adalah sebesar 4,46% di triwulan laporan.

Grafik 4. 24 Perkembangan Pembiayaan UMKM



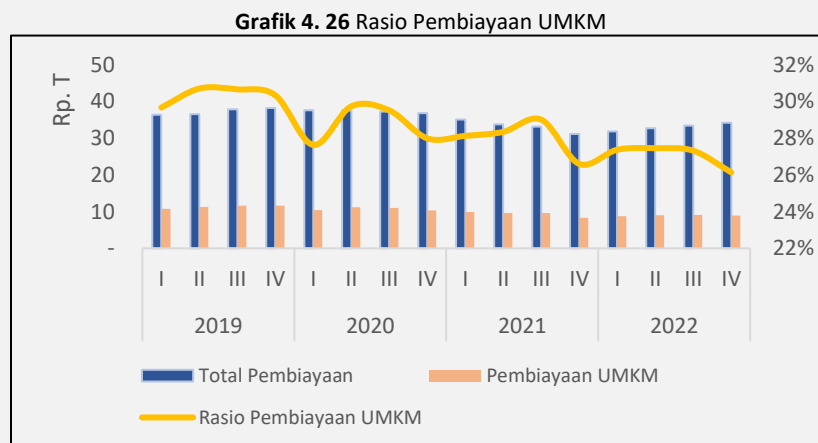
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Rasio pembiayaan UMKM pada triwulan I 2023 sebesar 26,48. Dari nilai rasio ini dapat dilihat bahwa tingkat inklusivitas pembiayaan di Aceh terus diperhatikan dan terus didorong ,



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Selain menerbitkan PBI Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, Bank Indonesia juga menerbitkan PBI Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi tertentu dan Inklusif, dan PADG Nomor 24/12/PADG/2022 tentang Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

PBI Nomor 24/5/PBI/2022 mengatur tentang pemberian insentif kepada perbankan yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dengan besaran insentif maksimal 1% (100 *basis points*). Insentif dapat diperoleh jika perbankan memberikan pembiayaan pada sektor prioritas dan mencapai nilai rata-rata pertumbuhan pembiayaan sektor prioritas paling sedikit 1%. Selain itu, insentif juga dapat diperoleh jika bank dapat memenuhi target RPIM yang telah tercantum dalam rencana bisnis bank dan mencapai nilai RPIM paling sedikit 10%.

Kinerja penyaluran pembiayaan adalah indikator intermediasi yang sepatutnya ditingkatkan. Penyaluran pembiayaan UMKM tentunya akan membantu perputaran perekonomian berjalan lebih cepat. Untuk itu, ke depan penyaluran pembiayaan UMKM dapat ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

--000--



BAB V

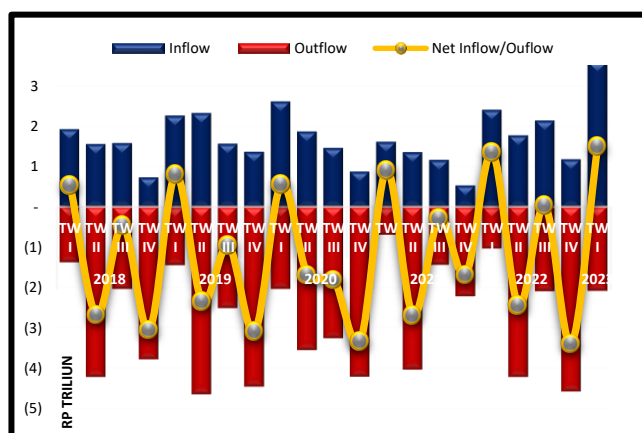
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Selama triwulan I 2023, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana terjadi *net inflow* pada triwulan laporan. Sejalan dengan hal tersebut, sistem pembayaran non tunai baik nilai besar maupun ritel mengalami penurunan, begitu juga dengan penggunaan kartu ATM/debit. Di sisi lain, penggunaan kartu kredit tumbuh positif pada triwulan laporan.

5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pada triwulan I 2023, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net inflow*¹. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net inflow* sebesar Rp1,5 triliun dengan total *inflow* sebesar Rp3,59 triliun dan total *outflow* sebesar Rp2,09 triliun (Grafik 5.1). Kondisi ini selaras dengan data historis 5 tahun terakhir yang menunjukkan *net inflow* selalu terjadi pada triwulan I. *Net inflow* pada triwulan laporan mengimplikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal lebih kecil dibandingkan masuknya uang kartal dari masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia. *Net inflow* pada triwulan laporan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya.

Grafik 5.1. Netflow Kas (Rp Triliun)



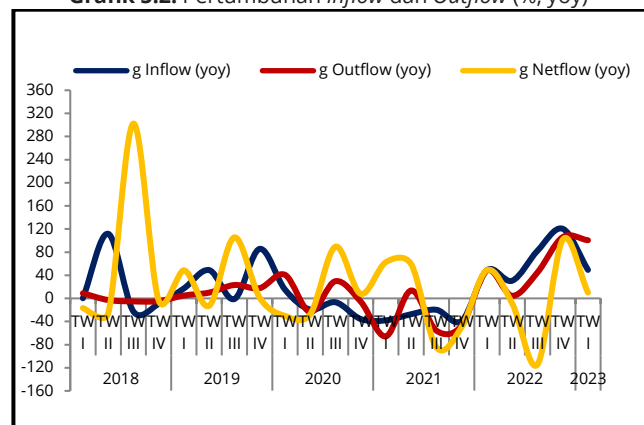
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara *year on year*, tingkat *inflow* pada triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 49,31% (yoy), sementara *outflow* tumbuh sebesar 100,54% (yoy) (Grafik 5.2). Nilai *Outflow* dan *Inflow* yang jauh meningkat dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya merupakan indikator yang menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2023 yang tetap tumbuh positif sebesar 5,03% (yoy) di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 juga tercatat tumbuh sebesar 4,63% (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat melalui berbagai layanan, salah satunya yaitu Kas Titipan. Kas Titipan

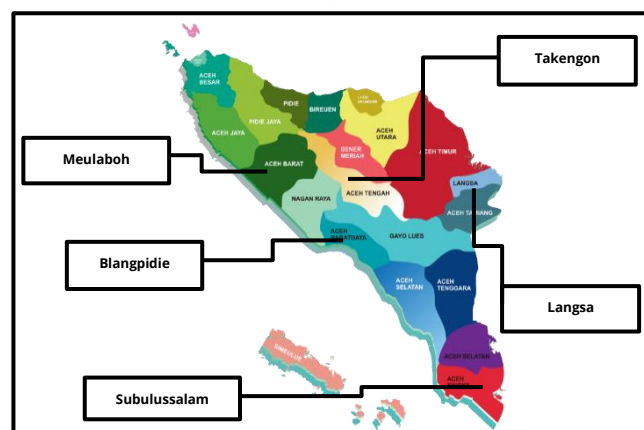
merupakan kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada kantor Bank Umum untuk mencukupi persediaan kas Perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

Grafik 5.2. Pertumbuhan *Inflow* dan *Outflow* (% ,yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar 5.3. Kas Titipan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) Kas Titipan di Provinsi Aceh yaitu di Blangpidie, Meulaboh, Subulussalam, Takengon, dan Langsa. Namun beberapa Kas Titipan mengalami penutupan pada triwulan IV tahun 2020, yaitu di Meulaboh (ditutup November 2020), Takengon (ditutup November 2020), Langsa (ditutup Desember 2020), dan Blangpidie (ditutup Desember 2020). Penutupan tersebut dikarenakan adanya proses konsolidasi dan transisi Bank Pengelola Kas Titipan sehubungan dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan Perbankan yang beroperasi di Aceh seluruhnya harus berbentuk syariah, dengan masa transisi paling lama tiga tahun atau hingga tahun 2021. Setelah melalui masa transisi, terdapat beberapa Kas Titipan yang kembali dibuka pada tahun 2021, yaitu Kas Titipan Blangpidie yang kembali

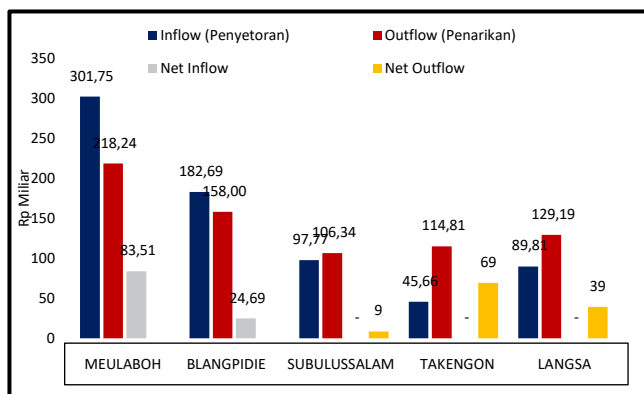
¹ Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih besar dari aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

beroperasi pada Agustus 2021 dan Kas Titipan Takengon pada November 2021. Selain itu, kas titipan di Meulaboh dan Langsa juga dibuka kembali (*relaunching*) pada April 2022.

Secara agregat, Kas Titipan di Provinsi Aceh pada triwulan laporan mengalami *net outflow* sebesar Rp8,89 miliar (Grafik 5.5). Jumlah tersebut berasal dari lima Kas Titipan di Meulaboh, Subulussalam, Blangpidie, Takengon, dan Langsa. Aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) sebesar Rp717,69 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 228,08% (yoy). Di sisi lain, *outflow* tercatat sebesar Rp726,58 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 261,51% (yoy).

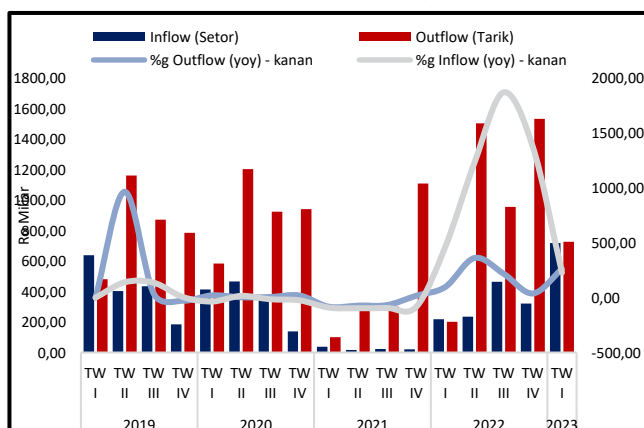
Temuan uang yang diragukan keasliannya (palsu) pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah temuan pada triwulan I 2023 sebanyak 6 (enam) lembar, jauh menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 65 (enam puluh lima) lembar (Grafik 5.6). Adapun temuan uang palsu tersebut berasal dari penukaran dan hasil pengolahan. Sementara jika ditinjau dari sisi pecahan, uang Rupiah dengan pecahan Rp100.000,- dan Rp20.000,- menjadi pecahan yang mendominasi hasil temuan.

Grafik 5.4. Transaksi *Inflow Outflow* per Kas Titipan Triwulan I 2023



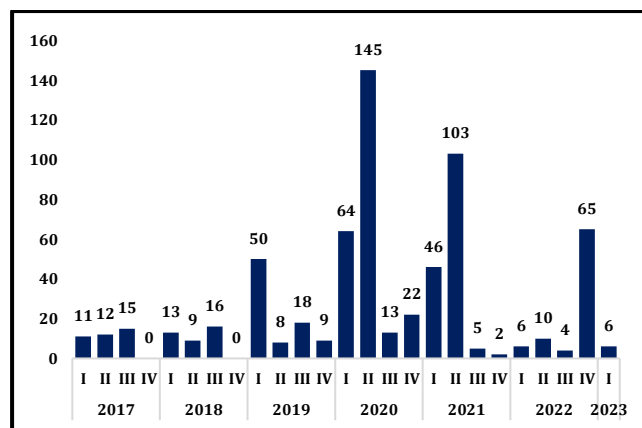
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5. Total Transaksi Kas Titipan Triwulanan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6. Temuan Uang Palsu (Lembar)



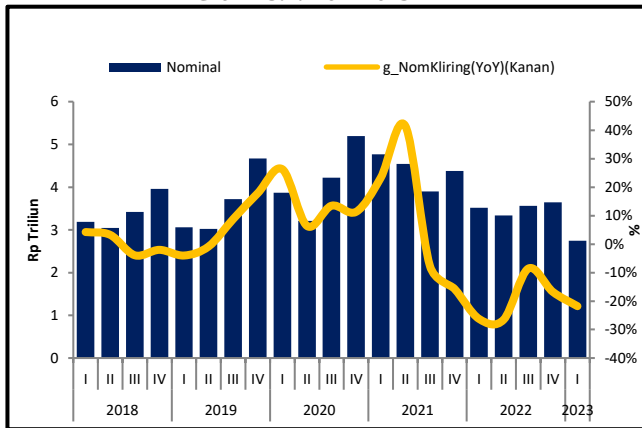
Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri tercatat mengalami pertumbuhan secara agregat yang tercermin dari peningkatan nominal transaksi instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Tren peningkatan tersebut juga terjadi pada penggunaan instrumen Uang Elektronik baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh. Secara umum, sistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

Memasuki triwulan I tahun 2023, transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya transisi pengguna sistem pembayaran ritel yang beralih menggunakan BI-FAST. Pada triwulan laporan, nilai penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI tercatat sebesar Rp2,75 triliun atau turun sebesar 24,61% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp3,65 triliun. Sedangkan secara tahunan, nominal transaksi menurun sebesar 21,80% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,51 triliun (Grafik 5.7).

Grafik 5.7. Nominal SKNBI

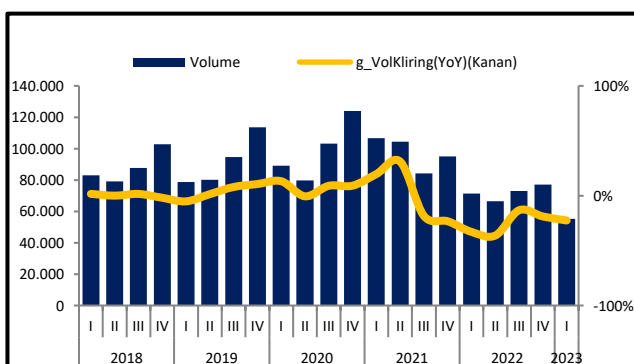


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 55.337 Data Keuangan Elektronik (DKE) atau turun sebesar 28,24% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2022 yang tercatat sebanyak 77.114 (Grafik 5.8). Sementara itu secara tahunan, volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan juga tercatat mengalami penurunan sebesar 22,55% (yoy) bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

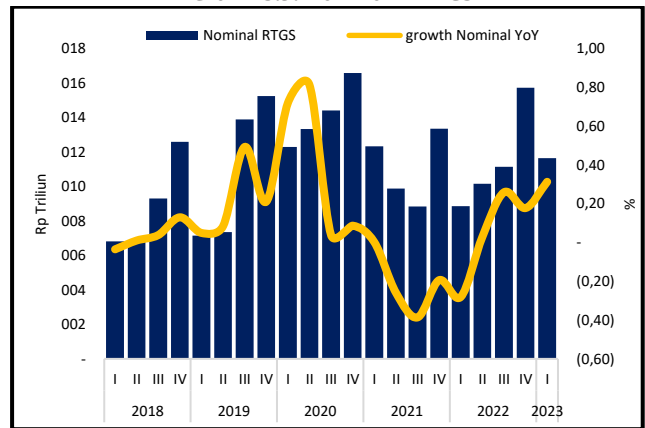
Sementara itu, perkembangan sistem pembayaran nilai besar tercermin dalam perkembangan data *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Pada periode laporan, transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp11,64 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 31,32% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 5.9). Sementara jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan turun sebesar 26,04% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp15,74 triliun. Namun hal ini sejalan dengan pola historis pada tahun sebelumnya yang mencatatkan nominal transaksi BI-RTGS pada awal tahun yang lebih rendah jika dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya.

Grafik 5.8. Volume SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.9. Nominal BI-RTGS

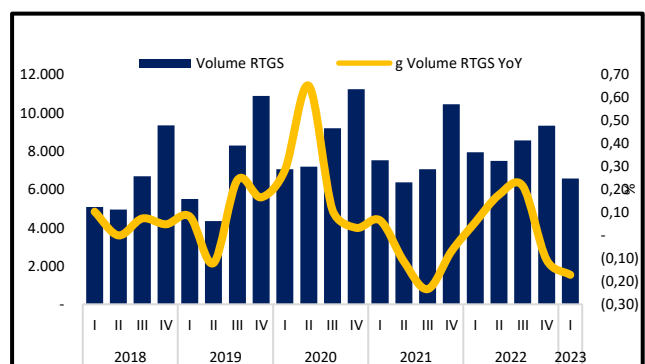


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi, BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebanyak 6.566 transaksi, mengalami penurunan sebesar 29,59% dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 9.325 transaksi (Grafik 5.10). Sementara itu secara tahunan, volume transaksi BI-RTGS tercatat turun sebesar 17,20% dibanding triwulan I tahun 2022 yang mencapai 7.930 transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai transfer pada periode laporan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, mengingat meskipun secara volume transaksi menurun namun secara nominal jauh meningkat.

Perkembangan transaksi nilai besar melalui BI-RTGS maupun ritel melalui SKNBI secara agregat tahunan mengalami penurunan di triwulan I 2023 jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Sesuai pola historisnya, penurunan tersebut diperkirakan terjadi karena masih belum banyaknya realisasi belanja fiskal oleh pemerintah daerah dan belanja korporasi pada awal tahun anggaran. Di samping itu, penurunan jumlah dan volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan secara yoy diperkirakan karena terjadinya *user shifting* pasca implementasi BI-FAST² oleh Bank Indonesia sejak Desember 2021.

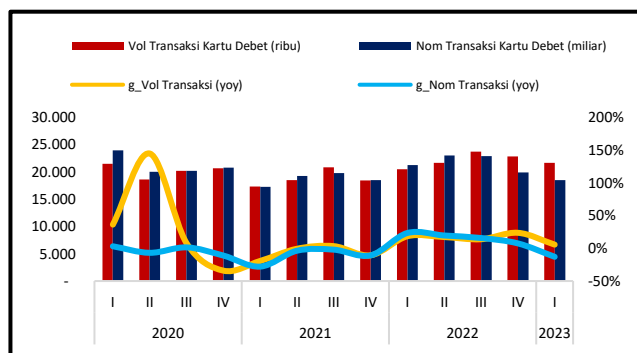
Grafik 5.10. Volume BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

² BI-FAST adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7) yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan Sistem Pembayaran Ritel nasional dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran nasional eksisting.

Grafik 5.11. Transaksi ATM Debit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, transaksi non tunai menggunakan APMK baik kartu kredit, kartu ATM/debit, dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami perkembangan. Perkembangan transaksi kartu ATM/debit, kartu kredit dan Uang Elektronik menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi kartu ATM/debit, volume transaksi pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,62% (yoy) menjadi 21,630 juta transaksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 5.11). Sementara nominal transaksi ATM/debit tercatat sebesar Rp18,50 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 13,00% (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kartu ATM/debit mayoritas digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas tarik tunai dengan nominal transaksi sebanyak Rp10,69 triliun (57,82%).

Sementara itu dari sisi kartu kredit, volume transaksi mengalami peningkatan sebesar 34,11% (yoy) dari 98.320 transaksi pada triwulan I 2022 menjadi 131.840 transaksi pada triwulan I 2023 (Grafik 5.12). Secara nominal, transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp141,28 miliar, atau meningkat sebesar 60,29% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp88,14 miliar.

Pertumbuhan transaksi kartu kredit pada triwulan laporan yang mengalami ekspansi dari triwulan sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan peningkatan konsumsi di masyarakat. Selama triwulan I 2023, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp135,78 miliar atau 96,11% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 127.462 transaksi atau 96,67% dari total volume transaksi.

Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan I 2023 mencapai Rp705,19 miliar, atau

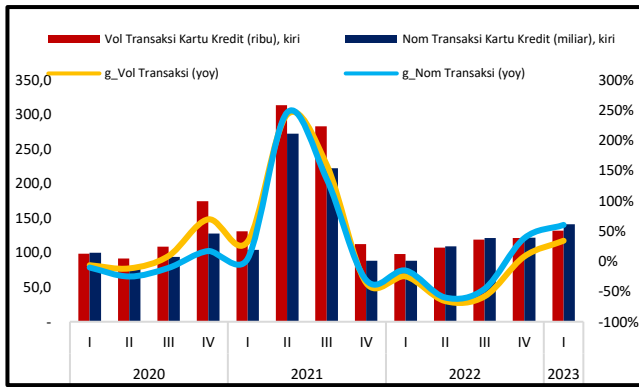
meningkat sebesar 14,91% (yoy). Sementara volume transaksi UE mengalami sedikit penurunan sebesar 2,33% (yoy) atau sebanyak 5,23 juta transaksi selama triwulan I 2023 (Grafik 5.13). Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce* selama masa pandemi. Selama triwulan I 2023, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp418,40 miliar atau 59,33% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 3,80 juta transaksi atau 72,76% dari total volume transaksi.

Transaksi uang elektronik berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless* untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Hingga triwulan I 2023, terdapat 108.778 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.14). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 40,7% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 76.253 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 5,1% (qoq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 102.103 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 77.019 *merchant* (70,80%).

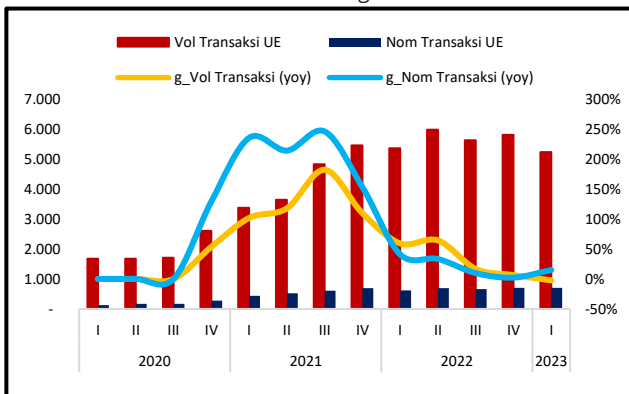
Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan I 2023 telah terdapat 311.828 pengguna atau bertambah sebanyak 30.437 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan I 2023 terdapat 1.786.606 transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp259 miliar.

Grafik 5.12. Transaksi Kartu Kredit



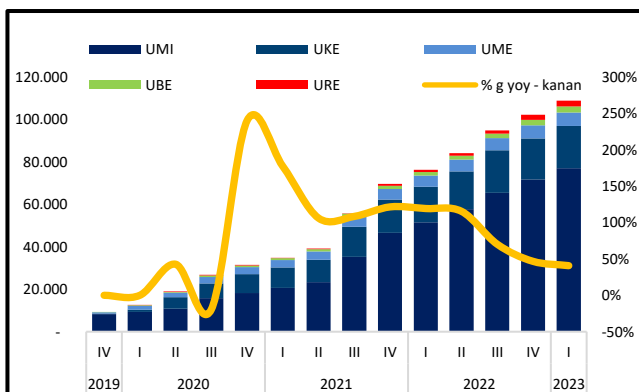
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13. Perkembangan Transaksi UE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14. Pertumbuhan Merchant QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (valas).

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan valas yang sehat, profesional, dan menerapkan

prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Hingga triwulan I 2023, terdapat 16 (enam belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 8 (delapan) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

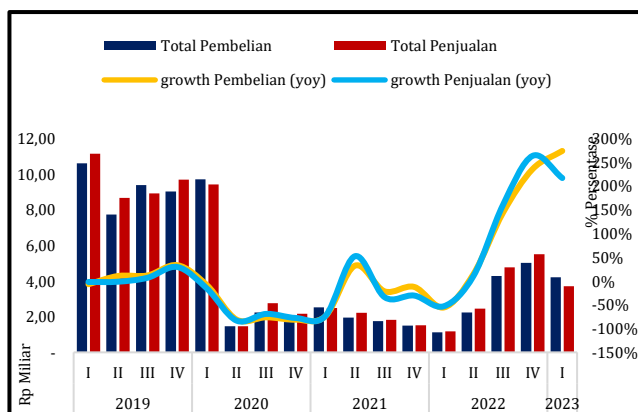
Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan meningkat sebesar 244,98% (yoy) menjadi Rp7,93 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,30 miliar.

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 274,07% (yoy) menjadi Rp4,21 miliar dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,13 miliar. Sementara penjualan UKA pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan sebesar 217,02% (yoy) menjadi Rp3,71 miliar dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,17 miliar (Grafik 5.15).

Pada tanggal 29 September 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* (VoA) yang menjadi pertanda akan kembali dibukanya penerbangan Internasional. Sebelumnya dalam menyelenggarakan VoA di seluruh wilayah Indonesia Kementerian Hukum & HAM hanya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi pasca qanun LKS yang diterapkan di provinsi Aceh mengakibatkan BRI tidak lagi dapat memberikan layanan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh. Kesiapan mekanisme VoA di Bandara SIM tentu akan memperlancar proses perizinan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Aceh.

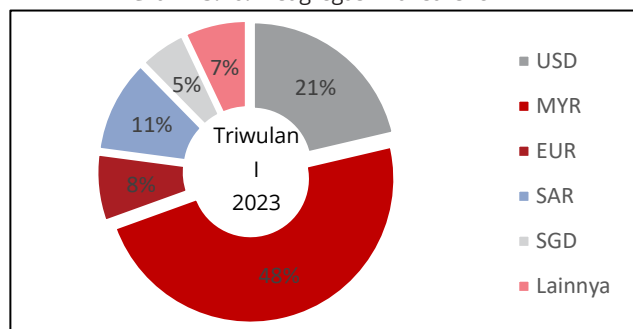
Sejalan dengan telah dibukanya VoA di Bandara SIM, saat ini telah terdapat 3 maskapai penerbangan yang membuka rute internasionalnya di Aceh. Air Asia menjadi maskapai pertama yang membuka rute internasional pasca pandemi COVID 19. Pada 3 Oktober 2022 Air Asia resmi membuka kembali rute Aceh – Kuala Lumpur, dan disusul oleh Batik Air dan Fire Fly yang membuka rute Aceh – Penang. Dan saat ini rute Air Asia dari/ke Kuala Lumpur telah terbang secara reguler setiap harinya.

Grafik 5.15. Transaksi KUPVA BB



Sumber: LKPBU, diolah

Grafik 5.16. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Ke depannya transaksi penukaran UKA diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan dibuka kembalinya penerbangan Internasional oleh beberapa maskapai penerbangan internasional.

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 48% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 21% (Grafik 5.16). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Di samping itu, Bank Indonesia telah melaksanakan kegiatan pemantauan langsung guna melakukan penertiban dan edukasi kepada para pedagang valuta asing yang tidak berizin selama tahun 2022. Sebanyak 2 (dua) pedagang valuta asing tidak berizin telah diberikan teguran dan edukasi atas kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk terus mendorong masyarakat yang ingin menjalankan usaha penukaran valuta asing agar terlebih dahulu mengajukan proses perizinan ke Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyelenggarakan *capacity building* kepada seluruh pedagang valuta asing berizin di Provinsi Aceh. Tujuan

dari *capacity building* ini adalah agar seluruh pedagang valuta asing dapat lebih memahami potensi penyalahgunaan valuta asing baik sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme sekaligus menjalankan langkah mitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan melalui Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan memahami secara lebih dalam terkait risiko yang ada dan bagaimana mekanisme pelaporannya, diharapkan kewaspadaan setiap pedagang valuta asing akan lebih meningkat utamanya mengenai profil *customer*.

5.4. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana setiap masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan mendukung pasar keuangan yang semakin dalam dan bervariasi, sehingga dapat menurunkan risiko sistemik dan kerentanan terhadap gejolak (*shock*) dalam perekonomian.

Inklusi keuangan juga mampu berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengakses produk dan jasa keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi yang berujung pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Guna mendukung percepatan peningkatan inklusi keuangan, maka kehadiran lembaga keuangan formal di seluruh daerah di Aceh merupakan hal yang harus diperhatikan. Layanan lembaga keuangan formal dimaksud terdiri dari layanan perbankan termasuk ketersediaan mesin ATM dan agen bank serta layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti pegadaian, asuransi, koperasi dan lembaga pembiayaan.

Untuk mendukung inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi, berbagai kebijakan stimulus pemerintah terus diberikan baik dari sisi fiskal maupun moneter dengan harapan mampu menjadi sentimen positif untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dari sisi fiskal, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan melanjutkan program bantuan sosial.

Selain itu, Bank Indonesia juga turut berperan aktif pada proses penyaluran implementasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dan Program Elektronifikasi Pembayaran untuk mendorong inklusi keuangan digital. Peranan Bank

Indonesia dalam Program BSNT yang terdiri atas Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mendukung kelancaran penyaluran bantuan secara non tunai. Dukungan diwujudkan dengan menyediakan infrastruktur, sistem, dan mekanisme pembayaran bantuan sosial. Di sisi lain, Bank Indonesia berupaya mendorong masyarakat untuk bermigrasi menggunakan sarana pembayaran non tunai dengan melakukan percepatan elektronifikasi sistem pembayaran di daerah baik yang sifatnya *People to Government (P to G)*, *Government to People (G to P)*, *People to People (P to P)*, dan *Government to Government (G to G)*.

5.5. Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran BSNT, Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

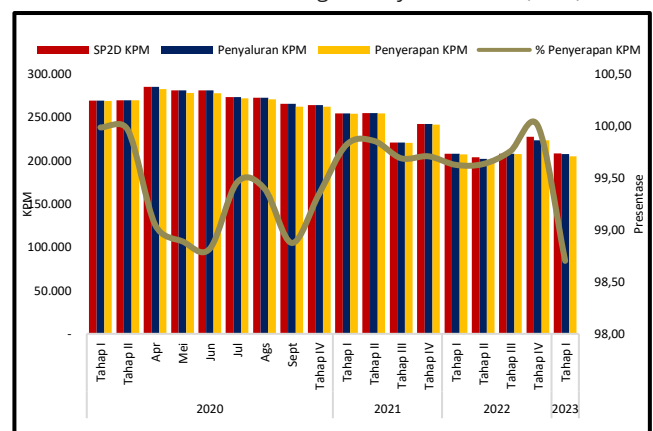
PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap I tahun 2023 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 99,73% kepada KPM (Grafik 5.17). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap I tercatat sebanyak 204.734 atau

telah mencapai 98,70% dari target jumlah penerima sebanyak 207.429 KPM.

Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada triwulan I 2023, nominal bantuan yang disalurkan pada Tahap I 2023 sebesar Rp155,25 miliar dengan persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 99,73% (Grafik 5.18). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yaitu Rp170,25 miliar.

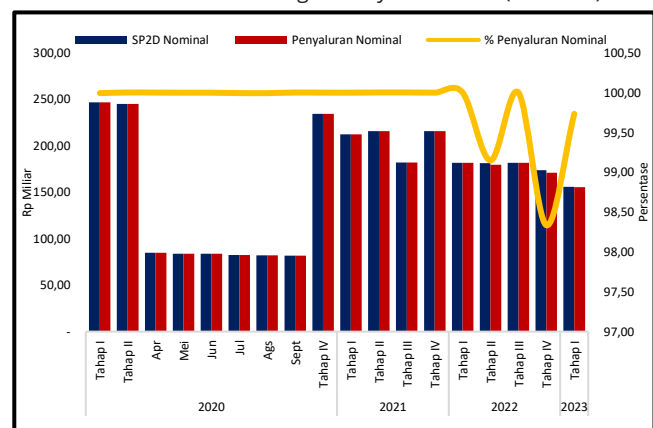
Sementara itu, penyaluran bantuan Program Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat terbatas penanggulangan pandemi COVID-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000/bulan/KPM hingga triwulan laporan. Dalam rangka membantu meringankan dampak pandemi COVID-19, pada bulan Desember 2021 Pemerintah memberikan tambahan 2 (dua) bulan bantuan Program Sembako. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.

Grafik 5.17. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



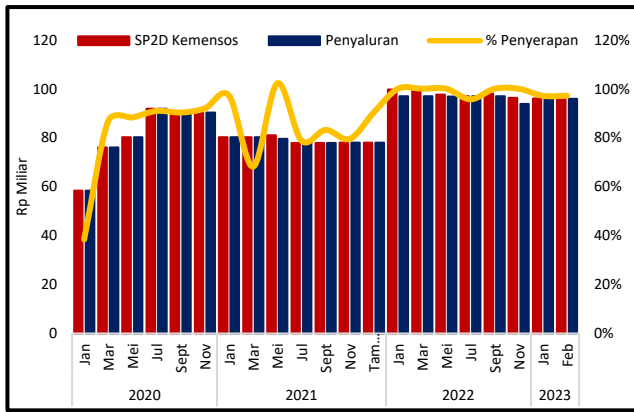
Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.18. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



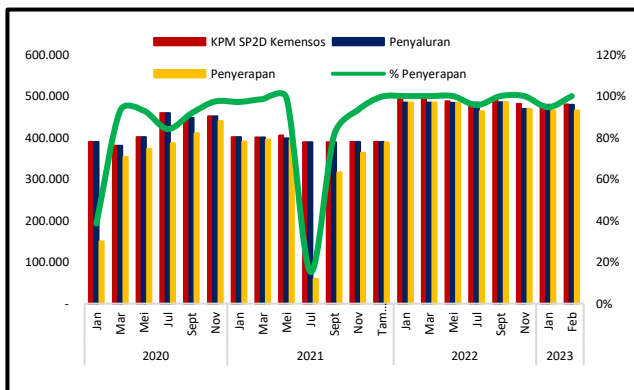
Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.19. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.20. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Sesuai hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) 17 Februari 2022 sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) 15 Februari 2022, seluruh penyaluran Program Sembako disalurkan melalui PT Pos secara tunai/cash khususnya untuk penyaluran Januari hingga Maret 2022 yang dimulai dari Februari 2022 dan disalurkan 3 (tiga) bulan sekaligus per KPM. Untuk penyaluran bulan berikutnya, pihak penyalur akan dievaluasi dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kemenko PMK dan Kemensos. Sementara untuk tahun 2023 bantuan sembako disalurkan melalui BSI dan POS dengan proporsi BSI sebesar 96,90%.

Sementara itu, jumlah KPM program sembako mengalami penurunan menjadi 480 ribu KPM dari jumlah KPM posisi Desember 2022 sebanyak 481 ribu KPM (Grafik 5.20).

5.6. Elektronifikasi Sistem Pembayaran

Elektronifikasi sistem pembayaran merupakan serangkaian upaya untuk mengubah pembayaran yang dilakukan secara tunai menjadi non tunai. Elektronifikasi menjadi bagian program strategis Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik agar mampu meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis sekaligus mendukung

percepatan ekonomi digital di Indonesia.

Sasaran utama program elektronifikasi adalah penciptaan ekosistem non tunai yang terintegrasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah, transaksi pembayaran ritel dan nilai besar, transaksi fasilitas dan transportasi umum, serta elektronifikasi di destinasi pariwisata. Instrumen yang dapat digunakan meliputi Uang Elektronik (*server* dan *chip based*), kartu kredit, dan kartu ATM/debit.

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat dan *stakeholders* terhadap berbagai fitur pembayaran non tunai, khususnya melalui kanal QRIS. Meulaboh Digital Festival merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh. Pada kegiatan tersebut Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Komunitas UMKM menyelenggarakan kampanye penggunaan QRIS yang dikemas dengan kegiatan QRIS *Fun Walk*, *showcase* UMKM QRIS, sosialisasi dan edukasi, *user experience*, dan hiburan.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan *launching* Pasar SIAP QRIS yang terdapat di Meulaboh, yaitu Pasar Bina Usaha. Program ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Perbankan, dan Diskopukmdag Kab. Aceh Barat melalui UPTD Pasar dalam melaksanakan elektronifikasi pada sendi sendi ekonomi masyarakat. Dengan adanya pasar SIAP QRIS kini seluruh pengunjung pasar memiliki alternatif metode pembayaran non tunai.

Dari sektor pendidikan, sosialisasi kepada mahasiswa dilaksanakan melalui kegiatan Bincang Bincang Mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat dipandang memiliki peran penting dalam meningkatkan digitalisasi pembayaran. Kegiatan ini juga mengedepankan para mahasiswa untuk mencoba dan menggunakan QRIS mulai dari registrasi, penukaran kupon, hingga diskon belanja yang diberikan.

Seluruh kegiatan di atas merupakan langkah proaktif Bank Indonesia bersinergi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk memfasilitasi pelaku UMKM ataupun *stakeholders* lainnya dalam rangka meningkatkan *supply side* QRIS melalui akuisisi *merchant* QRIS. Di samping itu, Bank Indonesia bersama Perbankan dan Pemda juga terus melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan *user experience* masyarakat dalam menggunakan QRIS sehingga *demand side* masyarakat untuk menggunakan QRIS juga terus bertumbuh.

Bank Indonesia juga secara proaktif melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten terkait dengan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Diharapkan pembentukan TP2DD akan menjadi katalis di daerah untuk mendorong perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum, termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.

Dari sisi infrastruktur jaringan telekomunikasi yang menjadi faktor penting dalam program elektronifikasi, masih terdapat beberapa daerah yang masuk dalam area titik buta (*blankspot area*) yang belum terjangkau teknologi informasi, sehingga pemanfaatan kanal pembayaran masih sangat terbatas. Ke depan, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah serta PJP akan terus melakukan upaya konkret dan terkoordinasi untuk mewujudkan elektronifikasi sistem pembayaran yang terintegrasi sesuai dengan wewenang masing-masing instansi. Di sisi elektronifikasi sistem pembayaran ritel masyarakat umum, Bank Indonesia akan terus mendorong digitalisasi transaksi melalui penggunaan instrumen UE dan APMK serta kanal pembayaran QRIS melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan program *on-boarding*.



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun berbanding terbalik pada aspek kemiskinan yang menunjukkan peningkatan persentase. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada pada urutan keempat, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2023 tercatat 5,75%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,97%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,12%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,15%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu perekonomian. Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja dengan persentase terbesar dari Lapangan usaha (LU) yang mengalami peningkatan adalah sektor Jasa dan Lainnya, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.

Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



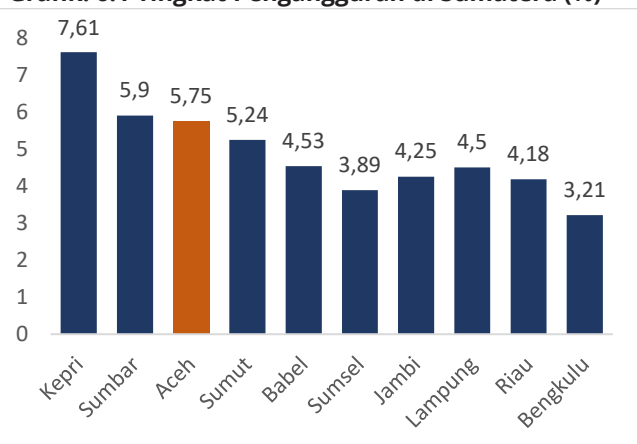
TINGKAT PENGANGGURAN %

Februari 2022	5,97
Februari 2023	5,75

Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang disertai dengan peningkatan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja yaitu 2.5 juta orang (65,12%).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan ketenagakerjaan yang tercermin dari ketersediaan lapangan kerja cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut tercermin dari hasil *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 yang menunjukkan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja secara agregat. Hal tersebut sejalan dengan survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen terhadap tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan dibandingkan periode sebelumnya.

Ke depannya, diperkirakan indeks keyakinan konsumen akan Ketersediaan Lapangan Kerja terus membaik dikarenakan perbaikan ekonomi dan mobilisasi pasca Pandemi Covid-19.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2022	2023
	Februari	Februari
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.365	2.450
Pengangguran	150	149
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	64,15	65,12
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	5,75	5,97

Sumber: BPS, diolah

Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar yaitu masing-masing 37,47% dan 15,89%. Selanjutnya sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 10,03% yang diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 6,53%. Penyerapan tenaga kerja terbesar kelima yaitu pada sektor Pendidikan (5,95%).

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Februari 2023 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	37,47
Perdagangan Besar & Eceran	15,89
Industri Pengolahan	10,03
Konstruksi	6,53
Jasa Pendidikan	5,95
Administrasi Pemerintahan	5,53
Akomodasi dan Makan Minum	5,00
Jasa Lainnya	4,03

Sumber: BPS, diolah

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 32,25%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Sekolah Dasar ke Bawah sebesar 29,58%, Diploma I/II/III sebesar 2,78% dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,06%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2022.

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Februari 2022	Februari 2023
Sekolah Menengah Atas	31,47	32,25
Sekolah Dasar ke Bawah	29,16	29,58
Sekolah Menengah Pertama	21,00	20,06
Diploma IV, S1, S2, S3	10,18	11,06
Sekolah Menengah Kejuruan	4,85	4,26
Diploma I/II/III	3,35	2,78

Sumber: BPS, diolah

Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan didominasi status pekerjaan Buruh/Karyawan/Pegawai dengan porsi sebesar 30,44%. Sementara itu, status pekerjaan dengan porsi terkecil yaitu berstatus Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 4,05%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan

buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada Februari 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 65,50%, sedangkan kegiatan formal sebanyak 34,50%, di mana keduanya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dibandingkan Februari 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 4,62%.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Februari 2022	Februari 2023
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	34,99	30,44
Berusaha Sendiri	22,55	23,72
Pekerja Keluarga	13,32	16,40
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	16,03	15,40
Pekerja bebas di nonpertanian	4,32	5,58
Pekerja bebas di pertanian	4,66	4,41
Berusaha dibantu buruh tetap	4,13	4,05

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ (NTP) pada akhir triwulan I 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2023, NTP tercatat sebesar 113,07 atau mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 110,18. Kenaikan nilai NTP dibanding triwulan sebelumnya menunjukkan adanya penguatan tingkat daya beli petani. Nilai yang melampaui 100 pada periode laporan menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor gabungan Pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 111,18 atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 109,04. NTUP menggambarkan kerugian yang diperoleh Petani dari selisih antara indeks harga pengeluaran yang terkait dengan keperluan produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) dengan indeks

⁴ Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

harga yang diterimanya. NTUP di atas 100 menunjukkan bahwa petani berada dalam posisi surplus.

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani



NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Triwulan IV 2022	110,18
Triwulan I 2023	113,07 

Sumber: BPS, diolah

6.2. Kemiskinan

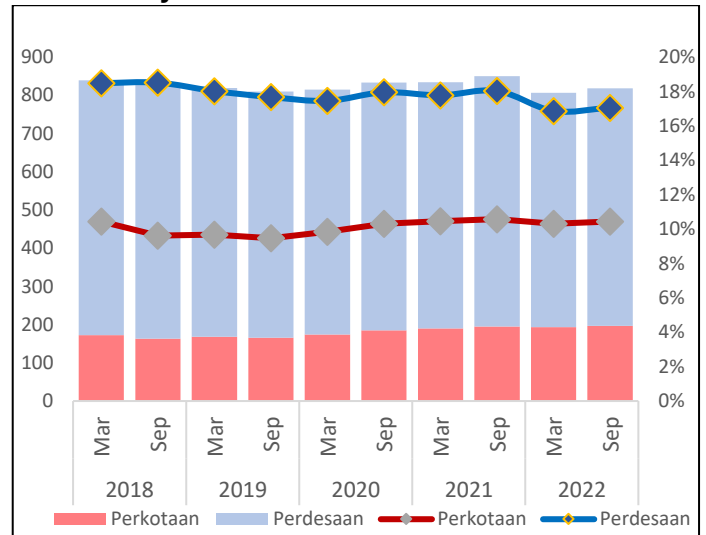
Berdasarkan data terakhir, persentase kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 14,75%, mengalami peningkatan dibandingkan semester sebelumnya yakni Maret 2022 sebesar 14,64%. Peningkatan persentase penduduk miskin didorong oleh peningkatan baik di perdesaan maupun perkotaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan meningkat masing-masing dari 16,87% dan 10,31% pada periode sebelumnya, menjadi 17,06% dan 10,35% pada periode laporan.

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada posisi September 2022 sebanyak 818,47 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 850,26 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perdesaan menurun sebesar 5,08% (yoy) dari sebelumnya 654,79 ribu jiwa pada September 2021 menjadi 621,52 ribu jiwa pada September 2022. Sementara itu, kuantitas penduduk miskin di perkotaan tercatat sedikit meningkat sebesar 0,76% (yoy), dari sebelumnya 195,47 ribu jiwa pada September 2021 menjadi 196,95 ribu jiwa pada September 2022.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh semakin membaik, perlahan meningkatkan optimisme pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil survei konsumen Bank Indonesia per Januari 2023, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih berada di atas 100, yang mengindikasikan masyarakat optimis akan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di saat ini.

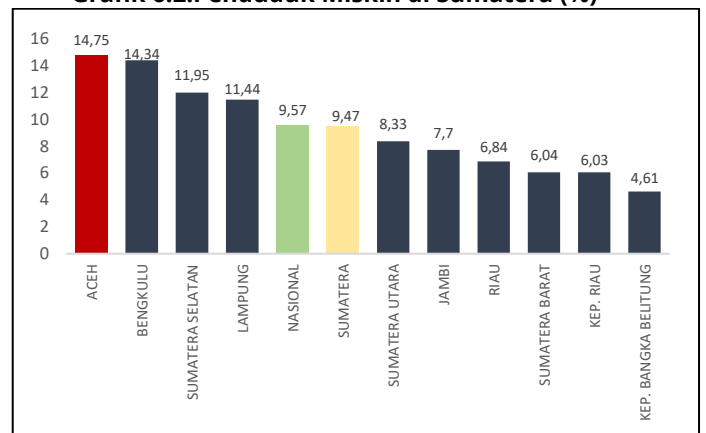
Data tingkat kemiskinan pada September 2022 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dengan porsi sebesar 14,75%. Persentase ini bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera (9,47%) dan Nasional (9,57%).

Grafik 6. 1. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.2. Penduduk Miskin di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Peningkatan persentase kemiskinan juga turut mempengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil survei di Provinsi Aceh, pada periode Maret 2022 – September 2022, garis kemiskinan mengalami perubahan sebesar 6,57% sehingga pendapatan per kapita perbulan menjadi Rp617.293,- dari sebelumnya sebesar Rp579.227,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap Nilai Garis Kemiskinan baik di Perkotaan maupun Perdesaan yakni sebesar Rp468.255,- per

kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp149.038,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan sebesar 74,47% di perkotaan dan 76,65% di perdesaan yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna, telur ayam ras, dan kue basah. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 25,53% di perkotaan dan 23,35% di perdesaan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan yaitu seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut dengan P1 dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan P2.

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya (P2)

Kemiskinan		
KEMISKINAN (%)		
SEPTEMBER 2021	15,53	▼
SEPTEMBER 2022	14,75	
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)		
SEPTEMBER 2021	2,95	▼
SEPTEMBER 2022	2,89	
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)		
SEPTEMBER 2021	0,81	▼
SEPTEMBER 2022	0,78	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode September 2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). P1 mengalami penurunan dari 2,95% pada September 2021 menjadi 2,89% pada September 2022. Begitu pula dengan P2 yang mengalami penurunan setelah sebelumnya 0,81%

pada September 2021 menjadi 0,78% pada September 2022. Turunnya nilai Indeks Kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

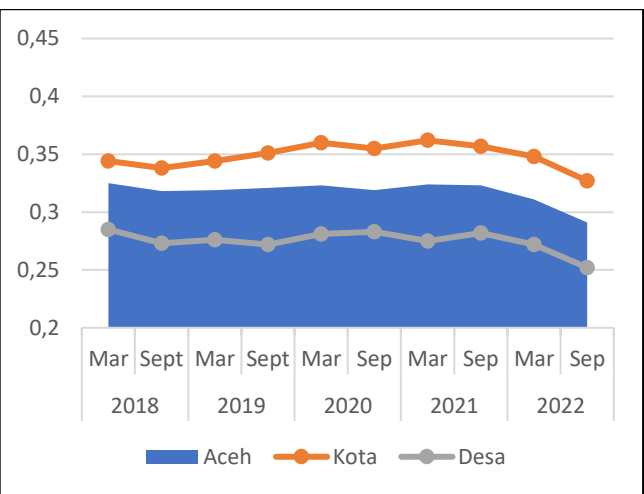
Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

Daerah	2021		2022	
	SEPTEMBER		SEPTEMBER	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,70	0,44	2,13	0,56
Perdesaan	3,59	0,99	3,29	0,89
Gabungan	2,95	0,81	2,89	0,78

Sumber: Data BPS, diolah

Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada September 2022 sebesar 0,327, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,252. Terjadi penurunan rasio di perkotaan dan perdesaan pada periode September 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut mendorong secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi sebesar 0,291 pada September 2022 dari sebesar 0,323 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 6. 3. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah

⁵Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1.Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 3,75%-4,25%(yoy) atau berpotensi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (4,21%, yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kinerja ekspor luar negeri yang diperkirakan termoderasi setelah tumbuh tinggi pada periode-periode sebelumnya. Laju inflasi tahun 2023 diperkirakan berada di dalam sasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$, dengan perkiraan perlambatan inflasi pada bahan-bahan makanan.

7.1. Prospek Makroekonomi

Kinerja pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh positif meskipun dengan kecenderungan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan *World Economic Outlook "A Rocky Recovery"* oleh International Monetary Fund (IMF) pada bulan April 2023, perekonomian global tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,8% (yoy) (Tabel 7.1). Pertumbuhan ekonomi untuk negara maju dan berkembang diperkirakan mengalami perlambatan, terutama untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Inggris.

Tabel 7.1 *Global Economic Growth Outlook (%yoy)*

Wilayah	2022	2023*
World Output	3,4	2,8
Advance Economies	2,7	1,3
United States	2,0	1,6
Euro Area	3,5	0,8
Japan	1,4	1,3
United Kingdom	4,1	-0,3
Emerging Market	3,9	3,9
China	3,0	5,2
India	6,8	5,9

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Keseimbangan risiko tetap lebih condong ke bawah, meskipun terdapat peningkatan kemungkinan bahwa ekonomi akan jatuh dengan keras (*hard landing*). Tekanan pada sektor keuangan dapat meningkat dan menular (*contagious*), melemahkan ekonomi riil melalui penurunan tajam pada sektor finansial dan dapat memaksa bank sentral untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah ditempuh. Pada kasus hutang negara, meningkatnya biaya berhutang dan pertumbuhan ekonomi yang lemah dapat menyebar dan menyebabkan sistemik. Perang yang terjadi di Ukraina berpotensi untuk lebih memanas dan menyebabkan lonjakan harga pada makanan, maupun harga energi yang dapat mendorong inflasi untuk naik lebih tinggi.

Momentum perbaikan ekonomi nasional diperkirakan berlanjut pada tahun 2023, meskipun dampak perlambatan ekonomi global perlu diwaspadai. Perkembangan perekonomian domestik terakselerasi oleh kinerja ekspor luar negeri yang meningkat, dan meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah yang meningkat, serta investasi non bangunan yang baik. Sejumlah indikator terkini di tahun 2023 tercatat baik seperti Indeks Keyakinan Konsumen, *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur, dan Survei Kegiatan Dunia Usaha yang mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Perekonomian domestik diperkirakan akan tetap tumbuh dengan kecenderungan yang lebih rendah dalam rentang 4,50-5,30% (yoy) pada tahun 2023. Ke depan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas dunia usaha. Meskipun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor luar negeri dan kenaikan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 3,75%-4,25% (yoy), cenderung lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh 4,21% (yoy). Hal ini didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan mobilitas seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 di Aceh. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Aceh diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), dan total net ekspor. Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU), laju pertumbuhan ekonomi diyakini akan ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalan.

Meningkatnya pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Langkah pemerintah yang telah mencabut peraturan pembatasan sosial (PPKM) semakin mendorong

aktivitas dan mobilitas masyarakat yang akan diikuti oleh tingkat belanja yang lebih tinggi. Selain itu, berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Mei 2023 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Provinsi Aceh pada beberapa bulan terakhir dan didukung oleh optimisme perekonomian secara nasional. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Mei 2023 tercatat sebesar 116,8 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 115,7. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2023 tercatat sebesar 113,73 yang diakibatkan oleh naiknya harga gabah kualitas GKP pada tingkat petani dan penggilingan. Angka tersebut masih melanjutkan tren perbaikan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 113,07.

Di sisi lain, kinerja komponen konsumsi pemerintah pada 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, terdapat penurunan pagu anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Berdasarkan Qanun No.6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, rencana anggaran belanja Aceh tahun 2023 sebesar Rp11,09 triliun, lebih rendah jika dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2022 yang sebesar Rp16,17 triliun. Defisit anggaran diperkirakan menurun menjadi Rp0,91 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,82 triliun pada tahun 2022. Penurunan anggaran APBD 2023 tersebut disebabkan oleh menurunnya penerimaan besaran dana otonomi khusus (Otsus) dari Rp7,5T pada tahun 2022 menjadi Rp3,9T pada tahun 2023 atau setara dengan 1% plafon DAU Nasional. Penurunan Otsus tersebut juga sesuai dengan MoU Helsinki di mana mulai tahun 2023 hingga tahun 2027, besaran dana otonomi khusus berkurang menjadi 1% plafon DAU Nasional.

Di sisi lain, pada tahun 2023 diperkirakan intensitas serta nominal *refocusing* tidak setinggi

pada tahun 2022 sehingga diperkirakan mendorong kinerja pada 2023. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), realisasi belanja negara pada Triwulan I 2023 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terdapat deviasi sebesar minus Rp110,25 miliar atau -0,85 persen. Secara persentase, pendapatan negara terealisasi sebesar 19,06% sementara belanja negara terealisasi sebesar 17,30%.

Kinerja PMTB/investasi pada 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh, target realisasi investasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 47,05% menjadi Rp10,0 triliun dari sebelumnya Rp6,8 triliun di tahun 2022. Meskipun demikian, realisasi investasi PMA dan PMDN pada triwulan I 2023 mencapai Rp1,42 triliun, turun sebesar 20,46% (yoy). Pada tahun 2022, realisasi investasi didorong oleh proyek PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, pabrik pupuk NPK oleh PT Pupuk Iskandar Muda, PLTA 1 dan 2 di Peusangan, Jalan tol trans sumatera (JTTS) ruas Banda Aceh – Sigli, Pabrik CPO di Aceh Barat Daya (baru diresmikan PT Mon Jambe) serta Kawasan Industri/Berikat di Krueng Raya yang sedang dalam tahap konstruksi. Pada tahun 2023, pabrik pupuk NPK yang telah beroperasi dan JTTS yang telah menyelesaikan konstruksi seksi 5 dan 6 berpotensi untuk menghambat realisasi investasi pada 2023.

Sementara itu, ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 32,17% (yoy). Hal ini diperkirakan didorong oleh normalisasi harga komoditas ekspor utama Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia, harga batu bara tahun 2023 berpotensi mengalami penurunan menjadi USD 200/ton dari USD 344/ton pada tahun 2022. Harga kopi arabika juga diprediksi mengalami penurunan menjadi USD 4,80/kg dari USD 5,63/kg

pada tahun 2022. Lebih lanjut, harga CPO diproyeksi mengalami normalisasi menjadi USD 980/ton dari USD 1.276/ton pada tahun 2022.

Dari sisi LU, perkiraan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 utamanya didorong oleh positifnya kinerja LU Industri Pengolahan serta LU Pertanian. Secara umum proyeksi kinerja positif pada LU Industri Pengolahan didukung oleh mulai beroperasinya Pabrik Pupuk NPK milik PT. Pupuk Iskandar Muda yang diperkirakan dapat menyumbang akselerasi kinerja industri. Lebih lanjut, kondisi cuaca yang lebih baik pada tahun 2023 juga dapat mendukung LU Pertanian. Kendala pemupukan yang terjadi di tahun 2022 akibat kenaikan harga diperkirakan tidak kembali terjadi di tahun 2023. Meskipun demikian, masih terdapat risiko penahan pertumbuhan LU Pertanian akibat proses pemupukan yang kurang optimal pada tahun 2022 sehingga berdampak pada produksi TBS yang diperkirakan lebih rendah pada tahun 2023. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Aceh juga didorong oleh membaiknya perekonomian dunia serta normalisasi aktivitas masyarakat sejalan dengan langkah pemerintah melakukan vaksinasi masal COVID-19 dan booster yang berlanjut di tahun 2023. Hal ini juga didukung oleh telah dicabutnya peraturan pembatasan sosial (PPKM) pada tahun 2023.

Di sisi lain, faktor penahan pertumbuhan berasal dari LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Transportasi. LU Pertambangan diperkirakan melambat akibat normalisasi harga komoditas pasca COVID-19. LU Transportasi juga diperkirakan melambat secara tahunan yang disebabkan oleh sudah tingginya pertumbuhan LU Transportasi pada 2 tahun terakhir mengingat semakin dibukanya keran pembatasan sosial pasca puncak COVID-19 pada tahun 2020.

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan lebih tertahan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang telah tumbuh sebesar 4,30% (yoy). Prospek sektor pertambangan dan penggalian dari sisi migas, produksi diperkirakan tertahan akibat harga

minyak dan gas yang lebih rendah pada tahun 2023 yang menunjukkan lebih rendahnya permintaan dunia terhadap komoditas tersebut. Meskipun demikian, kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) masih dilakukan di laut Andaman atau 40 mil dari garis pantai Pidie Jaya (Pijay), Pidie, dan Bireuen. Sementara itu, larangan ekspor komoditas batubara yang sudah dicabut berpotensi mendukung pertumbuhan produksi batu bara.

Selanjutnya, LU Perdagangan diperkirakan akan melambat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh sebesar 6,36% (yoy). Perkiraan pertumbuhan yang masih positif didukung oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan mobilitas akibat pelonggaran pembatasan sosial dan dicabutnya peraturan PPKM. Meskipun demikian, terdapat faktor penahan pertumbuhan yang berasal dari kenaikan suku bunga yang berturut-turut sehingga berpotensi menahan konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, penghapusan insentif PPnBM pada akhir tahun 2022 juga diperkirakan menghambat LU Perdagangan pada tahun 2023.

Sementara dari LU Transportasi dan Pergudangan, diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya meskipun tidak sebesar realisasi pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 7,24% (yoy). Kinerja yang diperkirakan positif pada 2023 sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca dicabutnya peraturan PPKM dan tren infeksi COVID-19 yang terus melandai di Aceh. Dari sisi angkutan udara, tren peningkatan penerbangan domestik diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2023, didukung dengan pelonggaran syarat penerbangan udara. Lebih lanjut, pembukaan rute penerbangan Banda Aceh - Medan oleh Citilink, Airasia, dan Lion serta tersedianya rute penerbangan internasional dari Banda Aceh dengan tujuan Penang dan Kuala Lumpur juga mendukung kinerja lapangan usaha. Dari sisi pergudangan, meningkatnya tren belanja *online* dan pengiriman kargo diperkirakan dapat

mendongkrak industri kargo dan pergudangan. Hal ini juga terkonfirmasi dari laporan salah satu pelaku bisnis pengiriman kargo dan pergudangan yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023.

Prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan berpotensi untuk sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 seiring dengan perlambatan ekonomi global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan berada dalam rentang 3,75-4,25% (yoy). Dari sisi permintaan, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan masih akan tumbuh, meskipun berpotensi tertahan akibat kenaikan suku bunga acuan. Dari sisi Konsumsi Pemerintah, terdapat risiko penurunan akibat turunnya alokasi dana otonomi khusus (Otsus) menjadi 1% plafon DAU Nasional di tahun 2023. Selanjutnya dari komponen Investasi/PMTB diperkirakan akan lebih tinggi, disebabkan oleh proyek pemerintah melalui PSN yang memiliki *timeline* diselesaikan pada tahun 2023. Meskipun berdasarkan keterangan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) tidak ada rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di 2023, melainkan lebih fokus pada penyelesaian proyek *existing*.

7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan perkiraan dari The International Monetary Fund (IMF), Inflasi global diperkirakan menurun dari 8,7% (yoy) pada 2022 menjadi 7,0% (yoy) pada 2023 dan menurun menjadi 4,3% (yoy) pada 2024. Angka tersebut masih berada di atas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Inflasi masih didorong oleh kenaikan harga pada komoditas pangan dan energi akibat dampak konflik global. Sejalan dengan kenaikan inflasi global, inflasi domestik diperkirakan akan kembali ke dalam rentang target inflasi $3\pm 1\%$ (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2023, laju inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Aceh diperkirakan akan berada di batas atas sasaran inflasi

nasional sebesar $3\pm 1\%$ (yoy). Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode April 2023 tercatat sebesar 4,05% (yoy). Inflasi diperkirakan akan semakin menurun sepanjang tahun 2023, seiring dengan normalisasi harga bahan pangan.

Dari sisi komoditas bahan makanan, pembatasan sosial yang telah ditiadakan diperkirakan akan meningkatkan mobilitas dan permintaan masyarakat akan komoditas pangan. Tidak adanya kendala pada pertanian diperkirakan mendukung normalisasi inflasi pada tahun 2023. Meskipun demikian, risiko cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi masih berpotensi berdampak pada penurunan hasil tangkapan komoditas perikanan yang dapat mendorong inflasi.

Dari sisi barang yang harganya diatur oleh Pemerintah, kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10% pada tahun 2023 turut mendorong kenaikan inflasi. Meskipun demikian, diperkirakan tidak terjadi kenaikan harga BBM seperti tahun 2022.

Potensi kenaikan inflasi yang lebih tinggi diperkirakan dapat semakin terkendali seiring respon kebijakan Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan BI 7 *days reverse repo rate* (BI7DRR) menjadi 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Januari 2023 dan tetap mempertahankannya hingga RDG Bank Indonesia Mei 2023.

Inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Aceh pada 2023 diperkirakan mereda jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini didorong oleh beragam kegiatan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) yang dilakukan oleh TPIP, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh. Pemerintah Aceh, BI, Satgas Pangan, serta pihak-pihak terkait bersama-sama dalam TPID terus berkoordinasi dan bersinergi untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Strategi dan antisipasi manajemen pasokan untuk komoditas perikanan (salah satu inflator terbesar) juga terus digalakkan, diantaranya melalui *pemanfaatan cold storage* eksisting, pembangunan *cold storage* baru, kerja sama antar daerah, dan operasi pasar. Hal ini

diperkirakan mampu meredam gejolak kenaikan harga sehingga secara keseluruhan tahun 2023, inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Aceh diperkirakan berada di bawah batas atas sasaran inflasi Nasional.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. **Mengurangi tingginya angka kemiskinan Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja** melalui langkah taktis replikasi *piloting* pengembangan kelompok subsisten melalui sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam usulan *piloting* tersebut, antara lain: (i) *Initial assessment*: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan *initial assessment* terkait kelompok potensial yang akan dilakukan *piloting* pengembangan kelompok subsisten; (ii) *Implementing partner*: Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), DPMG bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) identifikasi *implementing partner* yang potensial di Aceh (industri yang mampu menjadi *offtaker*) termasuk potensi pemanfaatan BUMG di gampong-gampong; (iii) Pendampingan: BI, OJK, Kemenkeu dan OPD teknis melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha kepada kelompok subsisten terpilih terkait dengan pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan; (iv) Pendampingan (lanjutan): fasilitasi promosi produk dari *implementing partner* daerah; (v) Monev: monitoring dan evaluasi pelaksanaan oleh seluruh pihak terkait; dan (vi) Replikasi: replikasi *success story* yang telah dilaksanakan secara *rapid* di berbagai kabupaten/kota.
2. **Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.** *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan permodalan, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.
3. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Aceh cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut dinilai belum dioptimalkan dengan baik. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.
4. **Dualisme sertifikasi produk halal di Aceh.** Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas untuk menerbitkan sertifikasi halal produk. Sementara Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyatakan sertifikasi produk halal di Aceh

diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh. Hingga saat ini proses sertifikasi halal di Aceh masih melalui LPPOM MPU, namun masyarakat yang memerlukan sertifikasi halal nasional masih belum dapat memilikinya. Pemerintah Pusat perlu memberikan perhatian terhadap tumpang tindih regulasi sertifikasi halal yang ada di Aceh. Sebab kedua dasar hukum yang digunakan merupakan peraturan yang sah.

5. **Percepatan realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.** Belanja modal diperkirakan memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian sehingga percepatan realisasi belanja modal menjadi hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Diperlukan langkah kebijakan yang ketat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat pelaksanaan belanja di daerah, antara lain melalui: penerapan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di daerah, melakukan monitoring posisi kas dan simpanan Pemda di perbankan, dan memberlakukan sistem *reward/punishment*. *Reward* dapat diberlakukan melalui Dana Insentif Daerah yang diberikan ke daerah berprestasi berdasarkan kinerja keuangan termasuk total penyerapan belanja daerah. *Punishment* diberlakukan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum terhadap daerah dengan jumlah simpanan tidak wajar.
6. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMi di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2023.

7. **Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan.** Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi *jumping* lapangan usaha dari LU pertanian, perikanan dan kehutanan ke LU perdagangan besar dan eceran, tanpa melalui penambahan nilai yang dapat diberikan oleh LU industri pengolahan. Hal ini penting agar provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan oleh industri pengolahan.
8. **Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri.** Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladang berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM.
9. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Di tengah pandemi COVID-19, transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Melalui transaksi non tunai/digital, diharapkan risiko penularan

COVID-19 melalui uang kartal dapat dicegah. Transaksi non tunai/digital juga diperkirakan akan terus meningkat pasca pandemi sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Elektrifikasi Transaksi Pemda (ETPD) juga perlu diakselerasi melalui sinergi Pemda, BI, Perbankan, serta pihak terkait lainnya.

10. Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh*.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor potensial.

11. *Debottlenecking* kendala atau hambatan investasi di Aceh.

Dalam *focus group discussion* (FGD) *Aceh Gayo Investment Dialog* (AGASID) 2022, diketahui beberapa kendala/hambatan investasi di Aceh, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di Aceh dalam menyiapkan proposal proyek yang layak dan komprehensif serta materi promosi krusial lainnya. Sebagai solusi dari kendala ini, RIRU Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* penyusunan proposal investasi yang di dalamnya terdapat 7 aspek penting dalam penyusunan proposal investasi, termasuk simulasi perhitungan kelayakan proyek investasi. Status *clean and clear* untuk beberapa proyek investasi di Aceh masih belum jelas, bahkan beberapa proyek investasi masih terkendala hal mendasar seperti keterbatasan dukungan data. Selanjutnya, terdapat kendala kebijakan sewa lahan maksimal 5 (lima) tahun yang dikeluhkan oleh para investor, sehingga diperlukan percepatan perumusan dan

pengesahan aturan perubahan untuk perpanjangan sewa lahan tersebut.

Inflasi

Pada tahun 2023, tekanan inflasi diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tetap diperlukan kerjasama dengan TPID Aceh untuk dapat mengendalikan laju inflasi. Pada awal tahun 2023, TPID Provinsi Aceh dan 23 Kabupaten/Kota telah melakukan Rapat Koordinasi Wilayah dalam rangka sinkronisasi program pengendalian inflasi setahun ke depan. Lebih lanjut, pengendalian inflasi juga akan mengikuti peta jalan atau *roadmap* jangka pendek (2022-2024) yang telah disusun sebelumnya. Bank Indonesia bersama Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Aceh pada tahun 2023. Adapun program pengendalian inflasi Aceh masih mengacu pada *framework* 4K, antara lain:

- 1. Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis** didukung oleh program pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan), optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas beras, pelaksanaan pasar murah (terutama menjelang HBKN), pelaksanaan sidak pasar, dan menetapkan harga eceran tertinggi (komoditas bahan pangan) melalui penyusunan Qanun (Perda).
- 2. Ketersediaan Pasokan melalui dua program strategis, yaitu peningkatan produksi pangan lokal dan importasi produk pangan.** Peningkatan produksi pangan lokal terutama produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit), produksi komoditas peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam), Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi. Peningkatan produksi juga didukung oleh pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan

infrastruktur pertanian, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir (contoh di Aceh Tamiang), korporatisasi klaster petani pangan, dan pengaturan jadwal tanam komoditas pangan. Selanjutnya, diperlukan juga impor komoditas yang sulit diproduksi secara lokal seperti bawang putih dan gula pasir.

3. **Kelancaran Distribusi melalui dua program strategis, yaitu penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD), serta meningkatkan infrastruktur perdagangan.** Program strategis pertama, dijabarkan menjadi inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi, Peningkatan transaksi KAD, Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI), pelaksanaan Pasar Lelang (komoditas lokal dan ekspor). Selanjutnya, program strategis kedua dijabarkan melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan yaitu melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi kerjasama UMKM pangan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *cold storage* untuk komoditas perikanan.
4. **Komunikasi Efektif melalui tiga program strategi, yaitu memperbaiki kualitas data dan laporan, peningkatan kapasitas dan koordinasi Provinsi dan Kab/Kota, dan mengendalikan ekspektasi inflasi.** Perbaikan kualitas dan laporan dicapai melalui penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota, serta peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan

melalui program rilis pers/media khususnya terkait upaya TPID dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis.

5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh** secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bijak berkonsumsi dan himbauan penggunaan cabai kering.
6. **Mewujudkan ketahanan pangan di Aceh** untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian modern dan perekonomian sirkular. Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi scheduling tanam, dan penyimpanan. i) Kemandirian Pupuk (Petani) dilakukan melalui pengembangan pupuk organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*). Dibutuhkan kapasitas, standarisasi dan legalitas yang cukup serta mumpuni untuk pengembangannya. Salah satu contoh implementasinya melalui pengembangan pupuk dengan dekomposer. ii) Kemandirian Bibit (Produsen bibit), bibit cabai merah keriting (CMK) yang dikenal dengan udeng atau odeng dan cabai merah varietas Bemer adalah varietas cabai lokal unggul berasal dari Kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh. Permasalahan yang muncul dalam proses pembibitan varietas lokal di atas adalah masih terbatasnya petani di Aceh yang membudidayakan varietas tersebut. Selain itu, kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik. Masih perlu dilakukan pemuliaan tanaman

agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas. Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah. Begitu pun untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor. iii) Informasi *scheduling* tanam, dilakukan dengan menghubungkan info antara pedagang besar yang mengendalikan pasar dan pedagang pengepul di daerah pertanian yang menjadi pemasok komoditas tersebut. Selanjutnya, pedagang pengepul meneruskan info tersebut ke para petani untuk dilakukan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, iv) penyimpanan, khususnya untuk komoditas pangan yang perlu didukung *cold supply chain*, yaitu suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen komoditas pertanian. *Buffer stock* yang ada saat ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD).

7. **Menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 18 Agustus 2022** yang antara lain mencakup usulan pembentukan satu data terpadu, pemetaan pelaku pasar dan sentra produksi di Aceh, *timing* panen dan sistem *stock*, serta koordinasi dengan bulog untuk *cold supply chain*. Anggaran tanggap darurat dapat dimanfaatkan untuk ongkos logistik bahan pangan. Dana gampong bersama-sama dapat digunakan untuk membangun pabrik beras premium. Kemudian akan disusun Pergub yang mewajibkan ASN membeli beras premium produksi Bulog Aceh/Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). APBA tahun 2023 akan diarahkan untuk mendorong pengendalian

inflasi.

8. **Penanganan Inflasi Komoditas Beras.**

Pasokan beras kerap kali didatangkan dari luar Aceh pada periode-periode tertentu. Padahal jika dihitung secara tahunan, produksi beras Aceh mengalami surplus. Gabah dari Aceh dijual ke Sumatera Utara untuk diolah, kemudian beras dijual kembali ke Aceh. Kondisi ini menyebabkan harga beras dapat meningkat/lebih tinggi daripada harga lokal. Beras lokal berpotensi untuk kalah saing dengan beras luar yang kualitasnya lebih baik dan berdampak pada berkurangnya pendapatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain menginisiasi optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola oleh profesional terutama untuk komoditas beras dan meningkatkan kualitas pengolahan/penggilingan padi di Aceh untuk menjadi beras kualitas super.

DAFTAR ISTILAH

Administered prices	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Rony Widiarto P.

KOORDINATOR PENYUSUN

Yon Widiyono

TIM PENULIS

Alrikko Putra

Garry Rahmadhian Sutiasa

Fina Ananda

Andika Indra Kusuma

Lintang D. Ratri

M. Fikrisani

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

Softcopy dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>